



RENSTRA

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025–2029



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah berisikan serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kami menyadari bahwa Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak. Diharapkan Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, 24 September 2025

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu



Muh Fadjar Churniawan
NIP 197205041998031007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel..... V

Daftar Gambar..... vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Landasan Hukum..... I-4

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-7

1.3.1 Maksud..... I-7

1.3.2 Tujuan..... I-7

1.4 Sistematika Penulisan..... I-8

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

2.1 Gambaran Pelayanan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu..... II-1

2.1.1 Tugas..... II-1

2.1.2 Fungsi..... II-2

2.1.3 Struktur Organisasi..... II-3

2.2 Sumber Daya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu..... II-4

2.2.1 Sumber Daya Manusia..... II-4

2.2.1.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan II-4

2.2.1.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan..... II-5

2.2.1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan..... II-5

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset/Modal)..... II-6

2.3 Kinerja Pelayanan Kab. Adm. Kepulauan Seribu Periode 2022-2024..... II-8

2.3.1 Lingkup Pelayanan..... II-8

2.3.2 Capaian Indikator Kinerja..... II-9

2.3.3 Realisasi Anggaran..... II-15

2.4 Kelompok Sasaran Layanan..... II-20

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu..... II-21

2.5.1 Tantangan..... II-21

2.5.1.1 Kesenjangan Pendidikan..... II-21

2.5.1.2 Bencana Alam..... II-22

2.5.1.3 Kerusakan Lingkungan..... II-25



2.5.1.4	Keterbatasan Air Bersih dan Listrik.....	II-25
2.5.1.5	Kondisi Transportasi dan Dermaga.....	II-27
2.5.1.6	Kondisi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.....	II-28
2.5.1.7	Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi.....	II-29
2.5.1.8	Kondisi Ketahanan Pangan.....	II-29
2.5.1.9	Kondisi Pelayanan Kesehatan.....	II-30
2.5.2	Peluang.....	II-31
2.5.2.1	Potensi Jumlah Penduduk.....	II-31
2.5.2.2	Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-32
2.5.2.3	Potensi Perekonomian.....	II-33
2.5.2.4	Partisipasi Masyarakat.....	II-34
2.5.2.5	Potensi Pariwisata.....	II-35
2.6	Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-37
2.6.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-37
2.6.1.1	Permasalahan Makro Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-37
2.6.1.2	Permasalahan Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-38
2.6.2	Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.....	II-42
2.6.2.1	Visi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.....	II-42
2.6.2.2	Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.....	II-44
2.6.3	Telaahan Terhadap Isu-isu Global, Nasional, Regional dan Lokal.....	II-46
2.6.3.1	Isu Global.....	II-46
2.6.3.2	Isu Nasional.....	II-50
2.6.3.3	Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta).....	II-55
2.6.3.4	Isu Lokal.....	II-63
2.6.4	Telaahan Arah Pengembangan Kepulauan Seribu.....	II-66
2.6.4.1	Permasalahan Kewilayahan dan Potensi Pengembangan.....	II-66
2.6.4.2	Konsep Pengembangan Pariwisata.....	II-67
2.6.4.3	Wisata Sejarah Heritage	II-69
2.6.4.4	Rencana Pengembangan Pulau Seribu Warna.....	II-70
2.6.4.5	Renovasi Dermaga Kaliadem dan Pembangunan Transportasi Air Laut.....	II-74
2.6.4.6	Pembangunan Terapung (<i>Floating</i>).....	II-75
2.6.4.7	Agro Wisata Pulau Tidung Kecil.....	II-76



2.6.4.8	Penentuan Isu-Isu Strategis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	II-77
---------	--	-------

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029	III-1
3.2	Analisis SWOT dalam Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	III-2
3.3	Strategi Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029..	III-7
3.3.1	Arah Kebijakan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	III-7
3.3.2	Arah Kebijakan Kewilayahan Kepulauan Seribu Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-10
3.4.	Pohon Kinerja Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	III-19

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-30

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Menurut Golongan.....	II-4
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-5
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Menurut Jabatan.....	II-6
Tabel 2.4	Jumlah Aset/ Modal Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Menurut Jenis.....	II-7
Tabel 2.5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2018-2024.....	II-8
Tabel 2.6	Capaian Indikator Makro Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024.....	II-10
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2022 – 2024.....	II-11
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun Anggaran 2022-2024.....	II-16
Tabel 2.9	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Tahun 2022 dan 2023.....	II-22
Tabel 2.10	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019-2024.....	II-23
Tabel 2.11	Frekuensi Kebakaran Berdasarkan Objek Bencana di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2020-2024.....	II-24
Tabel 2.12	Kondisi Instalasi Pengolahan Air Bersih di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-26
Tabel 2.13	Data Tenaga Kesehatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.....	II-30
Tabel 2.14	Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.....	II-31
Tabel 2.15	Sektor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026.....	II-34
Tabel 2.16	Kunjungan Wisatawan Kepulauan Seribu Tahun 2017-2024.....	II-36
Tabel 2.17	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-37
Tabel 2.18	Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	II-38
Tabel 2.19	Penyelarasan Sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan RPJMD, RPJPD dan RPJMN.....	II-44



Tabel 2.20	Isu Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-78
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2030.....	III-1
Tabel 3.2	Analisis Atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal.....	III-3
Tabel 3.3	Tahapan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	III-7
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	III-9
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Harga Konstan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024.....	III-11
Tabel 3.6	Hasil Analisis LQ dan SS Kabupaten Kepulauan Seribu.....	III-13
Tabel 3.7	Target Indikator Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	III-16
Tabel 3.8	Arah Kebijakan Kewilayahan Kepulauan Seribu.....	III-16
Tabel 3.9	Merumuskan Tujuan Renstra berdasarkan Isu Strategis (Level I).....	III-22
Tabel 3.10	Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 (Level II).....	III-23
Tabel 3.11	Mendidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 (Level III).....	III-24
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	IV-18
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-38
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-20230.....	IV-39
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	IV-40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	II-3
Gambar 2.2	Anggaran dan Realisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022-2024.....	II-15
Gambar 2.3	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024.....	II-33
Gambar 2.4	Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	II-45
Gambar 2.5	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.....	II-67
Gambar 2.6	Diversifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Unggulan Kepulauan Seribu..	II-68
Gambar 2.7	Ragam Penyelenggaraan Event Festival.....	II-68
Gambar 2.8	Peta Pariwisata Sejarah dan Heritage.....	II-69
Gambar 2.9	Pengembangan Pulau Seribu Warna.....	II-71
Gambar 2.10	Potensi Pengembangan Transportasi.....	II-74
Gambar 2.11	Kondisi Eksisting Aktivitas Dermaga Transportasi Air.....	II-75
Gambar 2.12	Konsep Pembangunan Terapung.....	II-76
Gambar 2.13	Agro Wisata dan Museum Kerangka Paus Pulau Tidung Kecil.....	II-76
Gambar 2.14	Pulau Tidung Kecil dan Jembatan Cinta.....	II-76
Gambar 2.15	Penetapan Isu Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	II-77
Gambar 3.1	Hasil Analisis LQ dan SS Kabupaten Kepulauan Seribu.....	III-13
Gambar 3.2	Peta Tematik Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	III-15
Gambar 3.3.	Tahapan Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	III-21
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.....	IV-1
Gambar 4.2	Alur Proses <i>Cascading</i> Kinerja/ Sasaran Perangkat Daerah.....	IV-41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dalam menjalankan pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh Wakil Gubernur, Deputi dan Perangkat Daerah. Adapun perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan.

Jakarta terus mengembangkan diri sebagai kota modern yang mampu menjembatani kekuatan ekonomi nasional dengan peluang dan tantangan global, menjadikannya simbol kemajuan sekaligus pusat gravitasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari potensinya sebagai pusat perekonomian dan sumber daya manusia yang unggul secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada tahun 2024 mencapai Rp3.697,36 triliun rupiah atau menyumbang sebesar 16,71 persen (Produk Domestik Bruto) PDB Nasional. Selain itu, saat ini Jakarta mengalami bonus demografi sebesar 71,52 persen dari 10,67 juta penduduk berada pada usia produktif. Tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jakarta pada tahun 2024 juga masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu mencapai 84,15 poin yang tercatat selalu menempati posisi tertinggi di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pembangunan harus dilakukan secara terencana, terpadu, terarah, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kerangka otonomi tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) pada masing-masing perangkat daerah, agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan berlandaskan kedua regulasi tersebut, penyusunan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 menjadi instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional.

Melihat potensi besar di atas, Pemerintah DKI Jakarta hadir dengan visi misi progresif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yakni “Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya”. Hal tersebut perlu didukung oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai perangkat daerah di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kabupaten Bekasi, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan,

Gambar 1.1. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029, digunakan sejumlah rujukan peraturan perundangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
- 4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 97);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);



- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 20) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 24) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2044;
- 28) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- 29) Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program gubernur terpilih.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan mengoordinasikan antar perangkat daerah, lintas sektor dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara konsisten, adaptif, integratif, kolaboratif, dan berkelanjutan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait:

- a. Latar belakang;
- b. Landasan hukum;
- c. maksud dan tujuan; dan
- d. Sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan terkait:

- a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Sumber Daya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- c. Kinerja Pelayanan Kabupaten Kepulauan Seribu Periode 2022-2024
- d. Kelompok Sasaran Layanan
- e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- f. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait:

- a. Tujuan dan Sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029
- b. Analisis SWOT dalam Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029
- c. Strategi Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029
- d. Pohon Kinerja Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait:

- a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- b. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

2.1. Gambaran Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah wilayah kerja Bupati yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan. Kabupaten administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kabupaten Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Administrasi;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi;
- j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi;

- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Administrasi;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten;
- o. fasilitasi pengelolaan KORPRI Kabupaten Administrasi;
- p. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kabupaten Administrasi;
- q. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital informasi Kabupaten Administrasi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan Kabupaten Administrasi;
- s. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- t. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi;
- u. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Selain itu, Kabupaten Administrasi melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
- b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
- c. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
- d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
- e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
- g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
- h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.



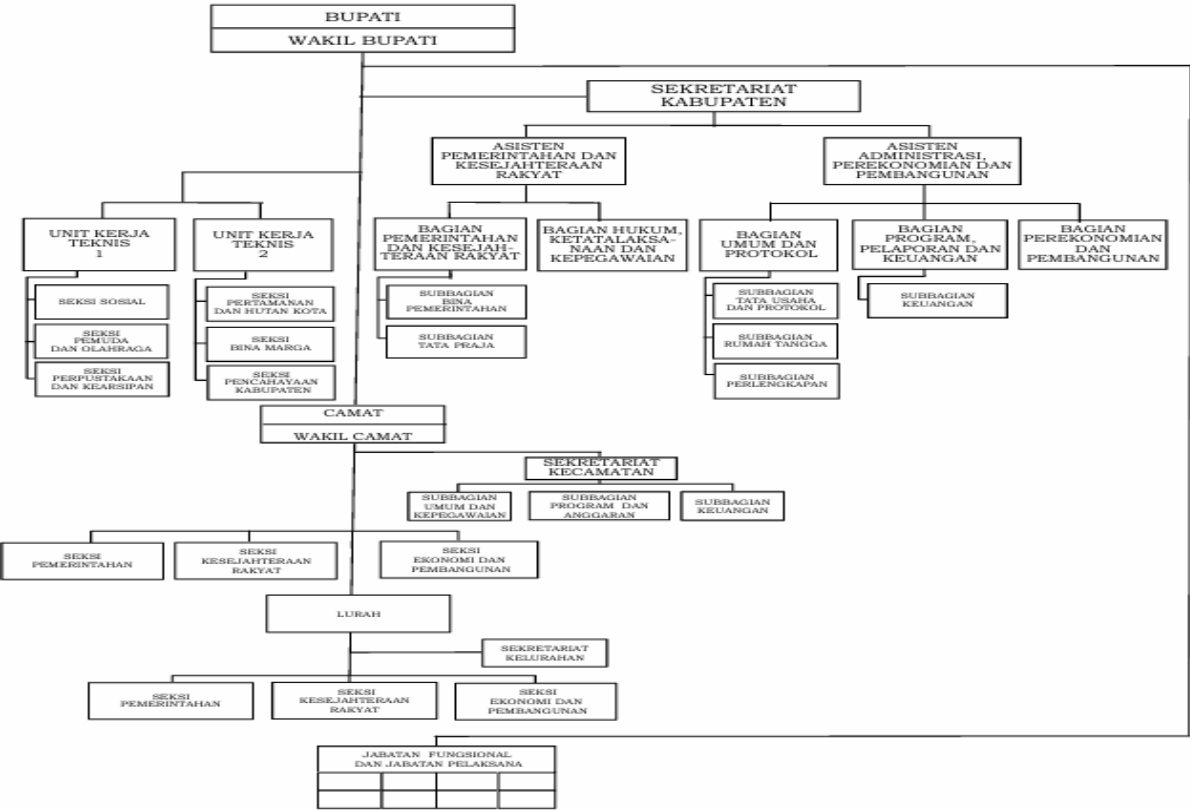
Selain melaksanakan tugas, fungsi utama dan fungsi tambahan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- c. Urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- d. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- f. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang jalan;
- g. Fungsi penyelenggaraan pencahayaan; dan
- h. Fungsi penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



Sumber : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah



2.2. Sumber Daya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data BPS Tahun 2025, Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2024, jumlah total ASN Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan jajarannya sebanyak 165 yang terdiri dari 161 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel 2.1 sebagian besar ASN di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berada di golongan III (Penata Muda sampai Penata Tingkat I) dengan jumlah 105 orang. Golongan II dihuni oleh 41 orang, sementara golongan IV masih sangat sedikit yakni hanya 18 orang (terdiri dari 12 orang IV/a, 4 orang IV/b, dan 2 orang IV/c). Tidak ada pegawai yang menduduki pangkat IV/d dan IV/e. Adapun rincian pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menurut golongan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Menurut Golongan Tahun 2024

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Juru Muda/ I.a	0	0	0
Juru Muda Tingkat I / I.b	0	0	0
Juru/ I.c	1	0	1
Juru Tingkat I/ I.d	0	0	0
Pengatur Muda/ II.a	2	0	2
Pengatur Muda Tingkat I/ II.b	6	0	6
Pengatur/ II.c	14	3	17
Pengatur Tingkat I/ II.d	12	4	16
Penata Muda/ III.a	25	6	31
Penata Muda Tingkat I/ III.b	23	9	32
Penata/ III.c	17	0	17
Penata Tingkat I/ III.d	21	4	25
Pembina/ IV.a	11	1	12
Pembina Tingkat I/ IV.b	4	0	4
Pembina Utama Muda/ IV.c	2	0	2
Pembina Utama Madya/ IV.d	0	0	0
Pembina Utama// IV.e	0	0	0
Jumlah/Total	138	27	165

Sumber : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Angka Tahun 2025



2.2.1.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.2. sebagian mayoritas pegawai berpendidikan S1/Sarjana sebanyak 99 orang (82 laki-laki, 17 perempuan). Lulusan S2 berjumlah 26 orang dan S3 hanya 1 orang. Sementara itu, pegawai berpendidikan SMA masih ada 25 orang, Diploma III sebanyak 12 orang dan pegawai dengan pendidikan SMP sebanyak 2 orang. Adapun rincian pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menurut Tingkat Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Aparatur Sipil Negara		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar (SD)	0	0	0
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	1	2
Sekolah Menengah Atas (SMA)	21	4	25
Diploma I	0	0	0
Diploma II	0	0	0
Diploma III	7	5	12
Diploma IV	0	0	0
S1/Sarjana	82	17	99
S2/Pasca Sarjana	26	0	26
S3/Doktor/Ph.D	1	0	1
Jumlah/Total	138	27	165

Sumber : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Angka Tahun 2025

2.2.1.3. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan tabel 2.3. dari total 165 ASN didominasi oleh pegawai dengan jabatan Non Fungsional Teknis/Pelaksana sebanyak 97 orang (77 laki-laki dan 20 perempuan). Jabatan lainnya yang relatif besar adalah Pengawas dengan jumlah 44 orang (42 laki-laki, 2 perempuan), dan Administrator sebanyak 11 orang. Untuk jabatan pimpinan, hanya terdapat 2 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sementara jabatan Pimpinan Tinggi Utama maupun Madya kosong.



Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Menurut Jabatan Tahun 2024

Jabatan	Aparatur Sipil Negara		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	3	0	3
Administrator	10	1	11
Pengawas	42	2	44
Eselon V	0	0	0
Jabatan Fungsional Guru	0	0	0
Jabatan Fungsional Medis	0	0	0
Jabatan Fungsional Teknis	0	0	0
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	7	4	11
Jabatan Non Fungsional Teknis/Pelaksana	76	20	96
Jumlah/Total	138	27	165

Sumber : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Angka Tahun 2025

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset/Modal)

Di samping sumber daya manusia terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung tugas-tugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi, dan transportasi, serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, khususnya dalam fungsi teknis.

Saat ini, kondisi sarana prasarana di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi, utamanya dalam jumlah peralatan komputer yang belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Secara rinci dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :



Tabel 2.4 Jumlah Aset/ Modal Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Menurut Jenis Tahun 2024

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kapal Kabupaten	28	1	10	17	
2	Kendaraan roda 4	14	-	11	3	
3	Kendaraan roda 2	13	-	6	7	
4	Germor	5	-	2	3	
5	AC Chiller	1	1	-	-	
6	AC Split	120	-	120	-	
7	AC Portable / <i>Standing Floor</i>	4	4	-	-	
8	Peralatan kantor :	-	-	-	-	
	- Komputer PC	24	-	24	-	
	- Printer	41	-	20	21	
9	APAR	19	19	-	-	

Sumber: Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026

Terkait sarana gedung Kantor Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Rumah Dinas Jabatan dan Mess Karyawan, serta Kantor Perwakilan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di wilayah darat perlu ditingkatkan kualitasnya agar kinerja organisasi lebih optimal.

Selanjutnya, dari 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 2 kantor kecamatan dalam kondisi baik, namun untuk rumah dinas Camat hanya tersedia 1 gedung di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dalam keadaan rusak sedang. Sedangkan, sampai saat ini di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara belum memiliki rumah dinas jabatan sehingga perlu dilakukan pembangunan rumah dinas Camat Kepulauan Seribu Utara.

Sementara itu, sebanyak 4 kantor kelurahan dari total 6 kantor kelurahan dalam kondisi baik. Hanya sebanyak 2 kantor kelurahan dalam kondisi rusak sedang, yakni Kantor Lurah Pulau Panggang (pembangunan tahun 2012) dan Kantor Lurah Pulau Tidung (pembangunan tahun 2012) yang sejauh ini hanya dilakukan pemeliharaan rutin/berkala sehingga diperlukan rehab kedua gedung tersebut.

Selanjutnya, dari total 6 rumah dinas kelurahan yang ada sebanyak 4 rumah dinas kelurahan dalam kondisi baik. Hanya 2 rumah dinas kelurahan dalam kondisi rusak berat yakni Rumah Dinas Lurah Pulau Untung Jawa (pembangunan tahun 2003) dan Rumah Dinas Lurah Pulau Harapan (pembangunan tahun 2004) yang sejauh ini hanya dilakukan pemeliharaan rutin/berkala sehingga diperlukan rehab kedua gedung tersebut.



2.3. Kinerja Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2022-2024

2.3.1. Lingkup Pelayanan

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu termasuk pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan, antara lain:

- a. Layanan Ketertiban Umum (Tibum);
- b. Layanan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
- c. Layanan Juru Pemantau Jentik (Jumantik);
- d. Layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. Layanan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- f. Layanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);
- g. Layanan Sosial;
- h. Layanan Perpustakaan;
- i. Layanan Kearsipan;
- j. Layanan Kepemudaan dan Olahraga;
- k. Layanan Kehutanan (Pertamanan dan Pemakaman);
- l. Layanan Pekerjaan Umum dan Sub Urusan Bidang Jalan; dan
- m. Layanan Penyelenggaraan Pencerayaan Kabupaten.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur, setiap tahun dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. SKM menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Tabel 2.5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2018-2024

Tahun	Target	Nilai IKM	Kategori
2024	88,6	95,875	Sangat Baik “A”
2023	88,5	95,52	Sangat Baik “A”
2022	88,5	89,45	Sangat Baik “A”
2021	86	87,72	Baik “B”
2020	86	86,08	Baik “B”
2019	83	83,64	Baik “B”
2018	80	86,01	Baik “B”

Sumber: LKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2018 hingga 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan tren peningkatan dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Capaian positif ini merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang ditempuh, antara lain peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana prasarana penunjang, serta penerapan layanan berbasis digital. Selain itu, koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.3.2. Capaian Indikator Kinerja

Dari perspektif ekonomi wilayah, capaian indikator makro Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada awal periode 2020–2021, laju pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi cukup dalam, bahkan pada 2023 sempat menurun signifikan hingga -7,86 persen, yang berimplikasi pada penurunan PDRB total maupun per kapita. Hal ini juga terlihat dari menurunnya kontribusi PDRB Kepulauan Seribu terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta.

Meski demikian, indikator sosial-ekonomi lainnya memperlihatkan arah perbaikan secara bertahap. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami tren meningkat dari 74,19 pada 2020 menjadi 76,69 pada 2024, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan konsisten dari 14,87 persen pada 2020 menjadi 13,03 persen pada 2024. Begitu pula dengan prevalensi stunting yang terus menurun hingga mencapai 16,9 persen pada 2024, menandakan adanya peningkatan intervensi gizi dan pelayanan kesehatan.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sempat naik pada 2021 namun kembali menurun di 2024 menjadi 7,93 persen. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dari 51,94 pada 2020 menjadi 68,59 pada 2024, sejalan dengan upaya pelestarian ekosistem laut dan pesisir yang menjadi aset utama perekonomian daerah.



Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan serius, perbaikan pada indikator sosial, lingkungan, serta pembangunan manusia memberi sinyal positif bagi arah pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menuju keseimbangan antara ketahanan ekonomi, kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Makro Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Tahun 2020-2024**

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia ¹	74,19	74,65	75,34	75,91	76,69
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹	-4,94	-1,55	-1,70	-7,86	-1,11
Kontribusi PDRB Provinsi (%) ¹	0,23	0,28	0,32	0,24	0,22
Total PDRB (Triliun Rupiah) ¹	6,41	8,15	10,12	8,21	8,10
PDRB Per Kapita (ADHB, Ribu Rupiah) ¹	232.819	291.267	358.302	287.922	281.266
Pravelensi Stunting (%) ³	N/A	19,3	20,5	18,6	16,9
Tingkat Kemiskinan (%) ¹	14,87	15,08	14,11	14,11	13,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ¹	7,37	8,58	8,47	8,47	7,93
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ²	51,94	66,66	66,46	67,99	68,59

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; ²Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2024; ³Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Capaian indikator kinerja pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan tugas dan fungsinya pada periode 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:



Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2022 – 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kabupaten Administrasi	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	89,02	93,105	N/A	101,94	104,59
2		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kecamatan Administrasi	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	89,02	93,105	N/A	101,94	104,59
3		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kota Administrasi	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	89,02	93,105	N/A	101,94	104,59
4		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Lingkungan Hidup	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	89,02	93,105	N/A	101,94	104,59
5		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kepemudaan dan Olahraga	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	93,83	93,105	N/A	107,44	104,59
6		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Perpustakaan	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	89,02	93,105	N/A	101,94	104,59
7		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kearsipan	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	89,02	93,105	N/A	101,94	104,59
8		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kepegawaian	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	89,02	93,105	N/A	101,94	104,59



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	89,02	93,105	N/A	101,94	104,59
10		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Sosial	Indeks	N/A	87,33	89,015	N/A	89,02	93,105	N/A	101,94	104,59
11	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks	N/A	88,5	91,285	N/A	95,52	95,875	N/A	107,93	105,03
12		Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi bidang unsur Kota Administrasi	Indeks	N/A	85	87,25	N/A	87,25	90,71	N/A	1026	103,97
13		Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi bidang unsur Kabupaten Administrasi	Indeks	N/A	85	87,25	N/A	87,25	90,71	N/A	102,65	103,97
14		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur bidang Lingkungan Hidup	Indeks	N/A	88,5	88,6	N/A	88,7	90,69	N/A	100,23	102,36
15		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur bidang Perpustakaan	Indeks	N/A	88,5	88,6	N/A	93,83	95,37	N/A	106,02	107,64



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur bidang Kepemudaan dan Olahraga	Indeks	N/A	88,5	88,6	N/A	91,07	94,16	N/A	102,9	106,28
17		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur bidang Kearsipan	Indeks	N/A	88,5	94,16	N/A	98,76	93,22	N/A	111,59	99
19		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur bidang Kepegawaian	Indeks	N/A	88,5	91,135	N/A	87,30	90,46	N/A	98,64	99,26
20		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks	N/A	88,5	88,6	N/A	81,53	90,21	N/A	92,12	101,82
21		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur Bidang Sosial	Indeks	N/A	88,5	92,885	N/A	97,28	94,54	N/A	109,92	101,78

Sumber : LKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022; LKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023; LKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas bahwa kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan tren yang cukup positif di berbagai bidang pelayanan publik. Pada sasaran “Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari, dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”, terlihat peningkatan capaian Indeks Kepuasan Layanan pada hampir semua unsur. Misalnya, capaian Indeks Kepuasan Layanan bidang unsur Kabupaten Administrasi naik signifikan dari 89,02 pada tahun 2023 menjadi 93,105 pada tahun 2024, dengan capaian persentase melebihi 100% dari target (104,59).

Pola capaian serupa juga terjadi pada bidang Kecamatan, Kota Administrasi, Lingkungan Hidup, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Sosial, yang secara umum menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan dengan rata-rata capaian di atas target. Khusus pada bidang Kepemudaan dan Olahraga, capaian bahkan menembus angka 107,44% pada tahun 2023 dan tetap tinggi di 104,59% pada tahun 2024.

Sementara itu, pada sasaran “Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal”, indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan juga mencatat peningkatan. Dari nilai 95,52 di tahun 2023, meningkat menjadi 95,875 di tahun 2024, dengan capaian persentase di atas 100% (107,93 pada 2023 dan 105,03 pada 2024). Indeks efektivitas koordinasi pada unsur Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi pun menunjukkan perkembangan positif dengan capaian persentase yang melampaui target, mencapai lebih dari 102% pada 2024.

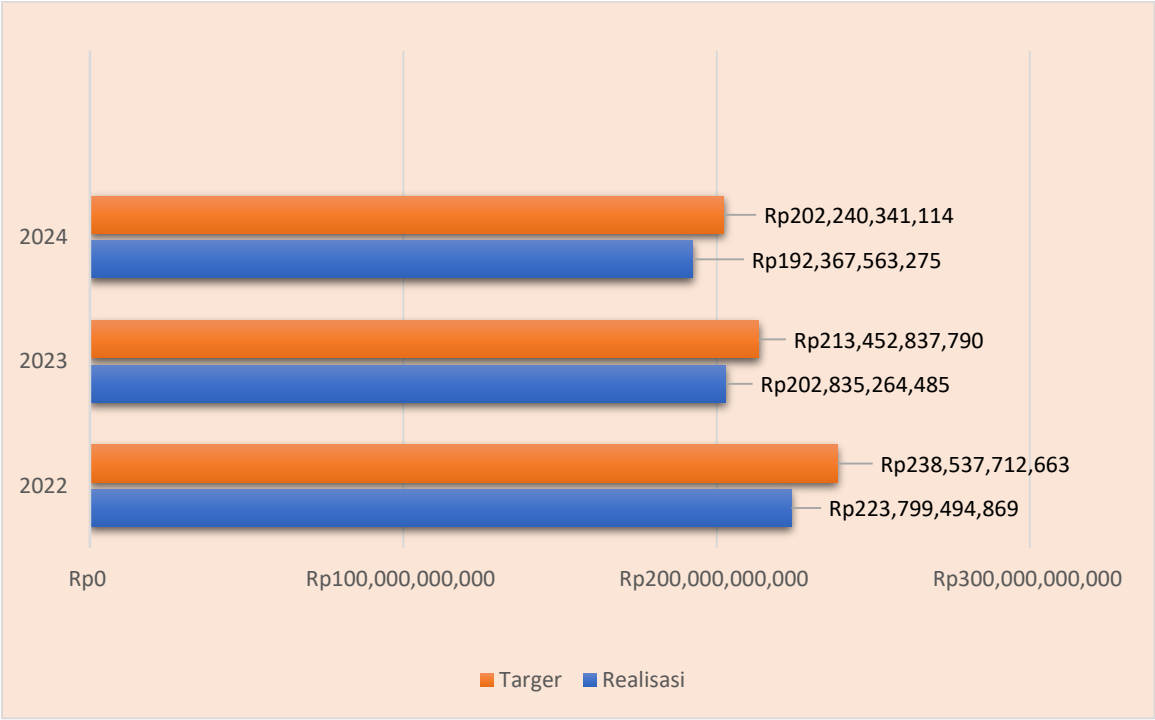
Untuk layanan pelimpahan kewenangan, beberapa bidang mengalami capaian yang sangat baik. Bidang Perpustakaan misalnya, mencapai capaian 106,02% di tahun 2023 dan meningkat menjadi 107,64% di tahun 2024. Demikian juga bidang Kepemudaan dan Olahraga yang mencapai 102,9% pada 2023 dan meningkat ke 106,28% pada 2024. Namun, terdapat variasi pada beberapa indikator, seperti bidang Kepegawaian dan Pekerjaan Umum, yang sempat menurun pada 2023 sebelum kembali meningkat pada 2024. Meski begitu, secara umum capaian tetap berada di atas target, menunjukkan kinerja pelayanan yang relatif stabil.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada periode 2022–2024 mengalami peningkatan yang konsisten. Sebagian besar indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian rata-rata di atas 100%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi, serta peningkatan kepuasan masyarakat di berbagai bidang layanan.

2.3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran yang diterima oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2022-2024 cenderung menurun. Anggaran paling besar yang diterima yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp238.537.712.663 (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) anggaran ini lebih besar dari tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan serapan anggaran pada setiap tahunnya tidak mencapai target tahunan, namun rata rata serapan anggaran sebesar 95%.

Gambar 2.2. Anggaran dan Realisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022-2024



Sumber : LKIP Tahun 2022; LKIP Tahun 2023; LKIP Tahun 2024

Secara detail, target dan realisasi anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun Anggaran 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut :



Tabel 2.8 Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun Anggaran 2022-2024

No	Program	TAHUN ANGGARAN 2022			TAHUN ANGGARAN 2023			TAHUN ANGGARAN 2024		
		Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/ Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (%)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/ Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (%)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/ Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penyelenggaran Jalan	N/A	N/A	N/A	23.571.232.196	22.743.748.290	96,49%	11.404.502.328	10.186.317.767	89,32%
2	Program Penanganan Bencana	88.047.680	36.763.200	41,75%	324.549.392	94.493.600	29,12%	204.501.697	180.696.000	88,36%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.623.888.171	2.128.381.091	81,12%	11.496.522.688	10.954.364.643	95,28%	10.490.939.211	10.216.421.127	97,38%
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	557.139.073	440.881.400	79,13%	722.429.662	626.000.808	86,65%	241.318.714	213.150.968	88,33%
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	486.985.103	432.444.462	88,80%	443.708.146	354.396.424	79,87%	493.343.485	449.273.548	91,07%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	1.120.019.933	1.044.459.904	93,25%	1.130.819.814	1.088.308.888	96,24%	1.479.336.296	1.423.620.845	96,23%
7	Program Pengelolaan Arsip	N/A	N/A	N/A	27.363.520	25.542.000	93,34%	57.046.969	47.480.062	83,23%
8	Program Kepegawaian Daerah	N/A	N/A	N/A	39.000.000	39.000.000	100%	39.000.000	39.000.000	100%
9	Program Pengelolaan Kecamatan	50.606.659.753	43.706.722.745	86,37 %	38.987.568.750	38.178.435.834	97,92%	40.935.045.505	40.139.567.418	98,06%
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.257.608.919	8.044.505.588	97,42	934.203.251	728.446.500	77,98%	935.714.371	750.239.130	80,18%



No	Program	TAHUN ANGGARAN 2022			TAHUN ANGGARAN 2023			TAHUN ANGGARAN 2024		
		Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/ Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (%)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/ Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (%)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/ Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	109.877.977.519	104.084.625.311	94,73	127.154.187.672	119.837.087.327	94.25%	127.851.130.670	120.951.622.303	94,60%
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	29.818.277.139	29.582.844.986	99,21%	600.792.118	459.941.500	76.56%	538.257.970	409.873.200	76,15%
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.998.844.242	2.702.480.206	90,12%	7.564.771.624	7.274.866.271	96.17%	7.086.110.790	6.892.527.777	97.27%
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	455.688.957	430.632.400	94.50%	484.093.108	467.773.130	96,63%
15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	491.483.996	456.478.900	92,88%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	29.818.277.139	29.582.844.986	99,21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	934.058.560	788.591.290	84,43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	419.600.000	418.625.000	99,77%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	438.845.436	348.845.800	79,49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : LKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022; LKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023; LKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.

Berdasarkan tabel 2.8. realisasi anggaran tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024, dapat diketahui bahwa capaian serapan anggaran program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan efektivitas dari tahun ke tahun, meskipun terdapat beberapa fluktuasi antar program. Hal ini mencerminkan kemampuan adaptasi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik secara akuntabel dan efisien, sesuai dengan dinamika kebijakan serta kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Pada tahun anggaran 2022, total program yang tercatat dalam tabel mencapai 15 program. Di antara program-program tersebut, terlihat bahwa capaian realisasi anggaran cukup beragam. Beberapa program mencatat serapan sangat tinggi, seperti Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan, masing-masing mencapai realisasi sebesar 99,21%. Hal ini menunjukkan bahwa program-program strategis yang menyasar pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran. Demikian pula, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mencatatkan capaian yang tinggi sebesar 94,73%, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berhasil mencapai 90,12%.

Namun, tidak semua program menunjukkan kinerja serapan yang memuaskan. Program Penanganan Bencana misalnya, hanya mencapai realisasi sebesar 41,75% dari pagu anggaran. Realisasi yang rendah ini diduga disebabkan oleh tidak terjadinya bencana besar yang membutuhkan belanja dalam jumlah signifikan, sehingga banyak anggaran bersifat siaga yang tidak dapat diserap. Program lain yang mencatat serapan rendah adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 79,13% dan Program Pengembangan Daya Saing Olahraga sebesar 88,80% yang masih menunjukkan ruang perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi kegiatan. Sementara itu, Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Penyelenggaraan Kota Administrasi berhasil mempertahankan realisasi tinggi, yakni masing-masing sebesar 93,25% dan 97,42%.

Tahun anggaran 2023 menunjukkan peningkatan efektivitas dalam serapan anggaran di berbagai program. Hampir seluruh program mengalami kenaikan atau stabil pada tingkat realisasi di atas 90%. Program Pengelolaan Kecamatan mencatat realisasi sebesar 97,92% dari target Rp 38,98 miliar, menunjukkan pengelolaan layanan



wilayah kecamatan yang efisien. Selain itu, program yang serapan anggarannya sangat tinggi adalah Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 96,24% Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebesar 95,28 dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 94,25%. Kinerja yang baik ini menunjukkan peningkatan sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Meski demikian, pada tahun 2023 Program Penanganan Bencana kembali menjadi salah satu program dengan tingkat serapan terendah, hanya mencapai 29,12% dari pagu anggaran sebesar Rp 324,5 juta. Hal ini kembali mengindikasikan bahwa belanja penanganan bencana sangat tergantung pada kejadian aktual di lapangan, sehingga anggaran yang bersifat kontingensi sering kali tidak dapat dimanfaatkan maksimal. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan juga belum menunjukkan capaian optimal dengan realisasi sebesar 79,87%. Sementara itu, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menunjukkan kinerja anggaran yang baik dengan realisasi masing-masing sebesar 94,5% dan 96,17%

Pada tahun anggaran 2024, sebagian besar program mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian serapan anggarannya. Dari seluruh program yang tercatat, hampir seluruhnya berada di atas 85%, dan mayoritas melampaui angka 90%. Beberapa program yang menonjol dengan realisasi sangat tinggi adalah Program Kepegawaian Daerah yang mencapai realisasi penuh sebesar 100%, Program Pengelolaan Kecamatan dengan realisasi sebesar 98,06%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 94,60%, dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebesar 97,38%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan telah selaras dengan kebutuhan lapangan dan alokasi anggaran, sehingga meminimalkan deviasi antara target dan realisasi.

Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Jalan memiliki alokasi cukup besar sebesar Rp11,4 miliar hanya mampu direalisasikan sebesar 89,32%, meskipun angka ini masih tergolong baik. Program lainnya yang berada di bawah angka 90% adalah Program Penanganan Bencana sebesar 88,36 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 88,33 dan Program Pengelolaan Arsip sebesar 83,23%. Khusus untuk Program Penyelenggaraan Kota Administrasi, capaian realisasi hanya mencapai 80,18%, yang merupakan capaian terendah di tahun 2024. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya serapan anggaran pada program-program tersebut,

apakah disebabkan oleh faktor teknis dalam pengadaan, keterlambatan pelaksanaan, atau efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, analisis capaian anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sebagian besar program telah menunjukkan realisasi anggaran di atas 90%, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Program-program yang mendukung layanan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selalu menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran. Sementara itu, program dengan sifat kontingensi seperti penanganan bencana cenderung memiliki serapan yang rendah secara konsisten karena keterkaitannya yang tinggi dengan kejadian darurat yang tidak dapat diprediksi. Adapun pada tahun 2022, sebagian besar indikator masih tercatat N/A karena pengukuran kinerja mengacu pada Renstra 2023–2026 yang baru mulai berlaku pada periode berikutnya.

Melalui pencapaian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah berhasil mengelola anggaran secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program tertentu. Ke depan, penguatan monitoring dan evaluasi serta perbaikan dalam perencanaan kegiatan dapat terus ditingkatkan guna menjaga kualitas pelaksanaan program dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat maka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak bisa secara mandiri melaksanakan pelayanan terutama yang bersifat teknis. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bekerja sama dengan mitra, baik PD/UKPD maupun dengan melibatkan pihak swasta/perusahaan.

Lebih lanjut, mitra UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berjumlah 31 unit yaitu 1 Inspektorat Pembantu, 1 Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 22 Suku Dinas, dan 6 Suku Badan. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Seribu membawahi 2 kecamatan dan 6 kelurahan.

Mitra kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari swasta/perusahaan yang berkontribusi dalam pemberian pelayanan terutama berasal dari perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kepulauan Seribu. Hal ini sejalan dengan Pergub Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) dimaksudkan untuk optimalisasi program pembangunan daerah. Adanya TSLDU di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selama kurun waktu 2020–2024 dapat mengoptimalkan program pembangunan yang ada sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan. Untuk itu, perlu dioptimalkan koordinasi dengan pelaku usaha untuk dapat melaksanakan TSLDU secara berkelanjutan.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menuntut adanya peningkatan peran, kewenangan dan kapasitas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Kepulauan Seribu, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur, sebagai berikut:

2.5.1. Tantangan

2.5.1.1. Kesenjangan Pendidikan

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2022–2023, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan kemajuan dalam partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang menengah. APM untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) tercatat sangat tinggi, yaitu 99,77% pada 2022 dan 99,56% pada 2023, menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7–12 tahun bersekolah sesuai jenjang. Ini merupakan capaian penting yang mencerminkan kuatnya kesadaran pendidikan dasar di masyarakat, serta ketersediaan fasilitas SD yang tersebar cukup merata di beberapa pulau utama.



Namun, tantangan mulai tampak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang SMP/MTs, APM hanya 81,31% pada 2023, meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 79,40%. Lebih besar lagi kesenjangan terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA, yang hanya mencapai 78,92% pada 2023 meskipun juga meningkat dari tahun 2022 sebesar 70,33. Artinya, lebih dari 1 dari 5 remaja usia 16–18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang semestinya.

Capaian ini sangat berkaitan dengan tantangan geografis yang unik di Kepulauan Seribu. Sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar, keterbatasan jumlah sekolah menengah atas menjadi hambatan utama. Fasilitas pendidikan menengah hanya tersedia di beberapa pulau, seperti Pulau Pramuka dan Pulau Tidung. Sementara itu, pulau-pulau lain seperti Pulau Panggang, Pulau Harapan, atau Pulau Kelapa tidak memiliki sekolah jenjang SMA/SMK, sehingga siswa harus menyeberangi laut setiap hari hanya untuk mengakses pendidikan. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan secara fisik, tetapi juga menambah beban biaya, risiko cuaca buruk, dan ketidakstabilan kehadiran siswa. Data tersebut dapat dilihat dalam rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Tahun 2022 dan 2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	
	2022	2023
SD/MI/Sederajat	99,77 %	99,56 %
SMP/MTs/ Sederajat	79,40 %	81,31 %
SMA/SMK/MA/Sederajat	70,33 %	78,92 %

Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Angka 2024

2.5.1.2. Bencana Alam

Berdasarkan data indeks risiko bencana yang dihimpun dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan risiko bencana di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pada tahun 2019, indeks risiko bencana berada pada angka 64,80, yang menandakan bahwa wilayah ini termasuk dalam kategori risiko tinggi. Nilai ini kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 56,66 pada tahun 2020, dan terus turun menjadi 49,46 pada tahun 2021, yang menunjukkan pergeseran ke kategori risiko sedang.



**Tabel 2.10 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Tahun 2019-2024**

Tahun	Indeks Resiko Bencana
2019	64.80
2020	56.66
2021	49.46
2022	52.13
2023	51.05
2024	49.75

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia. www.inarisk.bnpb.go.id

Penurunan indeks tersebut dapat mencerminkan adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan penanggulangan bencana, baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat, program pelatihan kebencanaan, maupun pembangunan sarana evakuasi dan pemantauan bencana. Namun, pada tahun 2022, indeks sedikit meningkat menjadi 52,13, yang mengindikasikan adanya peningkatan potensi kerentanan atau bahaya di wilayah tersebut. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas cuaca ekstrem atau keterbatasan pemeliharaan infrastruktur kebencanaan.

Meski begitu, pada tahun 2023 indeks kembali turun menjadi 51,05, dan berlanjut ke angka 49,75 pada tahun 2024. Nilai ini menandakan bahwa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tetap berada pada kategori risiko sedang, namun mendekati ambang batas rendah. Penurunan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana secara perlahan namun berkelanjutan.

Secara umum, data ini mencerminkan bahwa upaya penanggulangan bencana dan peningkatan ketangguhan wilayah terhadap risiko alam dan iklim di Kepulauan Seribu mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, karena wilayah ini secara geografis masih sangat rentan terhadap bencana laut seperti abrasi, cuaca ekstrem, dan potensi tsunami, sehingga komitmen terhadap peningkatan kapasitas, sistem peringatan dini, serta perlindungan ekosistem pesisir tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan data BPS tahun 2019-2024, bahwa dalam kurun tahun tersebut bencana alam yang melanda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kejadian bencana yaitu berupa bencana cuaca yang ekstrim. Namun dalam kurun waktu 2019-2023 terdapat 106 kejadian bencana kebakaran. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.11 Frekuensi Kebakaran Berdasarkan Objek Bencana di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2020-2024

Tahun Year	Frekuensi	OBJEK BENCANA								
		BP	BUP	BI	KD	ILG	TB	LPK	S	LN
2020	9	1	-	-	1	-	-	-	-	7
2021	16	1	2	-	1	-	5	-	-	7
2022	20	4	-	-	2	-	11	-	1	2
2023	25	7	4	1	-	-	8	-	2	3
2024	21	8	2	-	1	-	8	-	2	-
Jumlah/ Total	106	21	8	1	5	0	32	0	5	19

Ket.	BP	:	Bangunan Perumahan
	BUPBIBI	:	Bangunan Industri
	K	:	Kendaraan
	ILGTBT	:	Tumbuhan
	LSS	:	Sampah
	LN	:	Lain – lain

Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Angka 2025

Perubahan iklim dunia berdampak terhadap kondisi wilayah di belahan dunia. Berdasarkan data dari Unit Kerja Teknis (UKT) 1 Kabupaten, bahwa di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu rawan bencana angin puting beliung. Pada tahun 2018 tercatat 75 rumah rusak diterpa angin puting beliung. Bencana angin puting beliung yang terjadi pada tahun 2018 tersebut terjadi di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka dengan jumlah kerusakan terbanyak terdapat di Pulau Panggang. Kantor Kelurahan Pulau Panggang juga menjadi korban kerusakan akibat angin puting beliung.

Lebih lanjut, wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga rawan terhadap banjir rob, dimana pada tahun 2021 banjir rob mengakibatkan Pulau Panggang, Pulau Kelapa dan Pulau Harapan terendam dengan ketinggian 5-30 cm. Pada tahun yang sama, banjir rob juga terjadi di wilayah kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yakni di Pulau Untung Jawa, Pulau Pari dan Pulau Tidung dengan ketinggian air 10-30 cm. Dengan demikian, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kesiapsiagaan agar dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana dapat ditekan.

2.5.1.3. Kerusakan Lingkungan

Seiring dengan penambahan aktivitas masyarakat, bertambah juga potensi kerusakan lingkungan. Pada tahun 2020 terdapat kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Pulau Tidung Kecil. Hal ini disebabkan oleh Kapal Tongkang yang menabrak terumbu karang di wilayah perairan Pulau Tidung Kecil. Selain itu adanya fenomena abrasi yang dipicu oleh penebangan hutan bakau yang tidak terkontrol mengakibatkan luas pulau semakin menyusut dan beberapa bagian pulau terendam. Dengan demikian, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sehingga dampak kerugian terhadap lingkungan dari aktivitas dapat diminimalisir.

2.5.1.4. Keterbatasan Air Bersih dan Listrik

Ketersediaan air bersih dan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Seribu yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, kebutuhan listrik di pulau penduduk (kecuali Pulau Sabira) disuplai dengan menggunakan kabel bawah laut circuit II dari Gardu Hubung Tanjung Pasir Tangerang dengan 20 Mega Volt Ampere.

Kondisi keterbatasan listrik terlihat jelas di Pulau Sabira. Pulau Sabira merupakan wilayah pemukiman penduduk yang secara geografis letaknya paling jauh dari Ibukota Jakarta. Pasokan listrik di wilayah tersebut saat ini sudah disuplai dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 400 kWp yang beroperasi selama 12 jam dan sisanya masih menggunakan Mesin Genset untuk mengaliri listrik satu pulau dengan luas pulau 8,82 Ha yang dioperasikan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Untuk Pulau-Pulau Resort bahkan masih mengandalkan tenaga dari mesin genset yang dioperasikan secara mandiri dan belum mendapatkan suplai listrik dari PT PLN (Persero).

Keterbatasan air bersih untuk mandi maupun air layak konsumsi hampir terjadi di seluruh pulau pemukiman penduduk. Kondisi yang sangat memprihatinkan terlihat di Pulau Panggang dan Pulau Kelapa dengan kadar garam air tanah yang sangat tinggi sehingga tidak layak dimanfaatkan untuk mandi maupun konsumsi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UKPD terkait telah berupaya membangun *Reverse Osmosis (RO)* di sejumlah pulau pemukiman, namun debit air bersih yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan belum dapat menjangkau seluruh pulau pemukiman. Berdasarkan data dari Suku



Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025, kondisi *existing* Instalasi Pengolahan Air *Reverse Osmosis (IPA-RO)* di Kepulauan Seribu dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebagai berikut :

Tabel 2.12 Kondisi Instalasi Pengolahan Air Bersih di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No.	Lokasi	Metode Pengolahan	Kapasitas Output (Ltr/mnt)	Tahun dibangun	Pengelola
1.	Pulau Untung Jawa	BWRO	12 – 28	2003	Sudin SDA
		SWRO	90	2016	PD. PAM
2.	Pulau Lancang	BWRO	12 – 28	2003	Sudin SDA
		SWRO	90	2019	PD.PAM
3.	Pulau Pari	BWRO	12 - 25	2003	Sudin SDA
4.	Pulau Tidung	BWRO	10 - 28	2003	Sudin SDA
		SWRO	180	2019	PD. PAM
5.	Pulau Payung	SWRO	15	2018	PD. PAM
6.	Pulau Pramuka	BWRO	15 - 28	2003	Sudin SDA
		SWRO	90	2018	PD.PAM
7.	Pulau Panggang	BWRO	15 – 26	2003	Sudin SDA
		SWRO	180	2018	PD.PAM
8.	Pulau Karya	SWRO - BWRO	20 - 25	2016	Sudin SDA
9.	Pulau Harapan	BWRO	12 – 25	2003	Sudin SDA
10.	Pulau Kelapa	BWRO	14 - 24	2003	Sudin SDA
		SWRO	300	2019	PD. PAM
11.	Pulau Kelapa Dua	BWRO	10 – 20	2003	Sudin SDA
		SWRO	15	2018	PD. PAM
12.	Pulau Sabira	BWRO	8 – 20	2018	Sudin SDA
		SWRO	90	2021	Dinas SDA

Sumber : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.

Menyikapi data dan penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UKPD terkait perlu menyusun kegiatan strategis dalam peningkatan penyediaan air bersih layak konsumsi dan peningkatan penyediaan listrik di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pemerataan pembangunan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Administrasi dengan 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

2.5.1.5. Kondisi Transportasi dan Dermaga

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai salah satu dari 10 Destinasi Utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) harus mampu menjawab beberapa tantangan pencapaian indikator-indikator strategis pengembangan KSPN. Salah satunya adalah melalui peningkatan aksesibilitas (kemudahan akses transportasi dan dermaga) bagi wisatawan maupun bagi masyarakat.

Ketersediaan jumlah transportasi umum milik swasta dari dan menuju ke Kepulauan Seribu beberapa tahun terakhir ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Akses kapal menuju Kepulauan Seribu dapat ditempuh melalui Dermaga Marina Ancol, Muara Angke/Kaliadem, Kamal Muara, Tanjung Pasir, Sunda Kelapa, Kronjo dan Rawa Saban. Dilihat dari segi estetika fisik bangunan dermaga-dermaga tersebut mayoritas besar dinilai masih kurang tertata rapi sebagaimana konsep pelabuhan kawasan pariwisata. Menyikapi hal tersebut, perlu koordinasi lintas SKPD/UKPD untuk menyusun upaya strategis dalam peningkatan segi fisik dermaga yang representatif dan inovatif serta menyusun jadwal pelayaran kapal.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kajian *Detail Engineering Design* (DED) Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk Dermaga yang ada di Pulau Sabira, Pulau Kelapa dan Pulau Pramuka. Sedangkan tahun 2021 telah dilaksanakan kajian *Detail Engineering Design* (DED) Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk Dermaga yang ada di Pulau Payung, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa. Akses pelayaran lintas pulau pemukiman melalui konsep Trans Pulau Seribu perlu diupayakan oleh Pemerintah mengingat masyarakat di sejumlah pulau pemukiman terkendala akses pelayaran kapal antar pulau pemukiman sehingga tidak jarang masyarakat menyewa kapal.

Kondisi Dermaga di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu saat ini terdapat beberapa yang mengalami kerusakan seperti di Pulau Pari dan Pulau Lancang. Selain itu, kolam labuh yang ada di wilayah Kepulauan Seribu juga mengalami pendangkalan. Hal ini membutuhkan penanganan yang tepat dikarenakan kolam labuh yang cukup dalam diperlukan oleh kapal, mengingat kapal merupakan satu-satunya alat transportasi yang digunakan untuk menghubungkan konektivitas antar pulau.

2.5.1.6. Kondisi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

Berdasarkan data Suku Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020, tercatat jumlah rata-rata sampah di Kepulauan Seribu sebanyak ± 1.100 ton/bulan dengan persentase 70% merupakan sampah plastik. Sampah tersebut berasal dari penduduk Kepulauan Seribu, wisatawan Kepulauan Seribu, serta berasal dari 13 muara sungai di wilayah sekitar yang terbawa arus laut menuju kawasan perairan Kepulauan Seribu.

Infrastruktur yang saat ini tersedia dalam pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu antara lain kapal pengangkut sampah, germor, L-Box, Insinerator, pencacah plastik, pembuat biji plastik dan komposter. Akan tetapi, hal ini masih dirasa jauh dari cukup dikarenakan masih banyaknya timbulan sampah yang belum tertangani. Selain itu, penanganan sampah di Kepulauan Seribu masih bersifat konvensional yaitu dengan pengiriman sampah ke Bantar Gebang, belum diterapkannya metode penanganan sampah yang tepat dari hulu ke hilir, serta kurangnya kolaborasi dari para pihak untuk turut serta mengelola sampah di Kepulauan Seribu.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi sampah di Kepulauan Seribu tergolong cukup memprihatinkan. Maka, SKPD/UKPD terkait perlu melakukan koordinasi dan menyusun upaya strategis dalam peningkatan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di Kepulauan Seribu. Alternatif yang mungkin dapat dilakukan diantaranya :

1. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) di tiap-tiap pulau;
2. Pengembangan 2 Dermaga Transit pengelolaan sampah dengan konsep **Waste to Energy** dan Pusat Eduwisata Pengelolaan Sampah;
3. Mekanisasi pengelolaan sampah seperti penggunaan alat berat;
4. Pengadaan **Kapal Conveyor** penangkap sampah dan penanganan *oil spill* di perairan Kepulauan Seribu; dan lain-lain.

Untuk saat ini, yang telah dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Pengurangan sampah langsung dari sumbernya menargetkan partisipasi dari masyarakat. Pemilahan dan pengangkutan sampah oleh 26 Bidang Pengelolaan Sampah di tingkat RW yang berhasil mengurangi sampah sampai 17%.

2.5.1.7. Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan data dari Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik tahun 2017, Fasilitas jaringan komunikasi berupa *BTS (Base Transceiver Station)* telah terpasang di sejumlah pulau pemukiman diantaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua dan Pulau Harapan. Pulau yang belum terpasang jaringan komunikasi dan informasi *BTS* antara lain Pulau Sabira dan Pulau Payung.

Pada tahun 2020-2021, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan Jaringan Telekomunikasi (*WiFi*) pada 114 titik jaringan yang tersebar di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan rincian 85 titik layanan kantor pemerintah dan sekolah serta 29 titik di Pulau Kelapa, Harapan, Panggang, Untung Jawa dan Lancang. Selain itu, di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga telah tersedia jaringan Telekomunikasi (*WiFi*) dari hasil *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada 3 titik jaringan yang tersebar di beberapa pulau penduduk.

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kepulauan Seribu perlu melakukan percepatan dan pemerataan jaringan komunikasi khususnya internet di seluruh wilayah Kepulauan Seribu, serta perlu melakukan optimalisasi kualitas jaringan komunikasi *BTS* yang telah terpasang.

2.5.1.8. Kondisi Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan di Kepulauan Seribu cukup terpenuhi namun perlu upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan pangan secara menyeluruh yang menjangkau pulau-pulau pemukiman maupun pulau-pulau resort. Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Pulau Tematik Pertanian dan Perkebunan (Pulau Tidung Kecil/Agro Wisata);
- b. Pulau Tematik Pasar Tradisional (Pulau Untung Jawa dan Pulau Tidung);
- c. Pusat Cenderamata Kepulauan Seribu;
- d. Pulau Sentra Industri Pengolahan Ikan, Rumput Laut, Rajungan dan Garam (Pulau Sebira, Pulau Lancang dan Pulau Tidung);
- e. Penyimpanan Ikan Segar (*Cold Storage*) di seluruh Pulau Pemukiman;
- f. Dibangunnya JakGrosir di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (saat ini JakGrosir sudah ada di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yakni di Pulau Tidung Kecil).



2.5.1.9. Kondisi Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menghadapi tantangan kompleks dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Sebagai wilayah kepulauan yang tersebar dan terisolasi secara geografis, akses terhadap layanan kesehatan seringkali menjadi persoalan yang mendasar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil di luar pusat administrasi seperti Pulau Pramuka atau Pulau Tidung.

Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di wilayah ini masih tergolong terbatas. Meskipun sudah terdapat dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, distribusinya belum merata di seluruh wilayah. Beberapa pulau hanya dilayani oleh tenaga kesehatan secara berkala, sementara untuk layanan spesialis, masyarakat harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta Utara. Hal ini menimbulkan ketergantungan tinggi terhadap sistem transportasi laut, yang pada saat cuaca buruk sering kali tidak dapat beroperasi, sehingga memperlambat penanganan medis dan meningkatkan risiko kegagalan pelayanan, terutama dalam kasus gawat darurat. Adapun rincian tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Data Tenaga Kesehatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024

Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
Kepulauan Seribu Selatan	19	3	33	20	6	1	3	4	4
Kepulauan Seribu Utara	15	1	33	23	6	4	2	3	4
Kabupaten Kepulauan Seribu	34	4	66	43	12	5	5	7	8

Sumber: Kabupaten Kepulauan Seribu Dalam Angka, 2025

Dari sisi sarana, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hanya memiliki satu rumah sakit umum yang berada di wilayah utara. Tidak terdapat rumah sakit khusus atau rumah sakit bersalin. Pelayanan kesehatan primer diselenggarakan oleh sejumlah puskesmas rawat inap dan posyandu, namun belum cukup untuk melayani seluruh populasi dengan optimal. Di pulau-pulau kecil, keberadaan layanan kesehatan sangat tergantung pada mobilitas petugas dan keterbatasan fasilitas medis. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat harus menempuh perjalanan antar pulau untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih memadai, dengan risiko biaya, waktu, dan keselamatan. Adapun rincian sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.14. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024

Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Puskesmas Rawat Inap		Puskesmas Non Rawat Inap		Klinik Pratama		Posyandu	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Kepulauan Seribu Selatan	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	17	17
Kepulauan Seribu Utara	1	1	-	-	3	3	-	-	-	-	20	20
Kabupaten Kepulauan Seribu	1	1	0	0	7	7	0	0	0	0	37	37

Sumber: Kabupaten Kepulauan Seribu Dalam Angka, 2025

2.5.2. Peluang

2.5.2.1. Potensi Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tercatat sebanyak 29.843 jiwa. Struktur demografi wilayah ini menunjukkan ciri khas yang positif, yaitu angka ketergantungan sebesar 46,44%. Angka ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 orang usia produktif (15–64 tahun), hanya terdapat sekitar 46 orang yang tergolong usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Dengan kata lain, lebih dari separuh penduduk Kepulauan Seribu berada dalam kelompok usia kerja atau produktif, yang merupakan indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah.

Kondisi ini membuka peluang strategis bagi pengembangan sektor-sektor padat karya dan ekonomi berbasis masyarakat, seperti sektor jasa, pariwisata bahari, perikanan tangkap dan budidaya, serta industri kreatif berbasis lokal. Ketersediaan sumber daya manusia yang relatif tinggi dalam usia produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, terutama jika didukung dengan program pelatihan vokasional, kewirausahaan, dan digitalisasi.

Sebagai wilayah kepulauan dengan potensi wisata alam yang tinggi, keberadaan penduduk usia produktif juga menjadi kekuatan dalam pengembangan layanan wisata lokal, seperti pemandu wisata, *homestay* berbasis masyarakat, pengolahan hasil laut, hingga pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar wilayah.

Namun demikian, agar bonus demografi ini benar-benar berdampak positif, diperlukan intervensi kebijakan yang tepat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, fasilitasi akses permodalan UMKM, serta penyediaan infrastruktur pendukung sektor ekonomi produktif. Jika dikelola secara optimal, struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif dapat menjadi penggerak utama transformasi ekonomi lokal di Kabupaten Kepulauan Seribu.

2.5.2.2. Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Lebih lanjut, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah juga menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Aturan tersebut mengatur berbagai kewenangan yang dilimpahkan dan atau tetap berada di tingkat Provinsi. Dalam hal kewenangan yang dilimpahkan kepada Kabupaten adalah kewenangan pelayanan publik yang bersifat koordinasi, pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pembinaan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

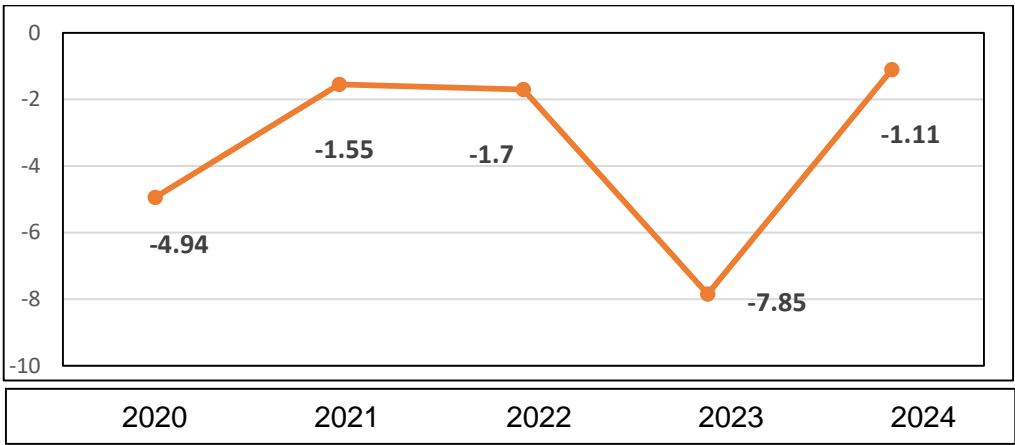
Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi bidang sosial, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang fungsi penyelenggaraan pencahayaan dan pertamanan dan pemakaman.

Selain itu, dengan ditunjuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai salah satu dari 10 Destinasi Utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, diharapkan dapat membuka peluang dalam pengembangan Kepulauan Seribu kedepannya.

2.5.2.3. Potensi Perekonomian

Sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat memberikan gambaran mengenai dinamika sekaligus potensi perekonomian yang dimiliki wilayah. Data pertumbuhan PDRB Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022-2024 ditampilkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.3 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Kepulauan Seribu Dalam Angka Tahun 2025

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Seribu selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dan cenderung masih berada pada angka negatif. Pada tahun 2020, PDRB mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -4,98% akibat pandemi COVID-19 yang menekan hampir seluruh sektor, terutama transportasi, akomodasi, dan pariwisata sebagai sektor utama.

Memasuki tahun 2021, terjadi perbaikan dengan kontraksi yang mengecil menjadi -1,55%. Perbaikan ini ditopang oleh mulai pulihnya sektor perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Namun, pada tahun 2022, meskipun beberapa sektor seperti transportasi, perdagangan, dan jasa kesehatan mencatat pertumbuhan positif, secara agregat PDRB kembali menunjukkan kontraksi sebesar -1,70%. Hal ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi belum merata di seluruh sektor, terutama pada administrasi pemerintahan dan pendidikan yang tumbuh rendah.

Kondisi lebih berat terjadi pada tahun 2023 ketika PDRB mengalami kontraksi paling dalam dalam lima tahun terakhir, yakni sebesar -7,85%. Penurunan tajam ini dipengaruhi oleh anjloknya sektor pertanian serta transportasi dan pergudangan yang kembali melemah, meskipun beberapa sektor seperti keuangan, komunikasi, dan konstruksi masih tumbuh positif.



Pada tahun 2024, tren perbaikan kembali terlihat dengan kontraksi yang mengecil menjadi -1,11%. Perbaikan ini ditopang oleh lonjakan pertanian, peningkatan transportasi dan perdagangan, serta pertumbuhan sektor jasa keuangan. Meski demikian, PDRB masih belum berhasil masuk ke zona positif, yang berarti daya dorong perekonomian daerah perlu diperkuat lebih lanjut melalui strategi pembangunan yang berkelanjutan dan diversifikasi sektor unggulan.

2.5.2.4. Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bermakna bahwa terdapat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk merespon dan berkontribusi terhadap hal-hal terkait pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam konteks partisipasi pemilihan umum, data KPU Tahun 2024 bahwa Indeks Partisipasi Pemilu di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu 57,44 dengan kategori *involvement*. Berdasarkan partisipasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mencapai 70 persen, tertinggi di Jakarta, bahkan nasional.

Kemudian dalam konteks partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), jumlah usulan dalam Musrenbang menunjukkan peningkatan. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kepedulian masyarakat dalam berkontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Adanya partisipasi masyarakat ini menjadi peluang sebagai modal sosial dalam mewujudkan ***Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya***. Partisipasi masyarakat juga terlihat dari berbagai sektor kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Seribu sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15 Sektor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026

No	Sektor	Jenis
1.	Industri / Ekonomi	Perdagangan, IKM (makanan, kerajinan dan pembuatan kapal), Pengelolaan hasil laut, Daur Ulang
2.	Pariwisata	Usaha Penginapan / <i>home stay</i> , Biro Perjalanan/ Travel, Transportasi, Catering, Pokdarwis / Pemandu Wisata, Penyewaan Peralatan Selam/ <i>snorkeling</i>
3.	Pendidikan	Bimtek Bagi Pelaku Usaha, Diklat Nahkoda, Diklat Ketrampilan dan Keahlian
4.	Seni dan Kebudayaan	Hadrah, Qasidah, Marawis, Tarian (Khas dari masing – masing pulau pemukiman)

Sumber : Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026

2.5.2.5. Potensi Pariwisata

Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017, dapat diketahui bahwa Kepulauan Seribu termasuk wilayah yang menjadi lokasi pembangunan destinasi pariwisata prioritas.

Dalam rencana tersebut Kepulauan Seribu dan sekitarnya diarahkan sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan bahari dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sinergitas pengelolaan sumber daya terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan *Stakeholders* terkait. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ini antara lain:

- a. Aspek pengelolaan (pembangunan masyarakat dan ekonomi);
- b. Aspek konservasi (perlindungan dari kerusakan);
- c. Aspek *biodiversity* (menjamin keanekaragaman biologis) ekosistem wilayah pesisir.

Hal ini harus menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Setidaknya terdapat beberapa pertimbangan yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu antara lain:

- a. Perluasan zonasi pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu;
- b. Kemudahan perizinan usaha;
- c. Standarisasi material pembangunan yang dipersyaratkan;
- d. Daya Tarik investor;
- e. Potensi pendapatan Pusat/Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja.

Komitmen menjaga keseimbangan ekosistem sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian, keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem di wilayah Kepulauan Seribu. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga diharapkan berlangsung secara adil dan merata untuk mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kebutuhan/permasalahan dalam rangka meningkatkan pariwisata yakni:



1. Kesiapan SDM kepariwisataan untuk menyambut kedatangan para wisatawan;
2. Belum adanya lokasi binaan/lokasi sementara atau outlet untuk memasarkan produk;
3. Perlunya peningkatan keterampilan dalam mengolah dan melakukan diversifikasi produk olahan hasil laut;
4. Perlunya dorongan kreativitas masyarakat dalam menciptakan jenis usaha baru dan penguatan kapasitas SDM pelaku wisata;
5. Diversifikasi mata pencaharian (Mendorong nelayan agar beralih dari konsep nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya).

Lebih lanjut, perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dalam kurun waktu 2017-2018 terjadi peningkatan dan kemudian menurun di tahun 2019. Jumlah wisatawan domestik pun juga mengalami penurunan dari semula sebanyak 850.629 orang pada tahun 2017 menjadi sebesar 650.332 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi wabah Pandemi Covid- 19 yang mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah guna memutus rantai penyebaran Pandemi Covid-19. Di tahun tersebut jumlah wisatawan yang datang hanya berjumlah 237.421 orang.

Di tahun 2021 pariwisata di Kepulauan Seribu juga masih belum pulih sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan masih terjadi penurunan yakni dengan total wisatawan yang berkunjung sebesar 174.430 orang dan terjadi penurunan di tahun 2022 sebesar 150.153 wisatawan. Namun, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan di tahun 2023 sebesar 396.626 wisatawan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.16 berikut:

Tabel 2.16 Kunjungan Wisatawan Kepulauan Seribu Tahun 2017-2024

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	Jumlah Wisatawan Domestik (orang)	Jumlah Total (orang)
2017	28,731	850,629	879,360
2018	28,963	771,427	800,390
2019	25,418	624,914	650,332
2020	3,740	233,681	237,421
2021	3,725	170,705	174,430
2022	3.728	146.425	150.153
2023	8.918	203.383	396.626

Sumber : Kabupaten Kepulauan Seribu Dalam Angka tahun 2023; Kabupaten Kepulauan Seribu Dalam Angka tahun 2024



Arah pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata internasional dan nasional, serta arah penataan wilayah yang tercantum dalam RPJMD menjadi peluang bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk dapat meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Terdapat beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut :

2.6.1.1. Permasalahan Makro Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berbeda dengan wilayah kabupaten lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Bupati beserta perangkatnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam Tabel 2.17 di bawah ini.

Tabel 2.17. Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan dan Hasil Pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum merata	Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat belum optimal	Pelayanan pada Sekretariat Kabupaten, Unit Kerja Teknis dan Kecamatan belum optimal
		Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, lingkungan, dan pariwisata belum optimal



Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
	Rantai birokrasi yang panjang sehingga koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah belum efektif	Masih adanya ego sektoral masing-masing unit kerja dan perangkat daerah
		Kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur belum optimal
	Meningkatnya kualitas Layanan Pelimpahan Kewenangan	Pelimpahan kewenangan hanya bersifat fasilitatif dan koordinatif
		Kurangnya kewenangan kabupaten administrasi terhadap beberapa pelayanan termasuk perzinan mengakibatkan terhambatnya akaselerasi pembangunan
		Banyaknya Pemilik Kewenangan Dalam Pengelolaan Kepulauan Seribu (KLHK, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemen KKP).

Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

2.6.1.2. Permasalahan Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dalam konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diketahui bahwa penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, sehingga solusi-solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Pada bagian ini dijabarkan permasalahan-permasalahan berdasarkan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lebih lanjut dijabarkan pada Tabel 2.18 di bawah ini.

Tabel 2.18. Identifikasi Permasalahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
1	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas serta fasilitas pendukungnya	Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya
2	Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKDM melalui pembinaan, dialog, dst.



No	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
3	Masih perlunya optimalisasi pemantauan, pengendalian dan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	Optimalisasi pemantauan, pengendalian dan penanganan gangguan tantrib
4	Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum	Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum
5	Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan	Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dan kelurahan;
6	Belum Optimalnya pelayanan terkait kesehatan, Pelaksanaan Kabupaten sehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, Pemberdayaan perempuan dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kabupaten	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kota Sehat di kabupaten, Kota Layak Anak, Pelaksanaan BOP dan BOS; 2. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan;Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 3. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ)
Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian		
1	Masih perlu peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum dan belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia	1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kabupaten; 2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kabupaten; 3. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia
2	Belum optimalnya disiplin aparat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi
3	Masih belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan di Kabupaten administrasi, kelurahan dan kecamatan	Penyusunan, Pembinaan serta Pendampingan SOP di Kantor Sekretariat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan
Bagian Umum dan Protokol		
1	Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi
2	Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan kantor dan indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pencapaian indeks kepuasan pelayanan kantor dan indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional



No	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
Bagian Keuangan		
1	Masih perlu dioptimalkannya kualitas pelayanan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu; 3. Peningkatan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
Bagian Ekonomi dan Pembangunan		
1	Masih perlu dioptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sarpras koperasi, UMKM dan perdagangan.	Dilakukan pembangunan, rehab ringan, rehab sedang, rehab berat dan perencanaan rehab sarpras koperasi, UMKM dan perdagangan;
2	Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yang menjadi mitra Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kab. Adm. Kep. Seribu 2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan tingkat Kab. Adm. Kep. Seribu 3. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan Kab. Adm. Kep. Seribu 4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi Kab. Adm. Kep. Seribu 5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kab. Adm. Kep. Seribu
Unit Kerja Teknis 1		
1	Belum Optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan 2. Mengoptimalkan penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas terkait pelayanan sosial 3. Mengoptimalkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.



No	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
2	Belum optimalnya prasarana dan sarana keolahragaan serta penyelenggaraan kegiatan kepemudaan tingkat Kabupaten Administrasi;	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan penyediaan prasarana dan sarana olahraga di wilayah Kabupaten Administrasi;2. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan kepaskibrakaan dan kepemudaan di wilayah Kabupaten Administrasi serta partisipasi event tingkat Provinsi
3	Belum optimalnya penyelenggaraan keperpustakaan masyarakat di tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, serta Perpustakaan Masyarakat2. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kepulauan Seribu3. Mengoptimalkan pelaksanaan event Keperpustakaan tingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi
Unit Kerja Teknis 2		
1	Masih belum optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan pemakaman.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau2. Mengoptimalkan Pembangunan maupun Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2	Masih belum optimalnya Sarana Pendukung Pencahayaan Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota2. Mengoptimalkan Penyediaan Armatur dan Komponen Pencahayaan Kota3. Mengoptimalkan Penyediaan Ornamen Pencahayaan Kota yang mendukung KSPN
3	Masih belum optimalnya Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kepulauan Seribu2. Mengoptimalkan Pengecekan Keamanan Struktur Jalan Secara Berkala



No	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
Kecamatan		
1	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan dan kebudayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban,	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan;2. Mengoptimalkan kinerja FKDM;3. Mengoptimalkan pelayanan ketentraman dan ketertiban;4. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan dan kebudayaan tingkat kecamatan.
Kelurahan		
1	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, PSN) dan peningkatan kinerja PPSU	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT,RW, LMK;2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan;4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan;5. Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

Sumber: Hasil FGD Unit Kerja Kab.Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.

2.6.2. Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

2.6.2.1. Visi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2025 – 2029 adalah: **JAKARTA KOTA GLOBAL DAN PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, DAN MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGANYA.**

JAKARTA KOTA GLOBAL: merupakan aspirasi jangka panjang Jakarta untuk menyesejajarkan dirinya dengan kota-kota besar lain di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dimana Jakarta dapat menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia yang kompetitif dan mampu menarik sumber daya seperti manusia, modal, barang, gagasan, serta informasi yang terbaik.



PUSAT PEREKONOMIAN: merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan motor penggerak perekonomian nasional. Kawasan perkotaan menyimpan potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan negara. *Gross Domestic Product (GDP)* per kapita tumbuh seiring dengan bertambahnya persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan dan *high-income countries* di dunia memiliki persentase penduduk perkotaan yang paling tinggi. Saat ini kawasan aglomerasi Jabodetabekjur merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Nasional.

BERDAYA SAING: dalam konstelasi kota global daya saing merupakan elemen penting karena tidak hanya Jakarta harus lebih baik dari dirinya di masa lampau, tetapi juga secara paralel berkompetisi dengan kota-kota lain yang terus memperbaiki kualitasnya. Kota yang memiliki daya saing tinggi mampu berkembang lebih pesat karena mampu menarik dan mempertahankan investasi, tenaga kerja, dan bisnis dibandingkan dengan kota lain.

BERKELANJUTAN: makna kota berkelanjutan adalah kota yang dirancang dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan penduduknya saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kota tetap layak huni dalam jangka panjang.

MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGA: memiliki makna bahwa hakikatnya seluruh proses pembangunan yang berlangsung di Jakarta adalah untuk mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan di sini dapat diartikan luas dan tidak hanya terkait dimensi ekonomi, namun merupakan konsep *well-being* yang holistik. Setiap warga Jakarta memiliki level kebutuhan yang berbeda-beda, untuk sebagian golongan yang mampu, Pemerintah dapat tetap memberikan nilai 'sejahtera' seperti kualitas udara yang lebih baik dan fasilitas publik yang nyaman. Di sisi lain bagi golongan yang rentan, Pemerintah dapat hadir menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan mengurangi beban hidup sehari-hari. Sehingga Jakarta dapat mewujudkan secara penuh konsep kota untuk semua atau *cities for all*.



2.6.2.2. Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Misi disusun dalam rangka merencanakan langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam mewujudkan visi yang telah dideskripsikan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan menjadi alat navigasi arah kebijakan yang mempengaruhi rekomendasi kerja berupa program prioritas dalam proses pencapaian kinerja yaitu tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Jakarta pada tahun 2030, lima misi pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
- 2) Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata
- 3) Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal
- 4) Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan
- 5) Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka dilaksanakan penyelarasan antara Sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Misi RPJMD, Misi RPJPD, serta Asta Cita dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 2.19. Penyelarasan Sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan RPJMD, RPJPD dan RPJMN

RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	RENSTRA 2025-2029
Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Visi: Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Visi: Jakarta Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya	Tujuan: Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kabupaten Kepulauan Seribu
Misi	Misi	Misi	Sasaran
<ul style="list-style-type: none">• Prioritas Nasional 1• Prioritas Nasional 1	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera	
<ul style="list-style-type: none">• Prioritas Nasional 2• Prioritas Nasional 5	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan	

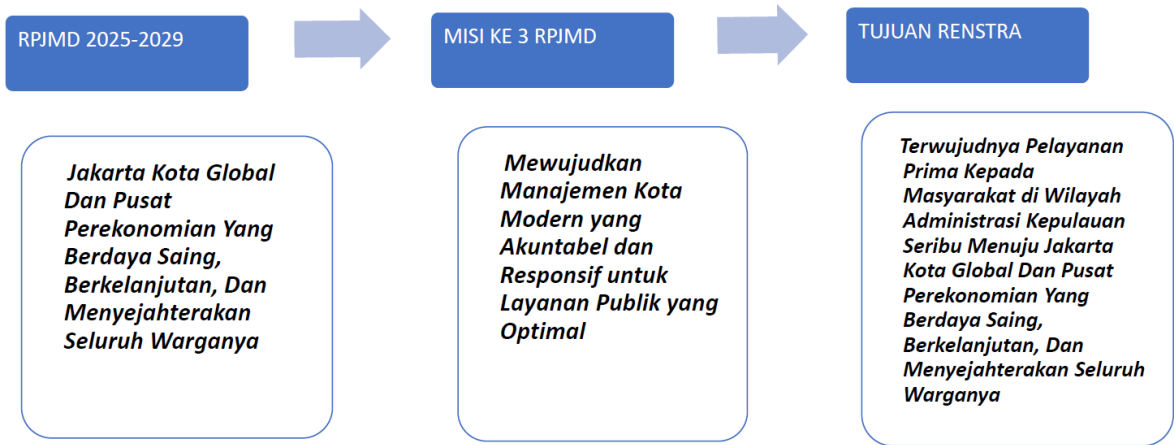


RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	RENSTRA 2025-2029
<ul style="list-style-type: none">• Prioritas Nasional 6	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan.	Akses Sumber Daya yang Merata	
<ul style="list-style-type: none">• Prioritas Nasional 3• Prioritas Nasional 7	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas• Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat• Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal• Meningkatnya kualitas Layanan Pelimpahan Kewenangan
<ul style="list-style-type: none">• Prioritas Nasional 3• Prioritas Nasional 8	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan• Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan dan Berkelanjutan	
	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Adapun keterkaitan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.

Gambar 2.4. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

2.6.3. Telaahan Terhadap Isu-isu Global, Nasional, Regional dan Lokal

2.6.3.1. Isu Global

Isu global menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan. Dinamika yang berkembang secara global perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Adapun beberapa isu global yang sedang berkembang saat ini antara lain:

a) Geopolitik dan Geoekonomi

Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan–Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

b) Disrupsi Teknologi

Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi yang berpotensi tumpang tindih, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

c) Perubahan Iklim

Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang diproyeksikan dapat mencapai 3,5°C pada skenario *intermediate*, jika tidak terjadi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang

signifikan pada periode 2020–2050. Dampak perubahan iklim ini kemudian akan memicu berbagai persoalan serius, seperti peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, badai), kenaikan permukaan air laut, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Terlebih lagi, laporan World Meteorological Organization (WMO) dalam *State of The Climate 2022* menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 sebagai tahun terpanas, sementara periode 2015–2022 merupakan delapan tahun terpanas dalam catatan WMO. Kondisi ini menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu isu strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.

d) Demografi Global

Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

e) Urbanisasi Internasional

Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan

sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

f) Hasil Pertemuan G20 Indonesia

KTT G20 Bali berlangsung pada 15-16 November 2022 di kawasan Nusa Dua, Bali. Para pemimpin dari negara anggota G20, sejumlah lembaga internasional, dan negara-negara undangan berkumpul untuk membahas sejumlah isu krusial di tingkat global. Pertemuan itu pun berakhir dengan tercapainya *G20 Bali Leader's Declaration*, yakni kesepakatan para pemimpin G20 terkait berbagai aspek, mulai dari ekonomi, geopolitik, ketersediaan pangan, dan lain-lain. *Leaders' Declaration* itu berisi 52 paragraf, yang merupakan rangkuman dari 24 dokumen komunike, rekomendasi, serta masukan hasil pembahasan kelompok kerja dan pertemuan tingkat menteri. Secara keseluruhan, terdapat 437 pertemuan di berbagai tingkat sebelum tercapainya kesepakatan saat KTT G20.

Di dalam *G20 Bali Leaders' Declaration* atau Deklarasi Bali 2022, tercantum 52 paragraf sebagai hasil KTT G20 Bali. Poin-poin itu membahas permasalahan mengenai:

1. Ketegangan global;
2. Isu krisis pangan;
3. Perubahan iklim;
4. Kesehatan global;
5. Transformasi digital.

g) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam isu-isu strategis internasional adalah berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD dan Renstra.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.6.3.2. Isu Nasional

Isu nasional juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan. Dinamika yang berkembang saat ini di Indonesia perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Adapun beberapa isu nasional yang sedang berkembang saat ini antara lain :

a) Perpindahan Ibu Kota Negara

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan sangat besar dari total keselarasan belanja, keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Jakarta sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Jakarta saat ini.

b) Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi Covid-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan



rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi: (i) Peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) Transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) Pengembangan *smart grid* termasuk jaringan interkoneksi dalam (*island grid*) dan antar pulau (*national grid*) serta sistem terisolasi (*isolated grid*); (iv) Pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*); (v) Pengembangan transportasi ramah lingkungan; (vi) Penerapan ekonomi sirkular; (vii) Pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk produk turunannya secara berkelanjutan; (viii) Perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan *green financing* dan (iv) Penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

Paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mempunyai lingkungan perairan kelautan, maka indikator ekonomi biru belum bisa diterapkan.

Khusus mengenai penerapan Ekonomi Sirkular di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pendekatan Ekonomi Sirkular memberikan dasar etika dan arahan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi yang relevan dan unggulan dengan mengacu pada indikator yang jelas. Hadirnya keterhubungan antarpelaku produksi-konsumsi menjadi pangkal dari perumusan pendekatan ekonomi sirkular. Berdasarkan proposisi tersebut, maka pembangunan di Kepulauan Seribu dapat dilakukan dengan menyasar isu-isu spesifik kedaerahan dalam konteks pengembangan sektor ekonomi unggulan seperti sektor kelautan dan pariwisata.

c) Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan, serta masih rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Diperlukan kesinambungan pembangunan dalam menjaga konsistensi satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu terendah di Asia.

d) Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta ketahanan bencana

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun pertahun, adapun jumlah kematian akibat bencana hidrometeorologi selama

10 (sepuluh) tahun terakhir mencapai 1.183 orang. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih lagi hingga tahun 2040, tinggi gelombang ekstrim dapat mengalami peningkatan 1-1,5 m yang menyebabkan potensi tinggi gelombang berdampak pada keselamatan pelayaran. Rerata kenaikan tinggi muka laut pun pada periode 2006-2040 mencapai 0,9 cm/tahun yang akan meningkatkan kerentanan pesisir seperti penggenangan pesisir.

Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp544 triliun selama periode Tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam Penurunan Emisi Global. Pada tahun 2020 Indonesia berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 1.05 Gr Co2 atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GrCO₂e GrCO₂e (*Our World in Data based on the Global Carbon Project 2022*). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, transportasi, serta penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak berubah.

e) **Bonus demografi Indonesia**

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.

Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai

PISA (*Programme for International Student Assessment*) siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara *OECD* (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan.

Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. Penduduk usia produktif yang dominan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*) di dunia.

Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

f) Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lingkungan dan isu transformasi pelayanan publik ini mencakup profesionalitas ASN, pelayanan publik, kelembagaan, dan akuntabilitas.

g) Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

2.6.3.3. Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta)

a) Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang

Fenomena Urban Sprawl di mana perkembangan wilayah perkotaan meluas ke area pinggiran atau pedesaan dengan pola pembangunan yang cenderung horizontal dan tidak terkendali. Pola ini seringkali ditandai dengan kepadatan penduduk yang rendah, segregasi fungsi lahan (seperti pemisahan antara perumahan, komersial, dan industri), serta ketergantungan yang tinggi pada kendaraan pribadi. Dalam banyak kasus, *urban sprawl* terjadi karena kombinasi pertumbuhan populasi, preferensi gaya hidup untuk hunian di area yang lebih luas dan tenang, serta lemahnya perencanaan tata ruang. Fenomena ini menciptakan kota-kota yang tersebar luas dengan jaringan infrastruktur yang lebih mahal dan kurang efisien.

Di kasus Kawasan Aglomerasi Jakarta, terjadi peningkatan fenomena *urban sprawl* 19% dalam 20 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan terjadi penjarangan spasial kawasan terbangun menuju arah timur, barat, dan selatan Jakarta (*Project Management Office* Tim Koordinasi Penataan Ruang PMO TKPR, 2022). Fenomena ini juga sering diperburuk oleh peraturan tata ruang yang tidak mendukung penggunaan lahan campuran di pusat kota, sehingga mendorong masyarakat untuk bermigrasi ke area yang lebih terjangkau. Akibatnya, pusat kota dapat kehilangan daya tariknya, sementara kawasan pinggiran menjadi padat dengan pembangunan dan memperbesar jarak perjalanan harian masyarakat.

b) Pergerakan Orang dan Barang di Kawasan Aglomerasi

Berdasarkan Statistik Komuter Jabodetabek (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023) bahwa pergerakan orang dalam Kawasan Aglomerasi Jakarta sangat signifikan, baik dari luar Jakarta-Jakarta (Eksternal-Internal), antar wilayah di Jakarta-Jakarta (Internal-Internal), maupun dari Jakarta ke luar Wilayah (Internal-Eksternal).

Pergerakan yang tinggi dari kawasan di luar Jakarta menuju pusat kota menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat luar wilayah Jakarta pada pusat kegiatan ekonomi di Jakarta. Sedangkan pergerakan luar Jakarta menuju Jakarta berdasarkan asal daerah didominasi oleh Kota Depok yang memiliki jumlah komuter tertinggi, yaitu sekitar 371.488 orang per *trip* per harinya, dan dari Kota Bogor menuju Jakarta dengan pergerakan paling sedikit sebanyak sekitar 33.926 orang per *trip* per harinya.

Data pergerakan dari luar Jakarta ke Jakarta ini menunjukkan banyak penduduk yang memilih menetap di luar Jakarta dan bekerja di pusat kota. Selain kondisi pergerakan orang, kondisi pergerakan barang di Kawasan Aglomerasi Jakarta juga menjadi isu strategis.

Pergerakan barang dari Jakarta ke Jakarta menjadi rute dengan pergerakan terbesar, yaitu mencapai sekitar 496.414.433 ton/tahun yang mengindikasikan masifnya pergerakan barang internal dan besarnya aktivitas logistik di Jakarta. Banyaknya kondisi pergerakan orang juga dapat menjadi salah satu sebab tingginya pergerakan barang setiap harinya. Estimasi kebutuhan perjalanan kendaraan barang diperkirakan menghasilkan jumlah pergerakan truk sekitar 500-700 ribu pergerakan kendaraan barang per hari (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, 2023). Dikarenakan tingginya pergerakan barang, tidak jarang ditemukan beberapa titik kemacetan menghambat distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya perencanaan jangka panjang dan komprehensif untuk mengantisipasi pertumbuhan urbanisasi yang cepat serta memastikan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan di Kawasan Aglomerasi Jakarta.

c) Ketahanan dan Transisi Energi

Sumber energi listrik di Kawasan Aglomerasi Jakarta secara dominan berasal dari pembangkit berbasis energi fosil, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Untuk dapat memproduksi listrik dalam jumlah yang besar, PLTU menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi. Sedangkan, PLTGU menghasilkan emisi yang lebih rendah karena menggunakan gas alam sebagai bahan bakar utama. Sebagai bagian dari sistem transmisi ketenagalistrikan Jawa-Bali, Kawasan Aglomerasi Jakarta sangat bergantung pada sumber energi fosil untuk menjaga kestabilan pasokan listrik di sektor yang sedang berkembang pesat, seperti perumahan, komersial, dan industri. Hal ini menjadikan PLTU dan PLTGU sebagai komponen utama dalam struktur bauran energi listrik Jabodetabek, meskipun terus dihadapkan pada tantangan keberlanjutan terkait emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan terhadap kebutuhan listrik di Kawasan Aglomerasi Jakarta pada tahun 2030, total kebutuhan listrik mencapai sekitar 193.775 GWh atau meningkat 99% dari tahun 2020 (Dokumen Teknokratik RIPKA

2025). Jumlah total kebutuhan listrik tersebut dapat terjadi apabila distribusi pola ruang pada tahun 2030 optimal dan sesuai dengan rencana pola ruang. Kebutuhan listrik untuk rumah tangga masih menjadi yang paling tinggi, yaitu sebesar 85.356 GWh (Dokumen Teknokratik RIPKA 2025). Hal tersebut dikarenakan luasan dari peruntukan pola ruang sebagai kawasan permukiman, yaitu mencapai 302.308 hektar.

Berdasarkan dokumen teknokratik RIPKA Jakarta 2025, terdapat program transisi energi yang merupakan bagian dari strategi nasional Indonesia untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mengingat wilayah ini adalah pusat ekonomi dan memiliki tingkat konsumsi energi yang tinggi, pemerintah telah mengimplementasikan beberapa program untuk mendukung transisi energi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), serta penggunaan *Electric Vehicle*.

d) **Potensi Ancaman Banjir**

Kawasan Aglomerasi Jakarta berada pada Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Ciujung-Cidanau-Cidurian, dan Citarum yang secara historis rawan terhadap bencana banjir. Banjir di Kawasan Aglomerasi Jakarta utamanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah, yang dipengaruhi peningkatan intensitas curah hujan akibat perubahan iklim, dan faktor antropogenik, yakni terkait alih fungsi lahan resapan air yang menyebabkan daya resap wilayah berkurang. Isu banjir pada Kawasan Aglomerasi Jakarta memerlukan upaya-upaya dengan pendekatan lintas wilayah administratif dengan penanganan yang meliputi daerah-daerah terkait.

Selain itu, beberapa hal teridentifikasi sebagai akar permasalahan banjir sehingga perlu diperhatikan secara menyeluruh. Akar permasalahan tersebut menjadi landasan dalam menentukan perencanaan, pembangunan, dan program penyelesaian isu banjir di Kawasan Aglomerasi Jakarta. Akar permasalahan banjir yang terjadi di Kawasan Aglomerasi Jakarta antara lain adalah peningkatan debit limpasan permukaan (*surface runoff*), penataan ruang dan bangunan yang kurang tangguh terhadap bencana, rendahnya kapasitas infrastruktur pengendalian banjir, penurunan muka tanah yang semakin drastis, sistem peringatan dini banjir yang belum efektif, dan pengoperasian sistem pengendali banjir yang belum terintegrasi (PMO TKPR, 2022).

e) Penyediaan Air Baku, Air Minum dan Sanitasi

Sebagai penunjang pengembangan Kawasan Aglomerasi Jakarta, diperlukan peningkatan akses air minum aman melalui jaringan perpipaan yang umumnya telah melalui proses pengolahan yang memenuhi standar kesehatan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Suplai air baku ke Kawasan Aglomerasi Jakarta khususnya ke kota inti bersumber dari Waduk Jatiluhur yang termasuk dalam Wilayah Sungai Citarum dengan porsi sebesar 82%.

Kawasan Aglomerasi Jakarta sendiri berada pada Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, yang mana jika merujuk pada data indeks ketersediaan air milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), telah mengalami kelangkaan mutlak atau kelangkaan air absolut dengan indeks ketersediaan air lebih rendah dari 500 m³/tahun/kapita, artinya, permintaan air di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane telah melebihi ketersediaan sumber daya air yang ada. Lebih lanjut, diperkirakan Kawasan Aglomerasi Jakarta yang berada di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane akan mengalami cekaman air sangat tinggi pada tahun 2025 (*The World Bank*, 2021).

Untuk itu, diperlukan pengelolaan air secara terpusat dan terintegrasi menggunakan teknologi yang tepat untuk dapat menyediakan suplai air baku secara regional. Untuk mempercepat akses sanitasi aman, berbagai akar permasalahan harus diatasi, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang layak, kurangnya infrastruktur sanitasi terpusat, dan keterbatasan pendanaan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang memadai. Upaya lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, swasta, dan komunitas sangat penting untuk mencapai target sanitasi aman.

Terkait infrastruktur sanitasi, terdapat proyek strategis nasional dengan sasaran peningkatan akses sanitasi aman, yaitu *Jakarta Sewerage System* (JSS). JSS merupakan proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan air limbah di wilayah Jakarta yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan.

f) Kemacetan Lalu Lintas

Sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, Kawasan Aglomerasi Jakarta memiliki karakteristik masyarakat dengan mobilitas tinggi dan dengan jarak commuting harian yang terhitung jauh, hingga rata-rata 20 km per hari (PMO TKPR, 2022).



Menurut BPS tahun 2023, pergerakan penduduk Jabodetabek sebesar 4,4 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, pergerakan dari dalam Jakarta dan Provinsi Banten dan Jawa Barat menuju Jakarta (tidak termasuk Kepulauan Seribu) mencapai 2,6 juta, dengan 1,5 juta penduduk berasal dari Jabar dan Banten. Selain itu, proporsi pergerakan komuter Jabodetabek berupa 79% kendaraan pribadi dan 19,5% mode share transportasi publik (PMO TKPR, 2022).

Kondisi ini memicu permasalahan kemacetan yang menyebabkan kerugian signifikan dalam ekonomi, polusi, bahkan kesehatan masyarakat. Mengutip PMO TKPR, kerugian ekonomi terjadi akibat dari waktu perjalanan dan semakin tingginya biaya transportasi. Atas dasar perhitungan variabel *Value of Time (delay)* dan *Vehicle Operating Cost*, kerugian ekonomi di Jabodetabek akibat kemacetan mencapai sekitar Rp. 40 Triliun untuk biaya operasional transportasi dan sekitar Rp. 60 Triliun untuk waktu perjalanan setiap tahunnya.

Beberapa penyebab kemacetan di Jabodetabek, antara lain mode *share* angkutan umum yang rendah, sistem transportasi publik belum efektif dan menjangkau seluruh wilayah, *urban sprawl* yang semakin meluas, serta sarana prasarana transportasi yang belum inklusif dan andal. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan transportasi publik merupakan hal fundamental dalam penyelesaian permasalahan kemacetan. Selain itu, kebijakan penataan ruang dan kawasan, serta pengarusutamaan *non-motorized transportation* dan inklusivitas akses transportasi menjadi pendukung yang dapat menjawab tantangan kemacetan Jabodetabek dan kerugian ekonomi yang dihasilkannya.

g) Kerentanan Bencana di Wilayah Pesisir dan Pantai

Sebagai satu-satunya wilayah metropolitan di Indonesia, wilayah pantai utara yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana pesisir seperti banjir rob, *land subsidence*, dan abrasi. Hasil studi *Japan International Cooperation Agency* (JICA) tahun 2021, menunjukkan bahwa terdapat penurunan tanah cukup pesat di utara Jakarta sebesar 0,2 m/tahun. Bencana di wilayah pesisir sering kali menelan banyak korban jiwa dan material. Kerugian ekonomi yang dihadapi masyarakat antara lain meliputi berkurangnya pendapatan ekonomi warga, status kepemilikan tanah dan termasuk biaya pencegahan banjir rob itu sendiri.

Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi bencana di wilayah pesisir Kawasan Aglomerasi Jakarta antara lain seperti, efek perubahan iklim dan pemanasan global, ketidakteraturan kawasan pesisir, alih fungsi lahan, dan eksploitasi lingkungan berlebihan, serta kerentanan sosial ekonomi masyarakat bahari. Oleh karena itu, diperlukan penanganan multi-sektoral dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan sosial-ekonomi masyarakat dalam penataan pantai utara, seperti penguatan kapasitas ketanggapan bencana dan kapasitas masyarakat, penataan ruang dan infrastruktur, serta pemulihan lingkungan dan revitalisasi kawasan pesisir.

h) Pengelolaan dan Kapasitas Penampungan Sampah

Pertumbuhan penduduk secara masif yang terjadi di Kawasan Aglomerasi Jakarta menimbulkan berbagai permasalahan, tak terkecuali permasalahan persampahan. Tingginya jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahunnya kian membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga melebihi kapasitas. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, lebih dari 13 juta ton sampah 40,71% yang dihasilkan setiap tahunnya tidak dapat terkelola di kawasan tersebut. Sampah yang tidak terkelola ini disebabkan oleh TPA yang melebihi kapasitas, kurangnya infrastruktur pendukung, *impermeable surface* yang tidak layak sehingga menyebabkan pencemaran. Selain itu, masih minimnya kegiatan pengolahan dan daur ulang sampah, serta keterbatasan kemampuan layanan persampahan dari pemerintah daerah menjadi salah satu alasan tingginya jumlah sampah yang tidak terkelola.

Pengelolaan sampah di Kawasan Aglomerasi Jakarta yang belum optimal menyebabkan beberapa masalah, diantaranya adalah munculnya TPS liar, fenomena *open dumping* dan *open burning*, hingga mencemari sungai dan badan air. Lebih jauh lagi, apabila dibiarkan akan menyebabkan kerugian dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tingginya jumlah sampah yang dihasilkan di setiap kabupaten/kota setiap tahunnya mengakibatkan terbebannya TPA hingga melebihi kapasitas. Dengan kata lain, kapasitas penampungan sampah belum dapat menampung seluruh timbulan sampah. Akar permasalahan pengelolaan persampahan dapat dirangkum menjadi 3 (tiga) antara lain: (a) Kapasitas TPA dan kemampuan pengelolaan sampah yang tidak memadai; (b) Model manajemen persampahan belum menjawab tantangan; dan (c) Kurangnya dukungan pembiayaan (PMO TKPR, 2022).

i) Permukiman Kumuh

Seiring bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat. Keterbatasan lahan merupakan kondisi yang pasti terjadi, terutama didorong oleh tingginya laju urbanisasi ke Kawasan Aglomerasi Jakarta untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Lahan yang semakin terbatas juga diikuti oleh kurang terjangkaunya harga lahan maupun hunian di perkotaan menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman pada lokasi-lokasi yang kurang layak huni dan sesuai peruntukannya. Keberadaan permukiman kumuh dapat meningkatkan potensi ancaman pencemaran lingkungan, kebakaran dan banjir, penyebaran penyakit, serta kriminalitas. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi citra kawasan perkotaan itu sendiri.

Beberapa hal yang diidentifikasi menjadi penyebab tumbuhnya permukiman kumuh adalah disparitas ekonomi dan rendahnya kemampuan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan; tidak optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya; dan pertambahan penduduk dan semakin berkurangnya ketersediaan lahan. Beberapa hal fundamental yang dapat dilakukan adalah penataan kawasan permukiman kumuh dan penyediaan hunian terjangkau yang layak huni, yang dapat memanfaatkan metode konsensus pemanfaatan lahan (*land consolidation*).

j) Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir

Dinamika yang terjadi di area hulu akan berdampak pada area hilir. Kawasan Aglomerasi Jakarta dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Bogor dan Kawasan Puncak bagian Kabupaten Cianjur merupakan bagian dari area hulu. Dinamika yang terjadi di area hulu tentunya dapat memberikan dampak pada area di bagian hilir dalam suatu ekosistem regional. Kawasan hulu di dalam Kawasan Aglomerasi Jakarta memiliki tipikal morfologi yang berbentuk hamparan dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan serta memiliki curah hujan yang tinggi. Keadaan yang sedemikian rupa membuat area hulu memiliki kerentanan terhadap bencana-bencana seperti gerakan tanah, longsor, dan banjir. Penyebab utama dari terjadinya bencana-bencana tersebut kebanyakan diakibatkan oleh alih fungsi lahan yang menyebabkan permasalahan lingkungan, terutama pada area hutan dan sempadan sungai. Pendekatan penataan ruang berbasis kesesuaian daya dukung daya tampung serta partisipatif masyarakat dapat menjadi solusi dalam penyelesaian isu strategis ini.

k) Pengelolaan UMKM dan Sektor Informal

Dalam konteks Kawasan Aglomerasi Jakarta, pengelolaan UMKM dan sektor informal semakin terbebani oleh dinamika kependudukan dan tingginya arus migrasi masuk, terutama dari daerah *hinterland* dan luar Jakarta. Banyak pendatang yang tidak memiliki keterampilan memadai serta tidak menetap dalam jangka panjang, sehingga cenderung terserap ke sektor informal dengan produktivitas yang rendah. Kondisi ini tidak hanya menghambat pengembangan UMKM dan penataan sektor informal, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi kota, terutama dalam aspek kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, besarnya jumlah tenaga kerja informal yang minim daya saing turut menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperlebar kesenjangan ekonomi, baik di perkotaan maupun di kawasan aglomerasi. Akumulasi dari kondisi ini dapat menciptakan stagnasi, di mana sektor informal terus berkembang tanpa peningkatan kualitas tenaga kerja atau pergeseran menuju sektor yang lebih produktif. Oleh karena itu, jumlah penduduk dan arus migrasi masuk perlu dikelola secara strategis agar memberikan kontribusi positif bagi perekonomian tanpa menambah beban atau tekanan pada kawasan aglomerasi.

l) Pengembangan Sektor Pariwisata Kawasan Aglomerasi

Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata. Sebagai kota global, Kawasan Aglomerasi Jakarta tidak hanya menjadi gerbang utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga menawarkan ekosistem pariwisata yang kompleks, mulai dari pariwisata budaya, bisnis, hingga gaya hidup. Penguatan sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat daya saing dalam konstelasi kota global. Untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata, Kawasan Aglomerasi Jakarta perlu mengembangkan destinasi wisata unggulan, memperbaiki infrastruktur transportasi, serta memperkuat ekosistem industri kreatif. Potensi besar, seperti budaya Betawi, Kepulauan Seribu, serta rangkaian destinasi wisata alam di Kawasan Bogor-Halimun, harus dioptimalkan melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, Kawasan Aglomerasi Jakarta memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata global.

2.6.3.4. Isu Lokal

a) Lingkungan yang adaptif terhadap risiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem.

Posisi Kepulauan Seribu di wilayah pesisir utara Jakarta menjadikannya daerah yang sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut, abrasi pantai, serta intensitas badai tropis yang semakin meningkat akibat perubahan iklim global. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sistem infrastruktur pelindung pantai dan minimnya sistem peringatan dini berbasis teknologi. Jika tidak ditangani dengan strategi adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi, maka ancaman degradasi lingkungan akan berimplikasi langsung pada keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

b) Ketahanan pangan berbasis lingkungan, data, dan riset.

Karakteristik kepulauan dengan keterbatasan lahan subur menjadikan masyarakat sangat bergantung pada pasokan pangan dari daratan Jakarta. Fenomena kelangkaan pasokan akibat cuaca buruk kerap memicu gejolak harga, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain, potensi laut yang besar belum dimanfaatkan secara optimal dengan pendekatan berbasis riset. Inovasi pangan alternatif, pemanfaatan teknologi *hydroponic* dan *aquaponic*, serta pengembangan *data-driven food security* berbasis riset lokal perlu segera menjadi agenda strategis. Hal ini bukan hanya untuk menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga di wilayah kepulauan.

c) Integrasi dan konektivitas kawasan strategis

Integrasi dan konektivitas kawasan strategis menjadi tantangan utama dalam membangun daya saing daerah. Kondisi geografis yang tersebar menimbulkan keterisolasian antar-pulau, baik dari aspek transportasi laut maupun infrastruktur digital. Hingga saat ini, sebagian besar transportasi antarpulau masih mengandalkan perahu nelayan atau kapal reguler dengan jadwal terbatas. Hal ini berdampak pada lambannya distribusi logistik, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga terhambatnya mobilitas wisatawan. Pembangunan sistem transportasi laut yang lebih modern, aman, dan terintegrasi dengan simpul transportasi Jakarta sangat diperlukan.

d) kawasan konservasi yang inklusif dan partisipatif

Kawasan konservasi yang inklusif dan partisipatif menjadi isu penting mengingat sebagian besar wilayah Kepulauan Seribu berada dalam zona Taman Nasional



Laut. Saat ini, praktik konservasi masih menghadapi persoalan kepatuhan masyarakat karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Aktivitas penangkapan ikan dengan cara merusak ekosistem laut, pembuangan limbah, dan pariwisata massal yang tidak terkendali masih terjadi. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

e) permukiman kumuh dan infrastruktur perkotaan yang belum optimal.

Pulau-pulau berpenduduk padat seperti Pulau Panggang dan Pulau Pramuka menghadapi masalah keterbatasan lahan yang berujung pada tingginya kepadatan hunian, sanitasi tidak layak, keterbatasan akses air bersih, serta buruknya pengelolaan sampah. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di pulau-pulau tersebut jauh di atas rata-rata kawasan urban di daratan Jakarta, tetapi tanpa dukungan infrastruktur perkotaan yang memadai. Hal ini bukan hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat.

f) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga masih menghadapi tantangan serius. Struktur ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan membuat mereka rentan terhadap permasalahan yang tak terduga, seperti pandemi Covid-19 yang pernah memukul sektor pariwisata hingga lumpuh. Masyarakat kepulauan seribu masih bergantung pada beberapa sektor utama saja padahal ini akan menyebabkan tingkat kesejahteraan tidak merata, terutama bagi kelompok keluarga nelayan.

g) Sarana prasarana kesehatan dan pendidikan yang belum optimal

Sarana prasarana kesehatan dan pendidikan yang belum optimal menjadi isu krusial yang harus segera ditangani. Fasilitas kesehatan di pulau-pulau umumnya hanya berupa Puskesmas dengan keterbatasan tenaga medis dan alat kesehatan. Pasien dengan kebutuhan layanan spesialis masih harus dirujuk ke Jakarta, yang sering terkendala cuaca laut. Pada bidang pendidikan, meskipun terdapat sekolah dasar hingga menengah, keterbatasan tenaga guru berkualitas, laboratorium, dan akses teknologi pembelajaran menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kualitas SDM. Investasi pada bidang kesehatan dan pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi, *telemedicine*, serta program-program beasiswa daerah.



h) Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Administrasi, Destinasi Wisata Sejarah dan Perairan Yang Berwawasan Budaya dan Lingkungan serta Kerjasama *Stakeholders* Terkait

Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Administrasi menjadi isu struktural yang membatasi fleksibilitas daerah. Sebagai kabupaten administrasi, Kepulauan Seribu tidak memiliki DPRD sehingga daya tawar politik dan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran sangat terbatas. Implikasi langsungnya adalah keterbatasan ruang inovasi kebijakan yang mampu merespons kebutuhan spesifik kepulauan. Hal ini membutuhkan strategi kolaborasi lebih erat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta optimalisasi forum koordinasi antarwilayah untuk memastikan aspirasi masyarakat Kepulauan Seribu tetap terakomodasi dalam agenda pembangunan provinsi.

Di sisi lain, destinasi wisata sejarah dan perairan yang berwawasan budaya dan lingkungan menawarkan potensi unggulan yang belum sepenuhnya dikelola secara berkelanjutan. Pulau Onrust dengan nilai sejarah kolonial, Pulau Tidung dengan potensi wisata bahari, serta berbagai pulau kecil dengan keindahan ekosistem laut merupakan aset besar yang dapat menjadi lokomotif ekonomi. Namun, tanpa tata kelola yang memperhatikan daya dukung lingkungan, potensi ini justru bisa menimbulkan degradasi ekosistem.

Terakhir, kerjasama antar-*stakeholder* merupakan syarat mutlak dalam pembangunan Kepulauan Seribu. Keterbatasan sumber daya daerah hanya dapat diatasi dengan membangun sinergi *pentahelix* antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media. Kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, pengembangan pariwisata, serta penyediaan layanan dasar akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Kerjasama lintas batas administratif, baik dengan provinsi maupun mitra internasional dalam isu lingkungan, juga membuka peluang besar bagi penguatan kapasitas daerah.

2.6.4. Telaahan Arah Pengembangan Kepulauan Seribu

2.6.4.1. Permasalahan Kewilayahan dan Potensi Pengembangan

Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan salah satu wilayah administratif di bawah Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten ini memiliki luas total 1.072,5 hektare dengan lebih dari 110 pulau yang tersebar di dalamnya. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 28.809 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 2.686 jiwa per km². Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki keunikan geografis dan tantangan tersendiri dalam proses pembangunan. Dengan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau kecil yang tersebar di perairan utara Jakarta, Kepulauan Seribu menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi strategis dan berkelanjutan.

Isu kemiskinan di Kepulauan Seribu menjadi fokus utama dalam pembangunan Jakarta secara satu kesatuan wilayah, di mana tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu menjadi penyumbang persentase kemiskinan terbesar dibanding wilayah Jakarta lainnya. Tercatat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 persentase tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu masih berada di atas 10 persen. Dibutuhkan langkah-langkah intervensi dalam pengentasan kemiskinan untuk menekan dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini.

Sementara itu, tren tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Seribu menunjukkan mengalami tren yang relatif tinggi. Merujuk pada potensi wilayah yang dimiliki oleh Kepulauan Seribu, angka pengangguran dapat ditekan dengan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik mata pencaharian berbasis pesisir.

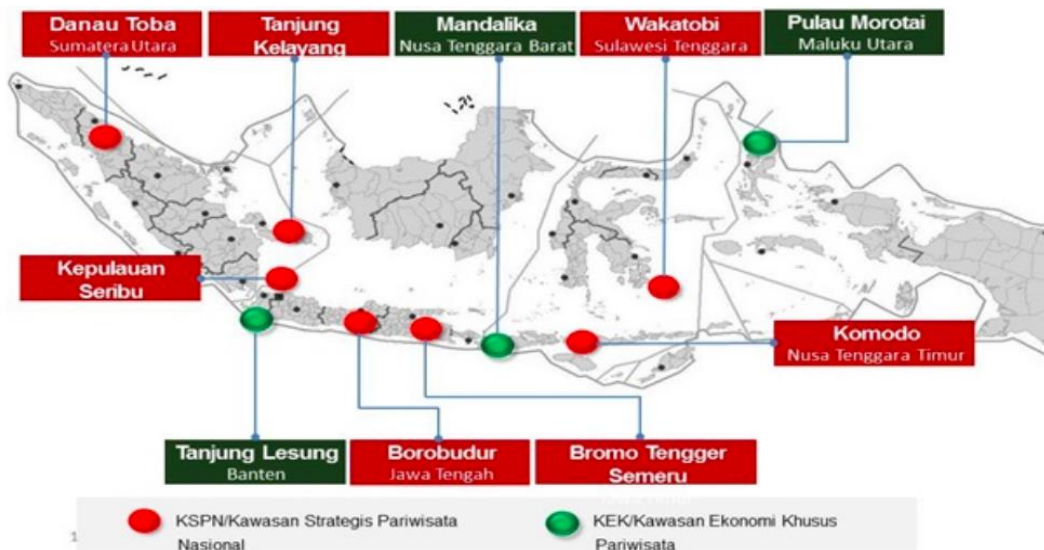
Kepulauan Seribu cenderung rentan terhadap banjir rob dan angin puting beliung mengingat letaknya yang berada di Kawasan pesisir. Naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim telah meningkatkan risiko banjir rob yang mengancam pemukiman serta infrastruktur di pulau-pulau berpenghuni. Genangan air laut yang merendam area pemukiman warga dapat merusak rumah, fasilitas umum, dan juga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Selain itu, Kepulauan Seribu juga rawan terjadi angin puting beliung terutama pada musim hujan. Bencana angin puting beliung dilaporkan telah merusak sejumlah bangunan dan menghentikan jaringan transportasi laut.

2.6.4.2. Konsep Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 dan Peraturan Presiden (Perpres) 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kepulauan Seribu merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



Sumber : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Hal yang patut menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di Kepulauan Seribu adalah bahwa pengembangan Kawasan Strategis Wisata Nasional sepenuhnya didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, dari sisi perizinan telah adanya pelayanan perizinan investasi yang terpusat satu pintu dengan prosedur perizinan yang mudah. Secara umum kestabilan ekonomi dalam negeri sangat mendukung adanya iklim investasi yang baik.

Tahun 2020-2022 merupakan saat-saat yang berat khususnya bagi sektor pariwisata yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Untuk itu diperlukan *recovery* pasca pembatasan-pembatasan yang sempat diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. *Recovery* tersebut diperlukan untuk mengembalikan pariwisata di Kepulauan Seribu. Untuk itu, diperlukan juga keterlibatan investor untuk mengembangkan Kepulauan Seribu, khususnya dibidang pariwisata.

Adapun peluang investasi pariwisata unggulan di Kepulauan Seribu sedikitnya terdapat 9 (sembilan) sub sektor pariwisata yakni :



Gambar 2.6 Diversifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Unggulan Kepulauan Seribu



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Selain memiliki diversifikasi potensi pengembangan sub sektor pariwisata di atas, masih terdapat keunggulan komparatif yang dimiliki kepulauan seribu, yakni :

- 1. Lokasi berdekatan dengan bandar udara Internasional;
- 2. Dapat diakses langsung dari kota lain (Banten dan Lampung);
- 3. Memiliki banyak sumber daya alam dengan lingkungan asri dan pemandangan yang indah;
- 4. Memiliki potensi gas alam dan minyak;
- 5. Memiliki bangunan bersejarah, heritage budaya dan keindahan alam.

Lebih lanjut sebelum Pandemi Covid-19, Kepulauan Seribu secara rutin menjadi tempat penyelenggaraan event skala nasional, seperti :

Gambar 2.7 Ragam Penyelenggaraan Event Festival



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Saat ini terdapat (5) lima pintu masuk ke Kepulauan Seribu, yakni :

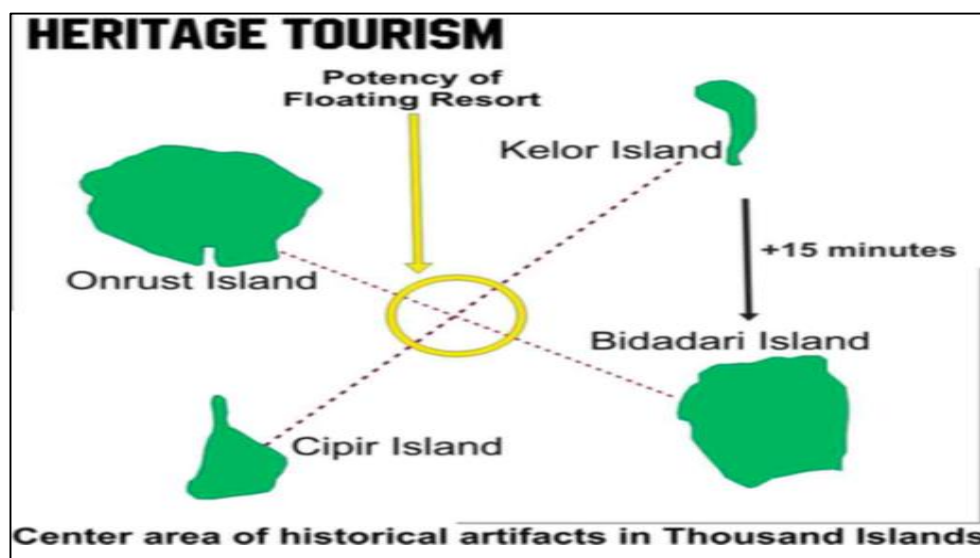
1. Marina Ancol;
2. Kaliadem;
3. Sunda Kelapa;
4. Kalibaru;
5. Tanjung Pasir.

Pada tahun 2019 kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu adalah sebanyak 650.332 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sebanyak 23.421 orang. Hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Di tahun 2021 juga masih mengalami penurunan menjadi sebanyak 174.430. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak untuk membangkitkan kembali pariwisata di Kepulauan Seribu. Lebih lanjut, penjelasan beberapa aspek penting yang menjadi daya tarik wisata, maupun daya tarik investasi di Kepulauan Seribu antara lain :

2.6.4.3. Wisata Sejarah Heritage

Kisah cerita Pulau Cipir, Pulau Bidadari, Pulau Kelor dan Pulau Onrust adalah cerita yang paling membuat penasaran para wisatawan.

Gambar 2.8 Peta Pariwisata Sejarah dan Heritage



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Pulau Cipir juga dikenal dengan sebagai Pulau Kahyangan. Pulau ini memiliki bangunan tua yang bersejarah, dimana didalamnya ada sebuah rumah sakit untuk jemaah haji yang sudah tidak difungsikan. Hal ini sangat menarik, terutama untuk yang memiliki jiwa berpetualang.

Pulau Bidadari memiliki benteng Martello peninggalan Kolonial Belanda, dimana banyak sekali wisatawan yang mengabadikan momen di Kepulauan Seribu dengan menjadikan benteng Martello sebagai ikon yang difoto.

Pulau Kelor memiliki bentuk yang unik seperti daun kelor. Namun meskipun memiliki ukuran yang kecil, Pulau Kelor memiliki sejarah yang dalam sebagai pulau yang digunakan oleh Belanda sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi serangan tentara Portugis. Disana juga memiliki benteng Martello yang menjadi tempat yang menarik wisatawan.

Pulau Onrust memiliki bangunan sejarah/heritage era Belanda dan Jepang, yang pada jaman Belanda merupakan tempat berlabuh kapal, sementara pada zaman Jepang digunakan untuk penjara. Gedung-gedung bersejarah masih berdiri kokoh di Pulau Onrust dan menjadi atraksi menarik bagi wisatawan.

Pulau Bidadari memiliki benteng Martello yang dibangun era kolonial Belanda, dimana banyak wisatawan yang sering mengabadikan momen kedatangannya di benteng Martello.

2.6.4.4. Rencana Pengembangan Pulau Seribu Warna

Dengan mengusung tema Pulau Seribu Warna merupakan sebuah model pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang mengedepankan wajah bahari berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal yang diterjemahkan dalam bentuk gerakan ini pada dasarnya mengambil sisi dari kehidupan secara menyeluruh baik dari sisi manusia, alam maupun infrastruktur itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan dari pada gerakan ini pada dasarnya untuk menjembatani proses pengembangan pembangunan kawasan wisata Kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi Bali Baru atau yang lebih dikenal dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

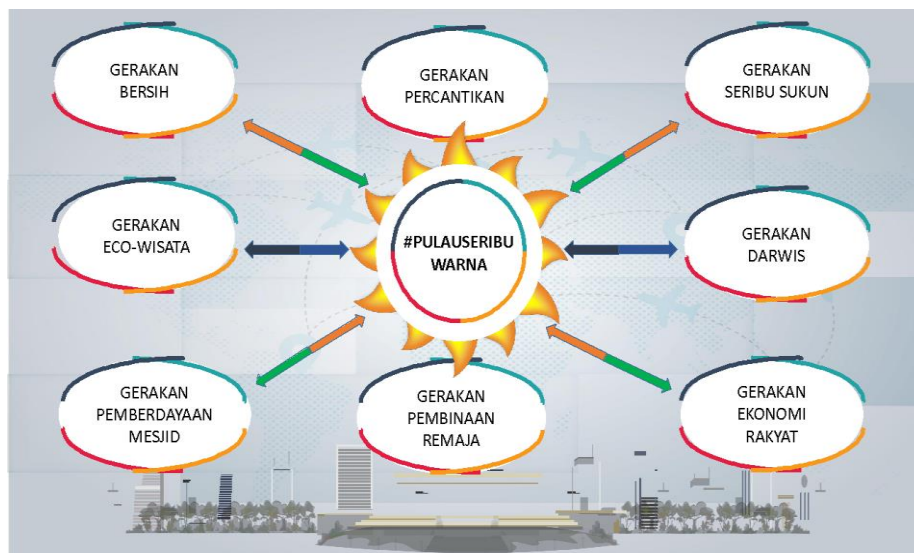
Perlunya dijembatani dikarenakan kepulauan seribu dari sisi amenities, aksesibilitas dan atraksi sebagai indikator dari KSPN memiliki tantangan tersendiri. Dimana diperlukan kerja keras dan koordinasi tidak hanya dengan pemerintah provinsi akan tetapi melibatkan pemerintah pusat. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melihat pentingnya pelibatan komunitas dan masyarakat lokal, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, tidak lain untuk menghindari sebagai penonton dan obyek semata dengan pesatnya perkembangan dunia kepariwisataan sebagai Kawasan Destinasi Bali Baru seperti yang pernah terjadi

di Pulau Bali di era tahun 70-an. Dapat disimpulkan bahwasanya gerakan yang diambil dari nilai-nilai kearifan lokal ini menargetkan sasaran pembangunan manusia pulau seutuhnya. Adapun nilai kearifan lokal yang tertuang di dalam Gerakan Pulau Seribu Warna meliputi :

- a) Gerakan Percantikan
- b) Gerakan Bersih
- c) Gerakan Seribu Sukun
- d) Gerakan Ekowisata
- e) Gerakan Darwis
- f) Gerakan Ekonomi Rakyat
- g) Gerakan Pemberdayaan Masjid
- h) Gerakan Pembinaan Remaja,

Dimana korelasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.9 Pengembangan Pulau Seribu Warna



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

a) Gerakan Percantikan

Adalah gerakan yang mengubah wajah pulau untuk menjadikan pulau lebih atraktif dan manusiawi dengan memberikan sentuhan warna pada *icon-icon* bangunan ataupun fasilitas umum di setiap pulau penduduk. Efek visualisasi inilah yang kiranya yang akan mampu memberikan efek psikologis tidak hanya kepada masyarakat pulau akan tetapi juga kepada para wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu baik dari secara dekat maupun dari kejauhan. Dimana gerakan ini tidak hanya menjadi kebijakan internal akan tetapi didorong juga untuk pihak ketiga dalam berpartisipasi.

b) Gerakan Bersih

Adalah gerakan kebersihan pulau dari sampah yang tidak hanya dihasilkan secara domestik akan tetapi juga dari wisatawan dan arus laut sebagai akibat bermuaranya 13 sungai yang melintas di Jakarta dan sungai dari daerah penyangga seperti Cisadane (Tangerang, Provinsi Banten), Citarum (Banten, Provinsi Jawa Barat) beserta anak sungainya ke Laut Jawa.

Kebersihan pulau adalah salah satu prioritas utama dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal ini dikarenakan menyadari pentingnya arti sebuah kebersihan suatu kawasan sebagai nilai jual didalam mempromosikan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu. Memang tidak mudah mengurus masalah kebersihan di Kepulauan Seribu dengan segala keterbatasannya sehingga dalam langkahnya, pelibatan masyarakat lokal sebagai penyumbang terbesar dari sampah domestik, kebijakan pusat dan provinsi, pihak ketiga baik dari organisasi masyarakat atau dunia usaha menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam mencapai keberhasilan penanganan kebersihan lingkungan.

c) Gerakan Seribu Sukun

Kegiatan ini tidak lain menegaskan keberadaan tanaman Sukun tidak hanya sebagai sebuah simbol kabupaten akan tetapi juga menjadi cerminan produk unggulan yang berada di tengah masyarakat Kepulauan Seribu. Disamping itu, keberadaan Pohon Sukun yang tumbuh secara sporadis berfungsi sebagai penyangga air tanah bagi pulau-pulau di Kepulauan Seribu demikian juga dengan pemanfaatannya. Melihat potensi dari eksistensi Pohon Sukun ini, pembudayaan yang bersifat masif masih dirasakan perlu dikarenakan tidak hanya untuk mengangkat nilai ekonomis dan harkat dari Pohon Sukun itu sendiri sekaligus perekonomian rakyat berbasis pemanfaatan nilai tambah dari Pohon Sukun dan turunannya.

d) Gerakan Ekowisata

Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memandang perlu keberadaan ekowisata untuk menjaga keberadaan lingkungan alam bahari dari kepulauan itu sendiri sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat pulau akan pentingnya keberlangsungan ekosistem pulau atas dampak menggeliatnya pariwisata di Kepulauan Seribu.

e) Gerakan Sadar Wisata (Darwis)

Pada dasarnya makna yang terkandung dalam konsep Sadar Wisata adalah dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan suatu wilayah. Konsep tersebut telah menempatkan posisi dan peran penting masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan baik sebagai tuan rumah (untuk menciptakan lingkungan dan suasana mendukung di wilayahnya) maupun sebagai wisatawan (untuk menggerakkan aktivitas pariwisata di seluruh wilayah tanah air, mengenali dan mencintai tanah air khususnya budaya setempat). Sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan yang menekankan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat serta orientasi pembangunan yang mengarah pada 3 (tiga) pilar, yaitu : *Pro Job* (menciptakan lapangan kerja), *Pro Poor* (menanggulangi dan mengurangi kemiskinan) dan *Pro Growth* (mendorong pertumbuhan (pembangunan)). Makna konsep sadar wisata perlu diperdalam agar meningkatkan posisi masyarakat sebagai penerima manfaat yang sebesar-besarnya dari pengembangan kegiatan pariwisata.

f) Gerakan Ekonomi Rakyat

Pada dasarnya merupakan sebuah gerakan yang mengutamakan pada sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana yang dimaksud dengan ekonomi rakyat itu sendiri adalah kegiatan usaha atau ekonomi yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

g) Gerakan Pemberdayaan Masjid

Optimalisasi peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat adalah yang menjadi tujuan dari gerakan pemberdayaan masjid. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melihat bahwasanya lembaga atau institusi yang menaungi kegiatan dan aktifitas masjid mampu berperan melebihi dari sekedar fungsinya yang sekarang yaitu sebagai tempat beribadah semata akan tetapi menjadi institusi sosial yang berperan dalam membangun pendidikan, ekonomi, dan politik umat. Pemerintah Kepulauan Seribu memandang bahwasanya masjid mampu menjadi agen transformasi umat dengan memperluas fungsinya atau merekonstruksi kembali sebagai sebuah institusi keagamaan yang modern yang dapat memberdayakan masyarakatnya.



h) Gerakan Pembinaan Remaja

Dalam konteks gerakan pembinaan remaja yang dimaksud adalah usaha yang ditempuh oleh seseorang atau kelompok untuk menjadikan remaja lebih baik dari kondisi yang sekarang dihadapinya. Adanya peningkatan dalam arti cara berpikir, bertindak, bersikap terhadap diri sendiri, orang lain ataupun masyarakat di sekelilingnya.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara spesifik melihat tujuan dari gerakan pembinaan remaja adalah sebagai berikut

- 1. Menggali potensi diri remaja sebagai aset bangsa
- 2. Membentuk remaja yang bermoral dan berakhlak mulia
- 3. Menjadikan manusia cerdas dan terampil
- 4. Meminimalisir terjadinya kenakalan remaja

2.6.4.5. Renovasi Dermaga Kaliadem dan Pembangunan Transportasi Air Laut

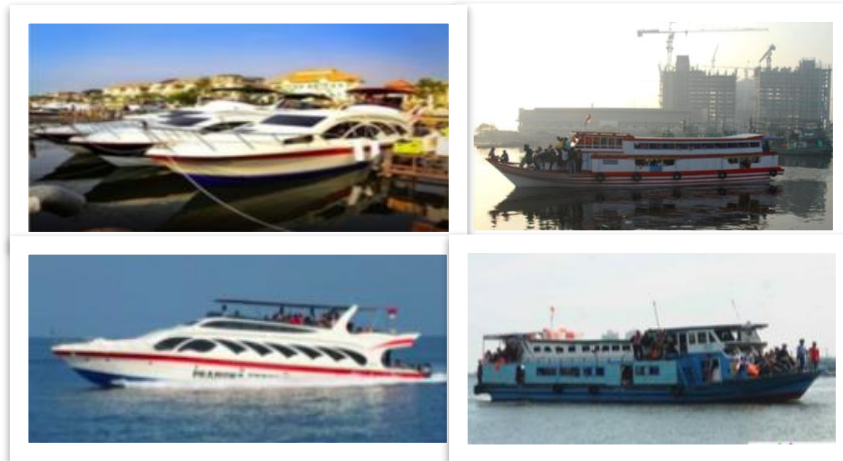
Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kepulauan Seribu diperlukan dermaga yang baik, kapal yang berkualitas dan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pelayanan sistem transportasi. Secara singkat Potensi yang ditimbulkan dari pengembangan transportasi adalah :

Gambar 2.10 Potensi Pengembangan Transportasi

	Fasilitas kapal/pelayaran yang memenuhi standar pelayaran sehingga penumpang merasa aman, nyaman, dan puas serta menjadi stimulus wisatawan serta penumpang yang akan berlayar atau berkunjung dan akan kembali ke Kepulauan Seribu.
	Kapal Tradisional yang unik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu.
	Kebutuhan akan adanya sistem pelayanan transportasi dapat mempermudah serta memberi pelayanan prima kepada pengunjung, seperti : elektronik tiket, <i>online booking</i> , dst.
	Membuka peluang kolaborasi untuk menyediakan kapal yang dilengkapi dengan akomodasi serta hiburan dan sarana olah raga sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara.

Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Gambar 2.11. Kondisi Eksisting Aktivitas Dermaga Transportasi Air



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

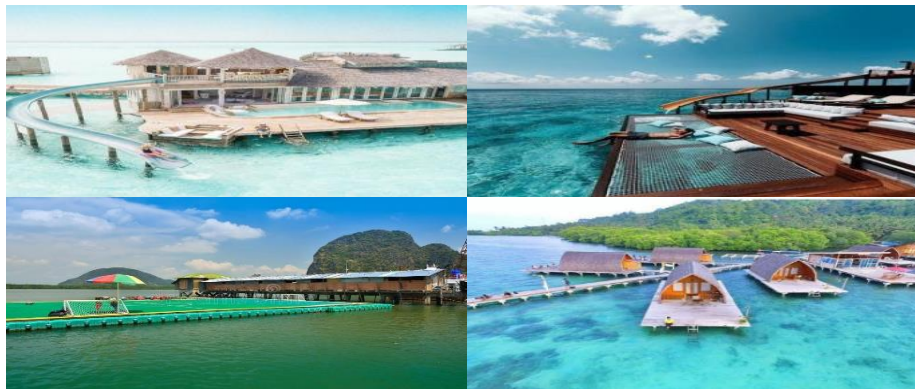
2.6.4.6. Pembangunan Terapung

Dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan jumlah pulau yang tidak bertambah bahkan cenderung berkurang luasnya akibat abrasi serta penurunan permukaan tanah, menjadikan pemanfaatan Kawasan Terbuka Biru sebagai alternatif pembangunan yang perlu menjadi prioritas. Untuk itu, Kepulauan Seribu berupaya mengembangkan konsep pembangunan secara terapung di atas laut dangkal sebagai salah satu solusi.

Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap layanan dan fasilitas resort kelas menengah hingga atas di Kepulauan Seribu membuka peluang besar untuk menjadikan kawasan ini sebagai destinasi unggulan. Kehadiran fasilitas tersebut diproyeksikan akan memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, konsep pembangunan terapung juga dapat diterapkan dalam bentuk ***Floating Sports Tourism***, yaitu pengembangan sarana olahraga di atas laut atau perairan. *Floating Sports Tourism* mencakup berbagai kegiatan olahraga air dan rekreasi seperti lapangan futsal terapung, arena voli pantai terapung, serta olahraga wisata air seperti jetski, kano, selancar angin, *snorkeling*, hingga *diving*. Konsep ini bukan hanya memberikan ruang aktivitas sehat dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata baru yang unik, inovatif, dan berdaya saing tinggi bagi Kepulauan Seribu. Adapun ilustrasi gambar konsep pembangunan terapung disampaikan pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12. Konsep Pembangunan Terapung



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

2.6.4.7. Agro Wisata Pulau Tidung Kecil

Tidung Kecil adalah pulau yang memanjang di sebelah timur Pulau Tidung Besar. Terhubung ke Tidung Besar melalui jembatan sepanjang 630 meter (2,070 kaki) yang disebut Jembatan Cinta. Pengembangan Tidung Kecil akan ditujukan untuk menjadi pusat agrowisata. Termasuk pariwisata air, museum Kerangka Paus dan *Camping Ground*. Adapun foto Jembatan Cinta, Museum Kerangka Paus dan Agro Wisata di Pulau Tidung Kecil dapat dilihat pada Gambar 2.13 dan Gambar 2.14.

Gambar 2.13 Agro Wisata dan Museum Kerangka Paus Pulau Tidung Kecil



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Gambar 2.14 Pulau Tidung Kecil dan Jembatan Cinta



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

2.6.4.8. Penentuan Isu-Isu Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Perlu digaris bawahi bahwa perumusan isu-isu strategis dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan kata lain isu yang terumuskan adalah isu-isu yang dapat menjadi diberikan solusi oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai kewenangannya. Dalam hal ini perumusan isu strategis sangat menghindari munculnya isu-isu yang tidak dapat diberikan solusi oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dari tahapan identifikasi permasalahan, maka dapat disintesis beberapa aspek dan permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Gambar 2.15 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029



Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

Ditinjau dari berbagai dimensi telaahan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan aspek dan permasalahannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Lebih lanjut disajikan pada Tabel 2.20 di bawah ini.



Tabel 2.20. Isu Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	PERMASALAHAN DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU-ISU				ISU STRATEGIS KEPULAUAN SERIBU
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (DKI JAKARTA)	LOKAL (KABUPATEN ADMINISTRASI)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana alam dan sosial	1) Rawan bencana banjir rob dan angin puting beliung 2) Angka kriminalitas masih tinggi 3) Organisasi sosial budaya belum berkembang optimal	Upaya adaptasi dan mitigasi bencana belum mencapai target TPB Jakarta	1) Perubahan Iklim 2) Demografi Global 3) Urbanisasi Internasional	1) Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta ketahanan bencana 2) Bonus demografi Indonesia 3) Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	1) Ketahanan dan Transisi Energi 2) Potensi Ancaman Banjir 3) Kerentanan Bencana di Wilayah Pesisir dan Pantai 4) Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir 5) Pergerakan Orang dan Barang di Kawasan Aglomerasi	1) Lingkungan yang adaptif terhadap resiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem 2) Ketahanan pangan berbasis lingkungan, data, dan riset	Peningkatan Kelembagaan dan Optimalisasi Fungsi Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor
Ketersediaan sarana prasarana dan layanan masyarakat yang inklusif	1) Sarana dan prasarana dasar masih belum merata 2) Layanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata 3) Partisipasi masyarakat belum optimal	1) Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih 2) Ketimpangan infrastruktur yang menunjang pemerataan	Sustainable Development Goals (SDGs)	Konektivitas dan Infrastruktur Dasar	1) Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang 2) Penyediaan Air Baku, Air Minum dan Sanitasi 3) Pengelolaan dan Kapasitas Penampungan Sampah 4) Permukiman	1) Integrasi dan konektivitas kawasan strategis 2) Kawasan konservasi yang inklusif dan partisipatif 3) Permukiman kumuh, infrastruktur perkotaan belum optimal 4) Pemberdayaan dan	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
				Transformasi Pelayanan Publik			



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	PERMASALAHAN DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU-ISU				ISU STRATEGIS KEPULAUAN SERIBU
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (DKI JAKARTA)	LOKAL (KABUPATEN ADMINISTRASI)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pembangunan (Urban Island based)			Kumuh	Kesejahteraan Keluarga 5) Sarana prasarana kesehatan dan pendidikan belum optimal	
Kolaborasi multi sektor dalam percepatan pembangunan	1) Angka kemiskinan masih tinggi 2) Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi 3) Kewenangan terbatas / lebih bersifat koordinasi, evaluasi dan pengendalian 4) Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasikan	Rendahnya kapasitas IKM untuk mengakses fasilitas keuangan (<i>Financial Institution</i>)	<i>Green economy</i>	Perpindahan Ibu Kota Negara Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	1) Pengelolaan UMKM dan Sektor Informal 2) Pengembangan Sektor Pariwisata Kawasan Aglomerasi	Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Administrasi Destinasi wisata sejarah dan perairan yang berwawasan budaya dan lingkungan Kerjasama <i>stakeholders</i> terkait	Pelimpahan Kewenangan yang Efektif dan Berdampak

Sumber : Hasil Analisis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

“Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kabupaten Kepulauan Seribu”

Dalam rangka mengoperasionalkan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi pengukuran program dan kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk periode 2025-2029. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat (Indeks Pelayanan Publik)	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kabupaten Kepulauan Seribu		Nilai Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	4	4	4	4	4	4



		Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	4	4	4	4	4	4
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal	Nilai Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	4	4	4	4	4	4
		Meningkatnya kualitas Layanan Pelimpahan Kewenangan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	4	4	4	4	4	4

Sumber: SIPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025 - 2029 (<https://rpjmd25.bapedadki.net>)

3.2. Analisis SWOT dalam Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dituntut memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2017-2022 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.



Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam lima tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Analisis Atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

<div>Eksternal</div> <div>Internal</div>	<div>Peluang (O) :</div> <div><div>a. Potensi Jumlah Penduduk</div><div>b. Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Peltantanganayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</div><div>c. Potensi Perekonomian;</div><div>d. Potensi Pariwisata;</div><div>e. Partisipasi Masyarakat.</div></div>	<div>Tantangan (T):</div> <div><div>a. Kesenjangan Pendidikan</div><div>b. Bencana Alam;</div><div>c. Kerusakan Lingkungan;</div><div>d. Keterbatasan Air Bersih dan Listrik;</div><div>e. Kondisi Transportasi dan Dermaga;</div><div>f. Kondisi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;</div><div>g. Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi;</div><div>h. Kondisi Ketahanan Pangan;</div><div>i. Kondisi Pelayanan Kesehatan</div></div>
<div>Kekuatan (S):</div> <div><div>a. Sebagai bagian wilayah Ibukota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa;</div><div>b. Adanya Komitmen Pimpinan;</div><div>c. Adanya kuantitas sumberdaya manusia yang dapat diberdayakan;</div></div>	<div>Alternatif Strategi (S-O):</div> <div><div>1. Mengembangkan potensi pariwisata dan menjadi ikon Wisata Bahari Ibukota;</div><div>2. Penguatan investasi di bidang ekonomi dan pariwisata</div><div>3. Pemberdayaan SDM Lokal untuk mengembangkan UMKM dan Sektor Kelautan yang unik dan menjadi ciri khas di kepulauan seribu</div><div>4. Kolaborasi dengan perusahaan lokal yang ada di wilayah kepulauan seribu terkait konservasi laut dan pelestarian budaya lokal;</div><div>5. Mengembangkan potensi dari kawasan pulau-pulau kecil berdasarkan karakteristiknya untuk memperkuat fungsi ekonomis, sosial dan budaya.</div><div>6. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang optimal;</div><div>7. Pembinaan dan penataan kelembagaan kepada RT, RW, LMK, FKMD;</div><div>8. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru.</div></div>	<div>Alternatif Strategi (S-T):</div> <div><div>1. Membentuk kelompok masyarakat yang melakukan monitoring terhadap perubahan iklim dan cuaca;</div><div>2. Penegakan aturan dan kebijakan lingkungan secara tegas terhadap aktivitas aktivitas perusahaan dan atau masyarakat yang merusak lingkungan dan ekosistem;</div><div>3. Membangun kemitraan dengan Swasta untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, air bersih dan <i>smart solar system</i></div><div>4. Melibatkan masyarakat lokal dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih dan Listrik;</div><div>5. Pengembangan potensi perikanan skala pulau;</div><div>6. Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal;</div><div>7. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.</div></div>
<div>Kelemahan (W):</div> <div><div>a. Keterbatasan Kewenangan Wilayah (lebih bersifat koordinatif);</div></div>	<div>Alternatif Strategi (W-O):</div> <div><div>1. Penguatan pelimpahan kewenangan dari Bupati administratif kepada Camat dan Lurah terutama dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di</div></div>	<div>Alternatif Strategi (W-T):</div> <div><div>1. <i>One Island-One Technology or Innovation</i> sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan lokal</div></div>



<p>b. Masih perlu optimalisasi profesionalisme aparatur;</p> <p>c. Masih kurangnya infrastruktur baik infrastruktur publik maupun infrastruktur penunjang pelayanan pemerintahan</p>	wilayah kecamatan dan kelurahan.	2. Pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Bupati Administrasi dalam hal mengatur, mengelola, dan memantau layanan transportasi dan dermaga di wilayah kepulauan
	2. Memberlakukan kebijakan afirmatif dalam hal promosi ASN yang bertugas di pulau tertentu dan dalam jangka waktu yang ditetapkan	3. Pengembangan program “Satu RT Satu Produk Pengelolaan Sampah”
	3. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN setiap tahunnya;	4. Kolaborasi pemerintah bersama Lembaga Konservasi, Perusahaan dan Hotel/Resort untuk Rehabilitasi dan Proteksi Ekosistem laut
	4. Menjalin kemitraan strategis dengan pihak swasta, BUMN, perguruan tinggi, dan komunitas lokal untuk mendorong pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur layanan publik secara kolaboratif dan berkelanjutan.	5. Pemanfaatan pekarangan dan lahan terbatas untuk menanam kebutuhan pangan
	5. Pengembangan Layanan Publik Berbasis Komunitas dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola layanan public	6. Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal;
	6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai urusan pelimpahan kewenangan Kabupaten Administrasi yang optimal;	7. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
	7. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik.	

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Tahun 2025-2029

Strategi (S-O):

1. Mengembangkan potensi pariwisata dan menjadi ikon Wisata Bahari Ibukota;
2. Penguatan investasi di bidang ekonomi dan pariwisata;
3. Pemberdayaan SDM Lokal untuk mengembangkan UMKM dan Sektor Kelautan yang unik dan menjadi ciri khas di kepulauan seribu;
4. Kolaborasi dengan perusahaan lokal yang ada di wilayah kepulauan seribu terkait konservasi laut dan pelestarian budaya lokal;
5. Mengembangkan potensi dari kawasan pulau-pulau kecil berdasarkan karakteristiknya untuk memperkuat fungsi ekonomis, sosial dan budaya;
6. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang optimal;
7. Pembinaan dan penataan kelembagaan RT, RW, LMK, FKMD;
8. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru.

Strategi (S-T):

1. Membentuk kelompok masyarakat yang melakukan monitoring terhadap perubahan iklim dan cuaca;
2. Penegakan aturan dan kebijakan lingkungan secara tegas terhadap aktivitas perusahaan dan atau masyarakat yang merusak lingkungan dan ekosistem;
3. Membangun kemitraan dengan Swasta untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, air bersih dan *smart solar system*;
4. Melibatkan masyarakat lokal dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih dan Listrik;
5. Pengembangan potensi perikanan skala pulau;
6. Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal;
7. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses Pembangunan.

Strategi (W-O):

1. Penguatan pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Bupati dan dari Bupati administratif kepada Camat dan Lurah terutama dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan dan kelurahan;
2. Memberlakukan kebijakan afirmatif dalam hal promosi ASN yang bertugas di pulau tertentu dan dalam jangka waktu yang ditetapkan;
3. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN setiap tahunnya;
4. Menjalin kemitraan strategis dengan pihak swasta, BUMN, perguruan tinggi, dan komunitas lokal untuk mendorong pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur layanan publik secara kolaboratif dan berkelanjutan;
5. Pengembangan Layanan Publik Berbasis Komunitas dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola layanan publik;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai urusan pelimpahan kewenangan Kabupaten Administrasi yang optimal;
7. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik.

Strategi (W-T):

1. *One Island-One Technology or Innovation* sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan local;
2. Pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Bupati Administrasi dalam hal mengatur, mengelola, dan memantau layanan transportasi dan dermaga di wilayah kepulauan;
3. Pengembangan program “Satu RT Satu Produk Pengelolaan Sampah”;
4. Kolaborasi pemerintah bersama Lembaga Konservasi, Perusahaan dan Hotel/Resort untuk Rehabilitasi dan Proteksi Ekosistem laut;
5. Pemanfaatan pekarangan dan lahan terbatas untuk menanam kebutuhan pangan;
6. Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal.
7. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kabupaten Adm Administrasi Kepulauan Seribu.

Berdasarkan strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT diatas, selanjutnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menetapkan strategi utama dengan menggunakan alat uji litmus (*litmus test*), hasilnya diperoleh strategi prioritas untuk diterapkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan jajarannya (Kecamatan dan Kelurahan);
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan monitoring (internal) serta kolaborasi (eksternal) lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Mengoptimalkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Bupati Administratif dan dari Bupati Administratif kepada Camat dan Lurah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pengelolaan urusan teknis;
4. Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan kepada Masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.



3.3. Strategi Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

Dalam rangka pelaksanaan strategi di atas selanjutnya perlu disusun tahapan pembangunan agar setiap periode memiliki fokus dan arah yang jelas. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disajikan dalam tabel berikut

Tabel 3. 3 Tahapan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1. Identifikasi program prioritas 2. Memetakan kebutuhan layanan publik 3. Memetakan kebutuhan pemerataan pembangunan 4. Penataan regulasi pelimpahan kewenangan	1. Melaksanakan program prioritas 2. Memperluas akses layanan Masyarakat secara merata 3. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 4. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah	1. Mengembangkan inovasi layanan publik berbasis teknologi digital. 2. Integrasi sistem informasi antar-UKPD. 3. Penguatan ekonomi dan pemberdayaan kelompok rentan 4. Perluasan program pemberdayaan masyarakat dan pariwisata bahari. 5. Penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. 6. Meningkatkan kapasitas SDM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1. Konsolidasi hasil pembangunan dan perbaikan layanan publik. 2. Standarisasi kualitas layanan di seluruh kecamatan dan kelurahan. 3. Menyerderahkan berbagai macam layanan dengan sistem terpadu 4. Mengoptimalkan koordinasi pelimpahan kewenangan 5. Monitoring capaian kinerja Pembangunan Optimalisasi digitalisasi layanan publik dan administrasi daerah	1. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian sasaran dan indikator Renstra. 2. Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk Renstra 2030 -2034. 3. Melanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik

3.3.1. Arah Kebijakan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2015-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Kebijakan yang diterapkan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dilihat pada Tabel 3.4.

1. Melakukan optimalisasi manajemen pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2. Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik.
5. Melakukan penataan tugas dan fungsi unit kerja lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar tidak tumpang tindih dengan unit kerja dan perangkat daerah lain.
6. Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui pola pelatihan klasikal maupun non klasikal.
7. Mengusulkan perluasan pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Bupati Administratif dan dari Bupati Administratif kepada Camat dan Lurah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pengelolaan urusan teknis melalui perubahan Peraturan Gubernur Tentang Kewenangan Kabupaten/Kota Administrasi.
8. Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam penyelenggaraan urusan sosial, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, kehutanan, serta pekerjaan umum sub urusan bidang jalan dan fungsi penyelenggaraan pencahayaan.



Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

TUJUAN RPJMD : <i>Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern</i> (Indikator Tujuan : <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>)
SASARAN RPJMD : <i>Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat</i> (Indikator Sasaran : <i>Indeks Pelayanan Publik</i>)

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Permendagri 90 Tahun 2019)	Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern	Melakukan optimalisasi manajemen pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	
		Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	
		Melakukan penataan tugas dan fungsi agar tidak tumpang tindih dengan unit kerja dan perangkat daerah lain	
		Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui pola pelatihan klasikal maupun non klasikal	
	Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian <i>good governance</i> dan <i>global city</i>	Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.	
		Melakukan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik.	
		Mengusulkan perluasan pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Bupati Administratif dan dari Bupati Administratif kepada Camat dan Lurah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pengelolaan urusan teknis melalui perubahan Peraturan Gubernur Tentang Kewenangan Kabupaten/Kota Administrasi.	
		Melakukan optimalisasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam penyelenggaraan urusan sosial, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang jalan, serta fungsi penyelenggaraan pencahayaan.	

3.3.2. Arah Kebijakan Kewilayahan Kepulauan Seribu Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

Pembangunan wilayah adalah sarana untuk memetakan arah pembangunan Jakarta yang lebih spesifik sesuai dengan konteks dan karakter wilayah masing-masing. Pembangunan wilayah difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian tahap pertama RPJPD Jakarta Tahun 2025-2045 yaitu perbaikan fundamental. Sebagai pusat perekonomian nasional, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan pengelolaan tata ruang. Pendekatan berbasis kewilayahan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 memungkinkan optimalisasi sektor unggulan di setiap kawasan, seperti **Kepulauan seribu sebagai kawasan konservasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan**.

Dalam konteks mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif sebagai *driving force* Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menempatkan peningkatan Indeks Inklusi Keuangan Daerah (IKAD) sebagai salah satu fokus strategis. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan memperluas akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya nelayan, pelaku UMKM, dan komunitas pesisir yang menghadapi keterbatasan akibat karakteristik geografis kepulauan serta tantangan konektivitas.

Merujuk pada arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), strategi yang ditempuh bertumpu pada penguatan ekosistem UMKM secara intensif, percepatan adopsi digital, serta perluasan proteksi asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan. Akses keuangan dasar terus dibangun melalui penambahan titik layanan, perluasan instrumen keuangan dan proteksi asuransi serta peningkatan literasi keuangan berbasis komunitas. Pendekatan komprehensif ini diarahkan untuk membangun fondasi ekosistem keuangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah daratan tetapi juga merata hingga pulau-pulau kecil.

Sejalan dengan konsep di atas, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan tidak hanya memberikan arah kebijakan yang lebih terukur, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kinerja perekonomian daerah. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan menjadi salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana strategi pembangunan wilayah mampu mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Data pertumbuhan PDRB memberikan gambaran empiris mengenai dinamika sektor-sektor unggulan, tingkat produktivitas, serta daya tahan perekonomian Jakarta terhadap berbagai tantangan, baik struktural maupun eksternal.



Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Harga Konstan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	0,86	9,11	5,88	-6,18	10,60
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-6,43	-4,06	-5,43	-12,75	-5,27
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,59	8,53	8,39	3,04	0,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,15	1,36	4,91	6,72	3,63
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,24	5,07	0,50	6,35	0,56
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-1,07	0,02	2,17	2,72	7,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	0,55	1,63	7,88	5,37	7,55
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-5,00	4,82	18,74	-6,92	9,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-14,04	5,14	7,29	5,87	5,66
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,23	4,07	6,86	7,51	5,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,49	-0,03	3,70	10,15	9,33
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	-4,99	1,71	2,38	0,72	1,80
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-0,60	-0,25	5,21	6,34	4,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-4,23	-2,37	1,83	0,06	2,65
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,32	0,83	-0,16	1,26	4,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,03	8,18	9,24	6,18	5,87
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,03	-1,27	15,00	12,25	0,79
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		-4,94	-1,55	-1,70	-7,85	-1,11

Sumber: Kabupaten Kepulauan Seribu Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas Perkembangan PDRB Kepulauan Seribu selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif akibat dampak pandemi, pemulihan ekonomi, dan perubahan pola aktivitas masyarakat. Pada tahun 2020, hampir seluruh sektor usaha mengalami kontraksi. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan turun sebesar 5,00%, penyediaan akomodasi dan makan minum terkontraksi 14,04%, serta pertambangan dan penggalian menurun 6,43%. Kondisi ini menyebabkan PDRB Kabupaten mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,94%.

Memasuki tahun 2021, tren perbaikan mulai terlihat. Pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat signifikan sebesar 9,11% seiring dengan meningkatnya aktivitas nelayan dan budidaya laut. Industri pengolahan tumbuh sebesar 8,53% dan jasa kesehatan naik 8,18%. Meski demikian, sektor pertambangan serta jasa pemerintahan masih menunjukkan kontraksi. Secara keseluruhan, ekonomi daerah mulai pulih dengan pertumbuhan minus 1,55%, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

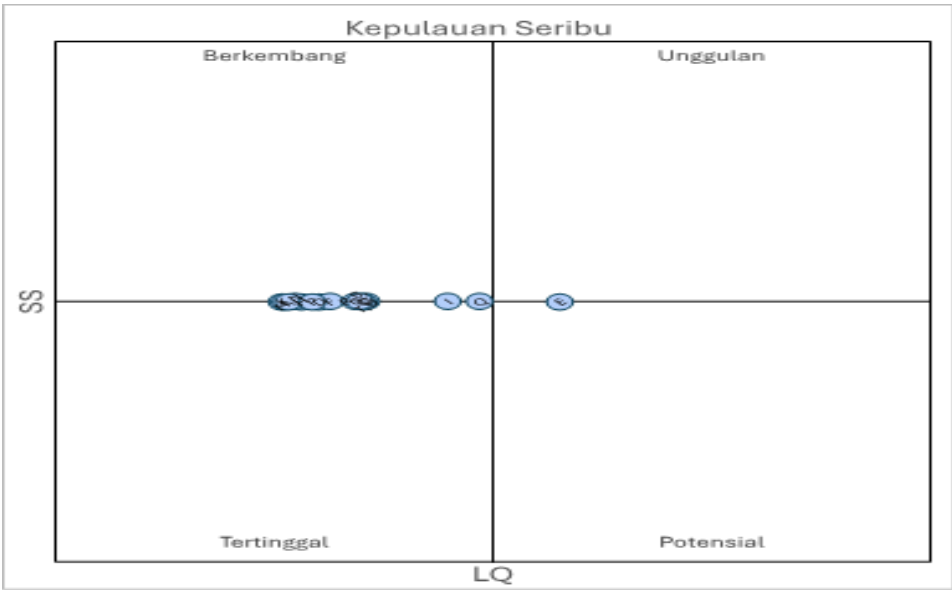
Tahun 2022 ditandai dengan penguatan lebih lanjut di sejumlah sektor. Transportasi dan pergudangan tumbuh sangat tinggi mencapai 18,74% sebagai dampak meningkatnya mobilitas wisatawan. Perdagangan besar dan eceran naik 7,88%, industri pengolahan meningkat 8,39%, dan jasa kesehatan tetap tinggi di 9,24%. Pertumbuhan positif di berbagai sektor ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi berjalan baik, meskipun secara total PDRB masih tercatat minus 1,70% akibat beberapa sektor seperti administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan yang tumbuh rendah.

Tahun 2023 menunjukkan perlambatan di beberapa sektor utama. Transportasi dan pergudangan kembali mengalami kontraksi sebesar 6,92%, sedangkan pertanian menurun tajam sebesar 6,18% akibat faktor cuaca dan pasokan. Meski begitu, beberapa sektor justru meningkat pesat, antara lain jasa keuangan yang tumbuh 10,15%, informasi dan komunikasi naik 7,51%, serta konstruksi meningkat 2,72%. Hal ini mencerminkan adanya diversifikasi sumber pertumbuhan, namun secara agregat PDRB masih mencatat kontraksi lebih dalam sebesar 7,85%.

Pada tahun 2024, tren pemulihan kembali menguat. Pertanian melonjak 10,60%, transportasi dan pergudangan tumbuh 9,71%, serta konstruksi meningkat 7,24%. Sektor perdagangan naik 7,55% dan jasa keuangan mencatat pertumbuhan 9,33%. Kendati masih ada sektor yang tumbuh rendah seperti jasa lainnya sebesar 0,79% dan pengadaan air sebesar 0,56%, secara keseluruhan ekonomi daerah menunjukkan perbaikan dengan kontraksi PDRB yang semakin kecil yaitu minus 1,11%.



Gambar 3.1 Hasil Analisis LQ dan SS Kabupaten Kepulauan Seribu



Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Tabel 3.6. Hasil Analisis LQ dan SS Kabupaten Kepulauan Seribu

Kode	Lapangan Usaha	Kategori
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Unggulan
B	Pertambangan dan Penggalian	Potensial
C	Industri Pengolahan	Berkembang
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Tertinggal
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Potensial
F	Konstruksi	Berkembang
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Berkembang
H	Transportasi dan Pergudangan	Berkembang
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Berkembang
J	Informasi dan Komunikasi	Berkembang
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Berkembang
L	Real Estat	Tertinggal
M,N	Jasa Perusahaan	Berkembang
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Berkembang
P	Jasa Pendidikan	Berkembang
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	Berkembang
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Berkembang

Sumber: Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Secara keseluruhan, kontribusi PDRB di Kabupaten Kepulauan Seribu terhadap Provinsi DKI Jakarta cukup rendah dengan 0,22% di tahun 2024, sehingga persebaran semua sektor pada nilai SS sangat mendekati ambang batas (0). Namun, berdasarkan hasil analisis LQ SS, terdapat beberapa sektor yang dapat diprioritaskan pengembangannya untuk mendorong perekonomian Kabupaten Kepulauan Seribu

dan Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Sektor 'Pertanian, Kehutanan dan Perikanan' (A) menjadi satu-satunya sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Seribu dan perlu perhatian khusus. Di sisi lain, perkembangan sektor perekonomian yang berbasis masyarakat, pariwisata, dan ekonomi kreatif perlu diprioritaskan agar perekonomian Kabupaten Kepulauan Seribu tidak bergantung pada sektor 'Pertambangan dan Penggalian' (B), yang pada tahun 2024 berkontribusi sebesar 70,52% terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Seribu.

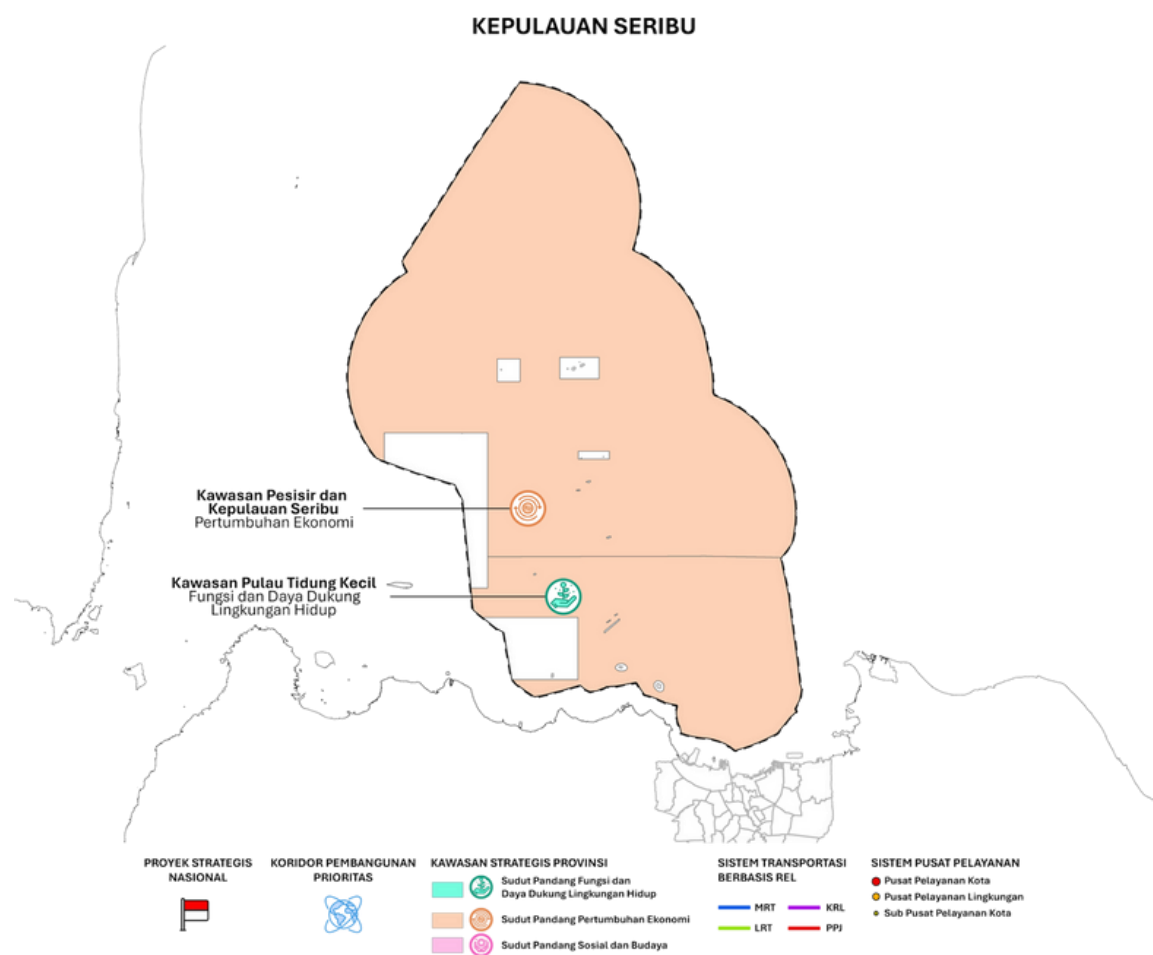
Kepulauan Seribu memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan RTRW 2024–2044 DKI Jakarta yang mendorong pengembangan wisata untuk meningkatkan daya Tarik dan ekonomi di wilayah ini. Dalam hal destinasi wisata, Kepulauan Seribu memiliki keunggulan wisata berbasis edukasi sejarah. Pengembangan wisata sejarah ini mencakup Pulau Bidadari, Cipir, Kelor, dan Onrust yang menyimpan beberapa peninggalan era kolonial, seperti Benteng Martello dan Museum Purbakala. Potensi tersebut dapat ditingkatkan melalui pengembangan produksi kerajinan tangan dan pengolahan produk makanan yang berbasis hasil laut. Pengembangan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata tidak terlepas dari perlunya peningkatan sarana transportasi laut dan pengembangan transportasi udara, termasuk potensi landasan pesawat amfibi.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga mempunyai potensi sebagai lumbung pangan melalui pengembangan komoditas pertanian dan kelautan. Wilayah ini menyimpan kekayaan sumber daya ikan yang beragam, seperti ikan kakap, kerapu, tenggiri, dan tuna. Dalam hal ini, penangkapan dengan teknologi mutakhir perlu digunakan agar hasil tangkapan lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain sebagai sentra ketahanan pangan (*food security*), Kepulauan Seribu juga dapat dikembangkan sebagai kawasan strategis untuk lokasi penelitian ilmiah tentang ekosistem dan konservasi laut.

Potensi besar lainnya adalah Kepulauan Seribu sebagai kawasan konservasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dengan sinar matahari yang melimpah, wilayah ini ideal untuk pemanfaatan energi surya guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan sektor pariwisata. Selain itu, budidaya laut menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Budidaya ikan kerapu dan kakap melalui metode keramba jaring apung berpotensi memberikan hasil ekonomi tinggi. Begitu pula dengan budidaya rumput laut yang memiliki nilai jual tinggi untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Budidaya kerang mutiara dan teripang juga menjadi

peluang besar untuk pasar domestik dan internasional. Namun, Kepulauan Seribu menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan. Dari 113 pulau yang ada, sebanyak 26,98% terumbu karang mengalami kerusakan, sementara hanya 0,12% yang berada dalam kondisi sangat baik. Abrasi pantai juga menjadi ancaman serius, dengan 6 pulau telah hilang dan 23 lainnya terancam tenggelam. Hal tersebut dipertegas RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 yang menjadikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi pusat kawasan konservasi dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam peta di bawah ini.

Gambar 3.2. Peta Tematik Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Penerapan konsep pembangunan wilayah dalam RPJMD 2025-2029 memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Walikota/Bupati, Perangkat Daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Tantangan dari sisi internal, eksternal, dan global perlu dipertimbangkan untuk menentukan prioritas penguatan di tiap wilayah. Arah pembangunan kewilayahan dapat menjadi landasan bagi Jakarta dalam menghadapi



dinamika perkotaan di masa depan dan memastikan pertumbuhan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dirancang dengan menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan permasalahan dan potensi spesifik di setiap wilayah.

Dalam rangka mendukung pengembangan Jakarta secara keseluruhan, beberapa indikator diidentifikasi sebagai indikator strategis wilayah (Kontribusi PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Prevalensi Stunting). Secara lebih detail, capaian dan proyeksi target indikator dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7 Target Indikator Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Kondisi Akhir (2030)
1	Kontribusi PDRB (persen) ¹	0,22	2,67
2	Tingkat Kemiskinan (persen) ¹	13,03	8,51
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) ¹	7,93	5,89
4	Prevelensi Stunting (persen) ²	16,9	13,01

Sumber :¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; ² Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2024

Untuk mencapai target perencanaan jangka menengah daerah di atas dan mendorong pembangunan wilayah Kepulauan Seribu, direkomendasikan kebijakan strategis yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3. 8. Arah Kebijakan Kewilayahan Kepulauan Seribu

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN STRATEGIS
Destinasi wisata sejarah dan perairan yang berwawasan budaya dan lingkungan	Perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan pendekatan partisipatif kewilayahan untuk mengoptimalkan potensi lokal pada Kawasan Kepulauan Seribu
	Perencanaan dan implementasi pembangunan Pulau Tematik di wilayah Kepulauan Seribu
	Pemaduan unsur pembangunan budaya dan pariwisata yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya pada Kawasan Kepulauan Seribu
	Transformasi kawasan pesisir utara (Ancol) dan Kepulauan Seribu menjadi pusat terpadu untuk gaya hidup, komersial, dan pariwisata sebagai bagian dari Program Kota Global
	Pengembangan pariwisata maritim berkelanjutan berskala global
	Pengembangan kawasan Kepulauan Seribu sebagai pusat pariwisata dan lumbung pangan berbasis lingkungan yang berkelanjutan



ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN STRATEGIS
	<p>Peningkatan potensi wisata melalui pengembangan produksi kerajinan tangan dan pengolahan produk makanan berbasis hasil laut, serta pelatihan tenaga kerja pariwisata.</p> <p>Pengembangan kawasan wisata yang mengedepankan aspek lingkungan (<i>ecotourism</i>) pada Kawasan Pulau Tidung Kecil</p> <p>Pengembangan wisata berbasis edukasi sejarah di Kepulauan Seribu, mencakup Pulau Bidadari, Cipir, Kelor, Kahyangan, dan Onrust</p> <p>Pengembangan Pulau Panjang sebagai destinasi <i>Resort High End</i> yang ramah lingkungan</p> <p>Penataan Kawasan Pulau Untung Jawa dan Pulau Kelapa melalui penyelenggaraan Festival Kepulauan Seribu dan peningkatan fasilitas lingkungan</p>
Lingkungan yang adaptif terhadap resiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem	<p>Pemanfaatan lingkungan baik Sumber Daya Alam maupun kondisi geografis, dengan menerapkan keseimbangan hubungan manusia dengan alam untuk mencegah pengrusakan alam pada kawasan Kepulauan Seribu</p> <p>Pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan yang adaptif terhadap bencana pada Kawasan Kepulauan Seribu</p> <p>Pembangunan tanggul pada 4 (empat) pulau terdampak banjir rob di Pulau Pari, Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan</p> <p>Pemulihan kawasan Kepulauan Seribu dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan</p>
Kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau	<p>Penyediaan Rumah Susun sebagai upaya pemenuhan hunian layak huni dan terjangkau di Pulau Heksagon Pulau Panggang</p>
Ketahanan pangan berbasis lingkungan, data, dan riset	<p>Perencanaan pengembangan ekonomi biru sebagai sumber daya pangan alternatif pada Kawasan Kepulauan Seribu</p> <p>Pengembangan produk wisata dan pasar yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem wilayah pengaturan spasial yang selaras dengan rantai komoditas sentra perikanan pada Kawasan Kepulauan Seribu</p> <p>Pengembangan komoditas bernilai tinggi seperti kerapu, bawal bintang, udang vaname, dan ikan hias laut di perairan Kepulauan Seribu</p> <p>Penerapan teknologi <i>karamba jaring apung</i> (KJA) untuk efisiensi penyortiran ikan dan percepatan panen</p>
Integrasi dan konektivitas kawasan strategis	<p>Peningkatan konektivitas dan dukungan sarana prasarana serta utilitas kawasan Kepulauan Seribu yang terintegrasi dengan daratan Jakarta</p> <p>Pengintegrasian kawasan dengan jaringan dan titik transit Angkutan Umum Massal pada Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu</p> <p>Modernisasi fasilitas pelabuhan dan penambahan armada kapal untuk meningkatkan efisiensi transportasi laut</p> <p>Pembangunan dermaga modern dan penambahan kapal yang efisien serta ramah lingkungan</p> <p>Pengembangan Transjakarta Laut berupa armada kapal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik di Kepulauan Seribu</p>



ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN STRATEGIS
	Pembangunan Bandar Udara di Kepulauan Seribu untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah
Infrastruktur peningkatan dalam kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) untuk meningkatkan kualitas infrastruktur bidang pendidikan di Pulau Sabira, Pulau Harapan, serta Pulau Tidung
	Pembangunan Pos Kesehatan Pembantu (Posu) per Pulau untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kepulauan Seribu
	Pembangunan kolam <i>fisioterapi</i> melalui layanan terapi air (<i>hydrotherapy</i>) untuk meningkatkan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi fisik
	Pembangunan GOR Remaja Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai pusat kegiatan olahraga, seni, dan pengembangan generasi muda
	Revitalisasi Lapangan Bola di Kabupaten Kepulauan Seribu dalam rangka memberikan fasilitas olahraga yang lebih memadai
	Penambahan <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> (SWRO) sebagai pemenuhan air bersih untuk warga Kepulauan Seribu
	Pembangunan SPBU Terapung pada Kawasan Pulau Karya dan Pulau Tidung Kecil
	Peningkatan pemenuhan elektrifikasi di seluruh pulau di Kepulauan Seribu melalui pembangunan kabel laut dan pengembangan energi baru terbarukan.
Kawasan konservasi yang inklusif dan partisipatif	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan ketanagalistrikan dengan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kepulauan Seribu
	Kepulauan Seribu sebagai kawasan konservasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan
	Perlindungan biota sebagai upaya konservasi pada Kawasan Pulau Tidung Kecil
	Pengembangan budidaya biota laut pada Kawasan Pulau Tidung Kecil
	Pengembangan sarana edukasi berbasis lingkungan pada Kawasan Pulau Tidung Kecil
	Pengembangan Kepulauan Seribu sebagai kawasan strategis untuk lokasi penelitian ilmiah tentang ekosistem dan konservasi laut
	Komitmen pelestarian lingkungan menyasar kawasan perairan dan kepulauan, khususnya Kepulauan Seribu sebagai pusat konservasi ekologi.

Sumber: Diolah dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung arah pembangunan kewilayahan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan di atas, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merumuskan *quickwins* berupa penyusunan kajian pulau tematik yang komprehensif dan terintegrasi. Kajian ini ditujukan untuk menggali, mengklasifikasi, dan merumuskan arah pengembangan tiap pulau berdasarkan karakteristik, potensi, serta peruntukan wilayahnya.

Untuk mendukung pelaksanaan kajian tersebut, pada periode perencanaan 2025–2029, Pemerintah Kabupaten akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tenaga ahli atau konsultan profesional melalui unit kerja terkait sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya. Tenaga ahli ini diharapkan memiliki keahlian lintas sektor seperti tata ruang, lingkungan hidup, sosial ekonomi, pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kajian Pulau Tematik di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan mencakup:

- a. Pulau berpenduduk, dengan fokus pada kebutuhan infrastruktur dasar, layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta perlindungan lingkungan;
- b. Pulau-pulau resort, termasuk pengelompokan berdasarkan klasifikasi resort *high-end* dan *low-end*, untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi investasi, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan memperkuat basis data spasial dan tematik daerah, tetapi juga mendukung proses perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*), pengambilan kebijakan yang lebih presisi, serta penyusunan rencana pengembangan yang adaptif terhadap dinamika kawasan dan perubahan iklim.

Kajian pulau tematik akan menjadi dokumen acuan penting dalam merumuskan program dan kegiatan lintas sektor, serta sebagai dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah Kepulauan Seribu yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

3.4. Pohon Kinerja Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan integrasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan struktur Pohon Kinerja yang menjadi kerangka logis hubungan antara mandat, tujuan, sasaran, hingga indikator

kinerja yang relevan. Penyusunan pohon kinerja ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh rumusan strategi pembangunan wilayah selaras dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah secara terukur dan sistematis.

Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan pohon kinerja akan menjadi dasar dalam penjenjangan kinerja instansi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan *outcome*/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Untuk mengidentifikasi *outcome* dilakukan berdasarkan bukti (*evidence*) atau data yang andal dan valid. Identifikasi *outcome* juga harus terka dengan hal-hal yang bersifat faktual/empiris ataupun berdasarkan isu strategis yang terjadi.

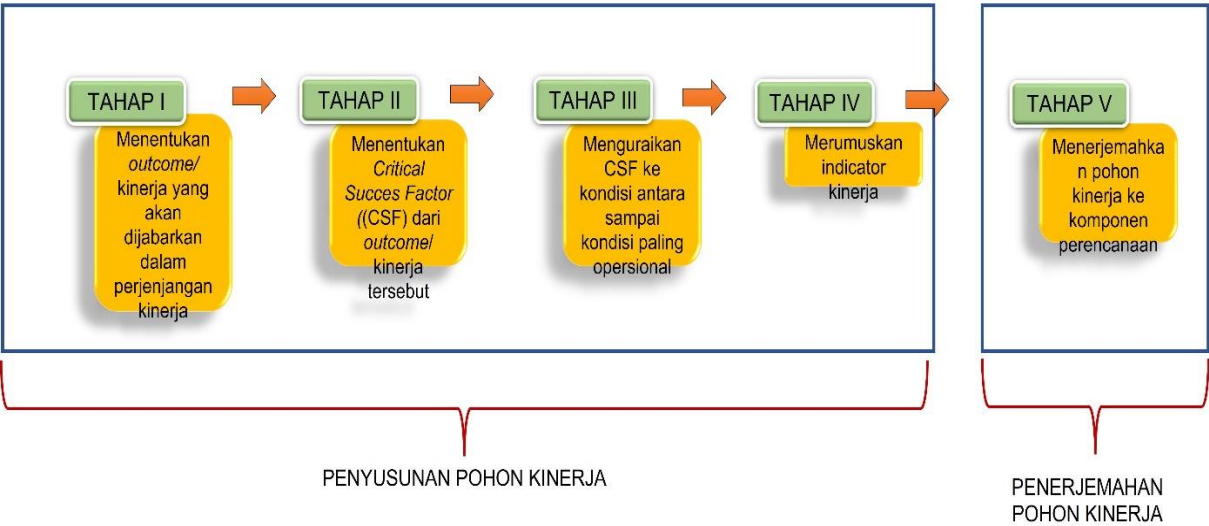
Tahap kedua setelah menetapkan *outcome*/hasil yang harus dicapai, yaitu mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) *outcome*/ hasil terkait CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Untuk menentukan CSF, perlu diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah, kemudian diterjemahkan menjadi kalimat-kalimat kondisi yang diperlukan untuk mencapai *outcome*. Proses penjabaran CSF dapat dilakukan dengan menggunakan gambar/diagram.

Tahap ketiga yaitu menguraikan *Critical Success Factor* (CSF) kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/ideal. CSF yang telah diidentifikasi dan diterjemahkan dalam kalimat kondisi merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi-kondisi perlu lainnya. Proses penjabarannya sama seperti Ketika mengidentifikasi *key success factor* dan menerjemahkannya menjadi kondisi yang diperlukan untuk pencapaian *outcome*.

Tahap keempat yaitu melengkapi setiap variabel dengan indikatornya masing-masing. Indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), dan terukur, Indikator yang baik yaitu indikator yang memenuhi kriteria SMART, yakni *Specific*, *Measurable*, *Attainable*, *Relevant*, dan *Timebound*.

Secara detail tahapan penyusunan pohon kinerja Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar 3.3 Tahapan Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029



Sumber : SE Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor e-0014/SE/2025 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Adapun perumusan rinci pohon kinerja Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 dilakukan dengan 3 (tiga) level matriks. Level I (satu) menyajikan kerangka awal berupa tujuan Renstra yang dirumuskan dari isu-isu strategis prioritas. Tujuan ini menjadi arah besar yang hendak dicapai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam periode perencanaan, dengan harapan terwujudnya layanan publik yang inklusif, pemerintahan yang efektif, serta kewenangan daerah yang berdampak nyata.

Level 2 (dua) menguraikan turunan dari tujuan Renstra tersebut ke dalam sasaran strategis dengan pendekatan *Critical Success Factor* (CSF). Di sini dijabarkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode Renstra, strategi yang ditempuh, serta outcome menengah yang menjadi penghubung antara tujuan makro dan hasil pembangunan nyata.

Level 3 (tiga) mengidentifikasi program perangkat daerah dan program pendukung lain yang relevan. Tabel ini menghubungkan sasaran strategis dengan program konkrit yang dilaksanakan lintas perangkat daerah, sehingga memastikan integrasi dan sinergi dalam implementasi pembangunan daerah. Dengan demikian, ketiga tabel ini membentuk alur yang sistematis, mulai dari perumusan tujuan, penjabaran sasaran, hingga penyusunan program yang aplikatif.



Adapun rincian-rincian penyusunan pohon kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9 Merumuskan Tujuan Renstra berdasarkan Isu Strategis (Level I)

MANDAT (DASAR HUKUM):	(MUATAN TEKNOKRATIS) ISU STARTEGIS PERANGKAT DAERAH	(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA
<div>1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004</div> <div>2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014</div> <div>3. Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024</div> <div>4. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018</div> <div>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019</div> <div>6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</div> <div>7. PermenPANRB No. 14 Tahun 2017</div> <div>8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025</div> <div>9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045</div> <div>10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Tahun 2025-2029</div>	<div>1. Peningkatan Kelembagaan dan Optimalisasi Fungsi Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor</div> <div>2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat</div> <div>3. Pelimpahan Kewenangan yang Efektif dan Berdampak</div>	<div>Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</div> <div>Indikator : Nilai Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi</div>
<div>HARAPAN:</div> <div>1. Layanan publik merata, inklusif, dan responsif di seluruh wilayah</div> <div>2. Pemerintahan daerah yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi hasil</div> <div>3. Kewenangan daerah dilaksanakan secara tertib, efektif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat</div>		

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025



Tabel 3.10 Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 (Level II)

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Berada Dalam Kondisi Optimal (Skor 4)	1) Peningkatan standar layanan publik melalui digitalisasi dan integrasi sistem layanan kelurahan/kecamatan. 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan publik yang ramah kelompok rentan dan difabel. 3) Monitoring kepuasan masyarakat secara berkala untuk perbaikan layanan.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
		1) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan 2) Koordinasi dan kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan program pemerintah 3) Peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal
		1) Pembaharuan kebijakan tentang Pelimpahan Kewenangan 2) Fasilitasi forum warga secara rutin sebagai media musyawarah dan pelibatan masyarakat	Meningkatnya kualitas Layanan Pelimpahan Kewenangan

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025



Tabel 3.11 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 (Level III)

(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
<p>Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat</p> <p>Indikator : Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan dan kelurahan</p>	<p>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan standar layanan publik melalui digitalisasi dan integrasi sistem layanan kelurahan/kecamatan. 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan publik yang ramah kelompok rentan dan difabel. 3) Monitoring kepuasan masyarakat secara berkala untuk perbaikan layanan. 	<p>Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)</p>	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
				Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah
				Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
			Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
<p>Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal</p> <p>Indikator : Nilai Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi</p>	<p>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan 2) Koordinasi dan kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan program pemerintah 3) Peningkatan kapasitas aparatur 	<p>Meningkatnya Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
				Terselenggaranya Fasilitasi Keprotokolan
				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Kesra, Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi
				Meningkatnya Persentase Sengketa Pertanahan yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas Layanan Pelimpahan Kewenangan Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Meningkatnya kualitas Layanan Pelimpahan Kewenangan	1) Pembaharuan kebijakan tentang Pelimpahan Kewenangan 2) Fasilitasi forum warga secara rutin sebagai media musyawarah dan pelibatan masyarakat	Terselenggaranya Pengelolaan Pelimpahan Kewenangan Administrasi	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

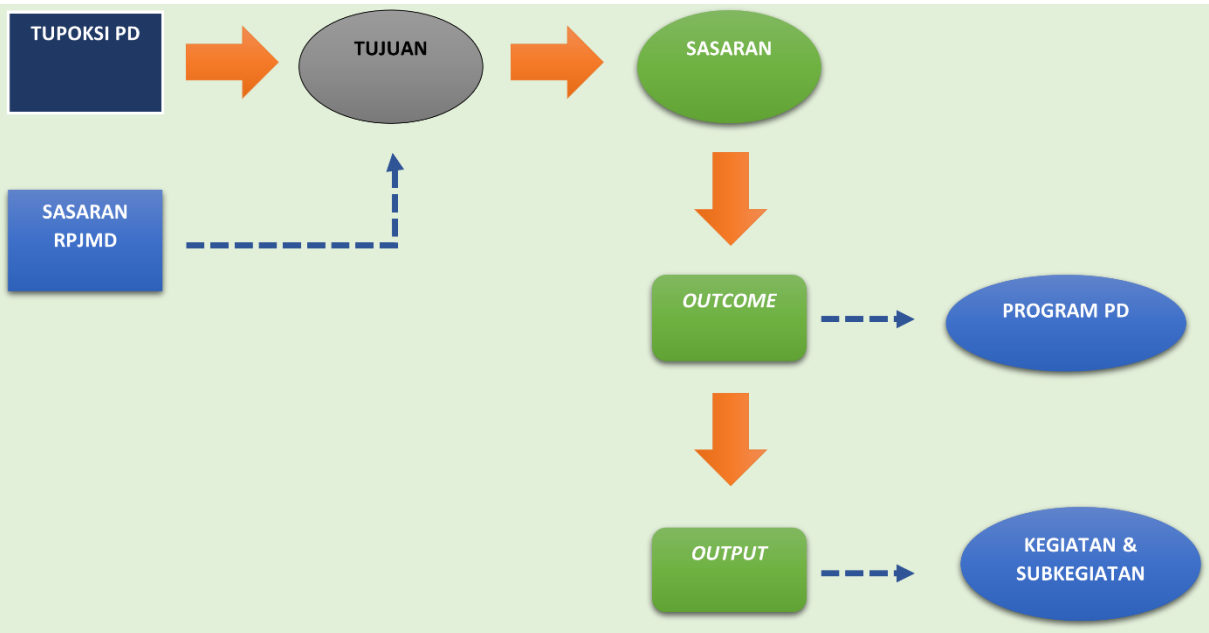
BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029



Sumber : SE Gubernur DKI Nomor e-0014/SE/2025



Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat							
	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				Nilai Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi		
		Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan		
			Terwujudnya Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Persentase Penyelesaian Layanan oleh RT, RW, LMK dan FKDM di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	
					Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Disediakan	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual	Pelaksanaan Bina Mental Spritual	
					Jumlah Penanganan Bencana	Penanganan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kepulauan Administrasi Kepulauan Seribu		Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah	Persentase Penyelesaian Masalah dalam Lingkup Pekerjaan PPSU yang terselesaikan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	
			Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	
				Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	
	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				Nilai Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi		
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal			Nilai Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi		
			Terwujudnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terselenggaranya Fasilitas Keprotokolan	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Acara Kabupaten	Fasilitas Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Terwujudnya Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	PROGRAM PENGELOLAAN KABUPATEN ADMINISTRASI	
			Terwujudnya Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN KABUPATEN ADMINISTRASI	
				Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi di Atas 80%	Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi	
				Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi	Persentase Sengketa Pertanahan yang ditindaklanjuti	Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	
					Jumlah Dokumen Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi yang Disusun dan Dievaluasi	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) Kabupaten Administrasi	Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi yang Mengikuti Character Building	Pelaksanaan Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kabupaten Administrasi	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Evaluasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi	Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten Administrasi	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Administrasi	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kabupaten Administrasi	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Bupati/Camat/Lurah pada Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Lurah pada Kabupaten Administrasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi	Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi	
	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				Nilai Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi		
		Meningkatnya kualitas Layanan Pelimpahan Kewenangan			Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan		
			Terwujudnya Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal		Persentase Penyelesaian Masalah Pelimpahan Kewenangan	PROGRAM PELIMPAHAN KEWENANGAN KABUPATEN ADMINISTRASI	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terselenggaranya Pengelolaan Pelimpahan Kewenangan Administrasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi	Pengelolaan Pelimpahan Kewenangan Administrasi	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Titik Pencahayaan Kota yang Bertambah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi yang dipelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi	
					Panjang Jalan yang Dibangun	Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kota Kabupaten Administrasi	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten sesuai kewenangannya	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Administrasi	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Administrasi	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Administrasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten Administrasi yang Berkualitas	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Kabupaten Administrasi	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi	

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025



Pemetaan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang harus digunakan oleh perangkat daerah dalam melakukan pencapaian sasaran telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini telah ditetapkan pula kinerja yang dihasilkan, indikator keluaran dan satuan hasil dari tiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikut rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI													
PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	4	4	10.456.137.786	4	10.850.369.753	4	11.174.986.256	4	12.951.985.964	4	11.905.689.893	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KECAMATAN, KELURAHAN
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelesaian Layanan oleh RT, RW, LMK dan FKDM di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	100	10.456.137.786	100	10.850.369.753	100	11.174.986.256	100	12.951.985.964	100	11.905.689.893	KECAMATAN, KELURAHAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	30	37	275.843.549	32	278.601.984	32	281.388.004	32	284.201.884	32	287.043.903	KELURAHAN
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Disediakan	96	96	1.325.285.000	96	1.329.301.600	96	1.333.358.366	96	1.337.455.699	96	1.341.594.006	KECAMATAN, KELURAHAN
Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	Jumlah RT, RW, dan/atau LMK yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan	157	157	5.806.370.038	157	5.843.097.738	157	5.890.696.716	157	5.938.771.683	157	5.987.327.400	KELURAHAN
Pelaksanaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual	32	32	574.285.950	32	588.643.098	32	603.359.176	32	618.443.155	32	633.904.234	KECAMATAN, KELURAHAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penanganan Bencana	jumlah pelaksanaan penanganan bencana	6	6	167.369.335	6	169.043.028	6	170.733.458	6	172.440.793	6	174.165.201	KELURAHAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	0	0	0	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	KECAMATAN, KELURAHAN
Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	8	0	0	0	0	0	0	8	1.426.077.160	0	0	KECAMATAN, KELURAHAN
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	0	0	0	8	93.600.000	8	93.600.000	8	93.600.000	8	93.600.000	KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	96	96	2.306.983.914	96	2.537.682.305	96	2.791.450.536	96	3.070.595.590	96	3.377.655.149	KECAMATAN, KELURAHAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	31.134.816.234	4	32.904.224.207	4	34.739.491.632	4	35.118.544.722	4	38.316.985.837	ASISTEN ADMINISTRASI, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KECAMATAN, KELURAHAN
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4	4	161.225.305	4	162.837.558	4	164.465.934	4	166.110.593	4	167.771.699	KECAMATAN, KELURAHAN
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8	8	161.225.305	8	162.837.558	8	164.465.934	8	166.110.593	8	167.771.699	KECAMATAN, KELURAHAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah	Persentase Penyelesaian Masalah dalam Lingkup Pekerjaan PPSU yang Terselesaikan	0	100	30.973.590.929	100	32.741.386.649	100	34.575.025.698	100	34.952.434.129	100	38.149.214.138	KELURAHAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	72	72	30.973.590.929	72	32.741.386.649	72	34.575.025.698	72	34.952.434.129	72	38.149.214.138	KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	4	4	10.329.740.260	4	10.504.732.679	4	10.683.224.947	4	10.865.287.060	4	11.050.990.415	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KECAMATAN, KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4	4	6.913.908.405	4	7.034.326.205	4	7.157.195.155	4	7.282.542.878	4	7.410.419.381	KELURAHAN
Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	52	52	6.913.908.405	52	7.034.326.205	52	7.157.195.155	52	7.282.542.878	52	7.410.419.381	KELURAHAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4	4	3.415.831.855	4	3.470.406.474	4	3.526.029.792	4	3.582.744.182	4	3.640.571.034	KECAMATAN, KELURAHAN
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	22	8	3.201.868.628	8	3.254.303.615	8	3.307.787.301	8	3.362.340.662	8	3.417.985.089	KECAMATAN, KELURAHAN
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	15	213.963.227	15	216.102.859	15	218.242.491	15	220.403.520	15	222.585.945	KELURAHAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	640.405.853	4	653.213.970	4	666.278.249	4	679.603.814	4	693.195.890	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KECAMATAN, KELURAHAN
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan umum	0	100	640.405.853	100	653.213.970	100	666.278.249	100	679.603.814	100	693.195.890	KECAMATAN, KELURAHAN
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32	32	640.405.853	32	653.213.970	32	666.278.249	32	679.603.814	32	693.195.890	KECAMATAN, KELURAHAN
BIDANG URUSAN KABUPATEN ADMINISTRASI													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	54	75	74.877.755.145	79	77.798.078.894	82	79.877.745.130	86	82.042.838.470	89	83.071.646.609	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4		4		4		4		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, BAGIAN KEUANGAN, BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANA AN DAN KEPEGAWAIAN, UNIT KERJA TEKNIS 1, UNIT KERJA TEKNIS 2, KECAMATAN, KELURAHAN		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	4	59.475.000	4	59.475.000	4	59.475.000	4	59.475.000	4	59.475.000	BAGIAN KEUANGAN, BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	BAGIAN KEUANGAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	33.475.000	4	33.475.000	4	33.475.000	4	33.475.000	4	33.475.000	BAGIAN KEUANGAN, BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	4	14.634.420.212	4	18.203.958.696	4	22.571.805.371	4	23.969.536.766	4	22.210.556.306	BAGIAN KEUANGAN, KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	167	157	14.554.695.387	157	18.124.233.871	157	22.492.080.546	157	23.889.811.941	157	22.130.831.481	BAGIAN KEUANGAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	36	79.724.825	36	79.724.825	36	79.724.825	36	79.724.825	36	79.724.825	BAGIAN KEUANGAN, KECAMATAN, KELURAHAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	4	239.279.351	4	247.885.486	4	263.977.696	4	273.293.748	4	290.756.371	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	2	3.197.936	0	0	2	3.697.936	0	0	2	3.797.936	KECAMATAN, KELURAHAN, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	9	236.081.415	8	247.885.486	8	260.279.760	8	273.293.748	8	286.958.435	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, UNIT KERJA TEKNIS 1, KECAMATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	11.719.395.611	4	11.824.940.626	4	11.933.344.930	4	12.043.986.437	4	12.154.878.293	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, UNIT KERJA TEKNIS 1, UNIT KERJA TEKNIS 2, KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	4	193.885.421	9	197.763.129	9	201.718.392	9	205.752.759	9	209.867.815	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	18	578.473.371	14	584.258.104	14	590.100.686	14	596.001.693	14	601.961.709	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11	10	428.532.684	10	432.818.011	10	437.146.191	10	441.517.653	10	445.932.829	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	39	1.000.026.955	27	1.000.457.225	27	1.000.001.797	27	1.000.661.815	27	1.000.438.433	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, UNIT KERJA TEKNIS 1, UNIT KERJA TEKNIS 2, KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	5	56.064.263	5	56.624.906	5	57.191.155	5	57.763.066	5	58.340.697	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9	9	8.650.525.501	9	8.737.030.756	9	8.824.401.064	9	8.912.645.074	9	9.001.771.525	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, UNIT KERJA TEKNIS 2, KECAMATAN, KELURAHAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	36	532.285.000	36	534.946.425	36	540.295.889	36	545.698.848	36	551.155.837	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	36	276.826.250	36	278.210.381	36	279.601.433	36	280.999.440	36	282.404.437	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	4	2.776.166	1	2.831.689	1	2.888.323	1	2.946.089	1	3.005.011	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	6.012.010.495	4	5.970.524.182	4	6.038.089.254	4	6.106.467.172	4	6.175.668.811	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, UNIT KERJA TEKNIS 1, KECAMATAN, KELURAHAN
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	15	598.047.302	9	604.027.775	9	610.068.053	9	616.168.733	9	622.330.421	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64	77	672.532.304	36	685.982.950	36	699.702.609	36	713.696.661	36	727.970.594	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	9	4.566.392.206	2	4.612.056.128	2	4.658.176.689	2	4.704.758.456	2	4.751.806.041	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, UNIT KERJA TEKNIS 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	2	8.249.248	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	30	17	166.789.435	9	68.457.329	9	70.141.903	9	71.843.322	9	73.561.755	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	16.380.257.381	4	16.888.811.208	4	17.408.133.306	4	17.959.625.394	4	18.534.755.237	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, UNIT KERJA TEKNIS 1, UNIT KERJA TEKNIS 2, KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	68.672.420	12	72.106.041	12	75.711.343	12	79.496.910	12	83.471.756	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	108	6.251.195.701	108	6.268.731.572	108	6.272.793.519	108	6.283.577.325	108	6.291.284.645	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN, UNIT KERJA TEKNIS 1, UNIT KERJA TEKNIS 2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	44	514.504.268	44	524.794.353	44	535.290.240	44	545.996.045	44	556.915.966	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	36	9.545.884.992	36	10.023.179.242	36	10.524.338.204	36	11.050.555.114	36	11.603.082.870	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, UNIT KERJA TEKNIS 1, KECAMATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	20.761.676.225	4	19.404.739.527	4	16.050.980.382	4	15.717.063.832	4	18.402.588.270	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, UNIT KERJA TEKNIS 1, KECAMATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	62	6.312.010.705	62	6.531.371.026	62	6.757.312.157	62	6.990.031.522	62	7.229.732.467	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0	9	15.874.236	9	16.667.948	9	17.501.345	9	18.376.412	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	110	137.574.845	74	144.453.587	74	151.676.267	74	159.260.080	74	167.223.084	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	20	13.132.283.311	14	11.526.251.810	9	7.932.039.365	9	7.350.000.546	11	9.780.500.562	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, UNIT KERJA TEKNIS 1, KECAMATAN, KELURAHAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	29	862.298.416	16	862.929.741	16	862.948.336	16	863.327.303	16	863.073.849	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	117	193	317.508.948	147	323.859.127	147	330.336.309	147	336.943.036	147	343.681.896	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, KECAMATAN, KELURAHAN
Fasilitasi Keprotokolan	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Acara Kabupaten	4	4	414.777.330	4	423.072.877	4	431.534.334	4	440.165.021	4	448.968.321	UNIT KERJA TEKNIS 2
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1	1	414.777.330	1	423.072.877	1	431.534.334	1	440.165.021	1	448.968.321	UNIT KERJA TEKNIS 2



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	4	4	3.785.344.142	4	3.808.128.871	4	4.043.340.985	4	4.181.439.964	4	4.326.001.377	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANA AN DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, UNIT KERJA TEKNIS 1
	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	4	4		4		4		4		4		ASISTEN ADMINISTRASI, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi di Atas 80%	100	100	3.785.344.142	100	3.808.128.871	100	4.043.340.985	100	4.181.439.964	100	4.326.001.377	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN KEUANGAN, BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	Persentase Sengketa Pertanahan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	1	1	36.291.500	1	36.291.500	1	36.291.500	1	36.291.500	1	36.291.500	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi yang Disusun dan Dievaluasi	1	1	1.950.000	1	1.950.000	1	1.950.000	1	1.950.000	1	1.950.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	4	4	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	4	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi	350	400	103.284.365	400	1.041.721	400	105.360.380	400	106.413.984	400	107.478.124	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) Kabupaten Administrasi	2	2	10.100.000	2	10.100.000	2	10.100.000	2	10.100.000	2	10.100.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi	4	4	113.965.938	4	114.022.921	4	114.079.932	4	114.136.972	4	114.194.041	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	4	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	0	0	0	1	9.036.000	1	9.036.000	1	9.036.000	1	9.036.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Pelaksanaan Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi	Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi yang Mengikuti Character Building	0	0	0	50	60.100.000	50	60.100.000	50	60.100.000	50	60.100.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	4	4	33.720.182	4	33.737.042	4	33.753.911	4	33.770.787	4	33.787.673	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	0	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kabupaten Administrasi	175	175	64.800.000	175	64.800.000	175	64.800.000	175	64.800.000	175	64.800.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	2	2	41.742.220	2	42.159.642	2	42.581.238	2	43.007.051	2	43.437.121	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi	2	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi	2	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	4	4	7.800.000	4	7.800.000	4	7.800.000	4	7.800.000	4	7.800.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	4	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi	0	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi	0	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi	0	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi	0	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi	0	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi	12	12	193.154.339	12	193.154.339	12	193.154.339	12	193.154.339	12	193.154.339	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi	0	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	UNIT KERJA TEKNIS 1
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi	0	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	4	11.700.000	UNIT KERJA TEKNIS 2
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten Administrasi	4	4	10.100.000	4	10.100.000	4	10.100.000	4	10.100.000	4	10.100.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Administrasi	4	4	214.335.861	4	218.622.578	4	222.995.029	4	227.454.930	4	232.004.028	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kabupaten Administrasi	4	4	393.888.544	4	401.766.315	4	409.801.641	4	417.997.674	4	426.357.627	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Administrasi	2	2	16.242.780	2	16.242.780	2	16.242.780	2	16.242.780	2	16.242.780	UNIT KERJA TEKNIS 1
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Administrasi	2	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pelaksanaan Koordinasi dan MonitoringPenerimaan PBB-P2 Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Administrasi	0	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Lurah pada Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/ Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Bupati/Camat/Lurah pada Kabupaten Administrasi	0	2	16.250.000	2	16.250.000	2	16.250.000	2	16.250.000	2	16.250.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi	0	1	10.100.000	1	10.100.000	1	10.100.000	1	10.100.000	1	10.100.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi	2	2	3.250.000	2	3.250.000	2	3.250.000	2	3.250.000	2	3.250.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi yang Dilaksanakan	2	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAA N DAN KEPEGAWAIAN
Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi	4	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAA N DAN KEPEGAWAIAN
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5	5	39.000.000	5	39.000.000	5	39.000.000	5	39.000.000	5	39.000.000	BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAA N DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi	12	12	2.266.568.413	12	2.309.804.033	12	2.427.794.235	12	2.551.683.947	12	2.681.768.144	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
PROGRAM PELIMPAHAN KEWENANGAN KABUPATEN ADMINISTRASI	Persentase Penyelesaian Masalah Pelimpahan Kewenangan	0	80	32.675.360.503	80	32.529.881.563	80	33.240.158.563	80	33.969.208.275	80	34.796.035.412	UNIT KERJA TEKNIS 1, UNIT KERJA TEKNIS 2
Pengelolaan Pelimpahan Kewenangan Administrasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi	0	95	32.675.360.503	95	32.529.881.563	95	33.240.158.563	95	33.969.208.275	95	34.796.035.412	UNIT KERJA TEKNIS 1, UNIT KERJA TEKNIS 2
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	3,2	3,71	8.811.928.695	3,9	9.053.637.476	4,1	9.455.095.195	4,3	9.865.032.697	4,5	9.244.352.787	UNIT KERJA TEKNIS 2
Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi	0	12	2.969.420.142	12	3.043.655.646	12	3.119.747.037	12	3.197.740.713	12	3.277.684.230	UNIT KERJA TEKNIS 2



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun	0	1	1.674.319.823	1	1.676.510.000	1	1.672.422.750	1	1.672.233.319	1	1.676.039.152	UNIT KERJA TEKNIS 2
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Titik Pencahayaan Kota yang Bertambah	10	10	1.499.811.357	10	1.562.306.641	10	1.626.364.307	10	1.692.023.415	10	1.759.324.000	UNIT KERJA TEKNIS 2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi yang dipelihara	0	0	0	5	59.302.156	5	63.284.710	5	67.616.828	5	70.307.248	UNIT KERJA TEKNIS 2
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	1.044.536.355	UNIT KERJA TEKNIS 2
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0,7	1,5	12.357.954.464	3	12.433.624.864	4,5	12.455.306.107	6	12.478.071.413	7,5	12.501.974.983	UNIT KERJA TEKNIS 2
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0	0	0	0,7	64.505.115	0,7	65.367.743	0,7	67.601.936	0,7	68.216.985	UNIT KERJA TEKNIS 2
Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kota Kabupaten Administrasi	0	12	951.774.297	12	975.568.654	12	999.957.871	12	1.024.956.818	12	1.050.580.738	UNIT KERJA TEKNIS 2
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3500	1.500	164.925.126	1.500	168.223.628	1.500	171.588.101	1.500	175.019.863	1.500	178.520.260	UNIT KERJA TEKNIS 1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten sesuai kewenangannya	15	15	1.311.371.063	15	1.376.939.616	15	1.445.786.597	15	1.518.075.927	15	1.593.979.723	UNIT KERJA TEKNIS 1
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Administrasi	0	0	0	2	16.500.000	3	21.500.000	3	21.500.000	3	21.500.000	UNIT KERJA TEKNIS 1
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	73.098.073	UNIT KERJA TEKNIS 1
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	800	1.200	108.118.315	1.200	110.280.681	1.200	112.486.295	1.200	114.736.021	1.200	117.030.741	UNIT KERJA TEKNIS 1
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100	100	103.893.230	100	105.971.095	100	108.090.516	100	110.252.327	100	112.457.373	UNIT KERJA TEKNIS 1
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	20	20	8.107.130	20	8.512.486	20	8.938.111	20	9.385.016	20	9.854.267	UNIT KERJA TEKNIS 1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	0	2	3.250.000	2	3.250.000	2	3.250.000	2	3.250.000	2	3.250.000	UNIT KERJA TEKNIS 1
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	1	0	0	1	21.465.967	1	22.002.616	1	22.552.682	1	23.116.499	UNIT KERJA TEKNIS 1
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	16	460	1.370.585.933	300	480.635.404	305	490.248.112	310	500.053.074	315	510.054.135	UNIT KERJA TEKNIS 1
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	0	5	161.432.800	5	164.661.456	5	167.954.685	5	171.313.779	5	174.740.054	UNIT KERJA TEKNIS 1
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi	0	3	367.861.319	3	375.218.545	3	382.722.916	3	390.377.375	3	398.184.922	UNIT KERJA TEKNIS 1
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Administrasi	0	2	273.359.053	2	278.826.234	2	284.402.759	2	290.090.814	2	295.892.630	UNIT KERJA TEKNIS 1
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten Administrasi	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0	30	43.046.620	30	43.907.552	30	44.785.703	30	45.681.417	30	46.595.046	UNIT KERJA TEKNIS 1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10	5	35.563.492	5	36.274.762	5	37.000.257	5	37.740.262	5	38.495.067	UNIT KERJA TEKNIS 1
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten Administrasi yang Berkualitas	1	1	323.654.630	1	331.745.996	1	340.039.646	1	348.540.637	1	357.254.153	UNIT KERJA TEKNIS 1
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	16	16	134.983.014	16	138.357.589	16	141.816.529	16	145.361.942	16	148.995.991	UNIT KERJA TEKNIS 1
				155.243.096.383		160.273.958.645		165.304.820.905		170.335.683.169		175.366.545.433	

Keterangan :

	= Bidang Urusan
	= Program
	= Kegiatan
	= Subkegiatan

Sumber: SIPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025 - 2029 (<https://rpjmd25.bapedadki.net>)



Program-program di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak secara langsung mendukung program prioritas kepala daerah, seperti *Quick Wins*, 10 Program Kerja, *DKI Strategic Project* (DSP), maupun *Global City Program* (GCP). Namun, program-program di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mendukung secara langsung pada peningkatan Indeks Pelayanan Publik yang mana termasuk pada indikator RPJMD pada Sasaran Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat dalam Misi 3 yakni Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal dan di Tujuan 3 Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern.

Selain itu, terdapat 2 sub kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mendukung program kepala daerah, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendukung Program Konstruksi dan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan pada *DKI Strategic Project* (DSP).
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendukung Program Konstruksi dan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan pada *DKI Strategic Project* (DSP).

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dinilai baik apabila telah memenuhi prinsip SMART yang merupakan singkatan dari *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-Bounded*.



- **Specific**
Mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
- **Measurable**
Mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.
- **Agreeable**
Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
- **Realistic**
Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
- **Time-bounded**
Memiliki batas waktu pencapaian.

Selain itu IKU juga harus mencerminkan tugas dan fungsi serta fokus dan prioritas utama organisasi. Indikator Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 mengacu pada Tugas pokok dan fungsinya serta mendorong tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Nilai Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4

Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025



Selanjutnya indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja eselon III selama empat tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.5 seluruh indikator yang ditampilkan dalam tabel tersebut merupakan indikator kinerja program yang termuat dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

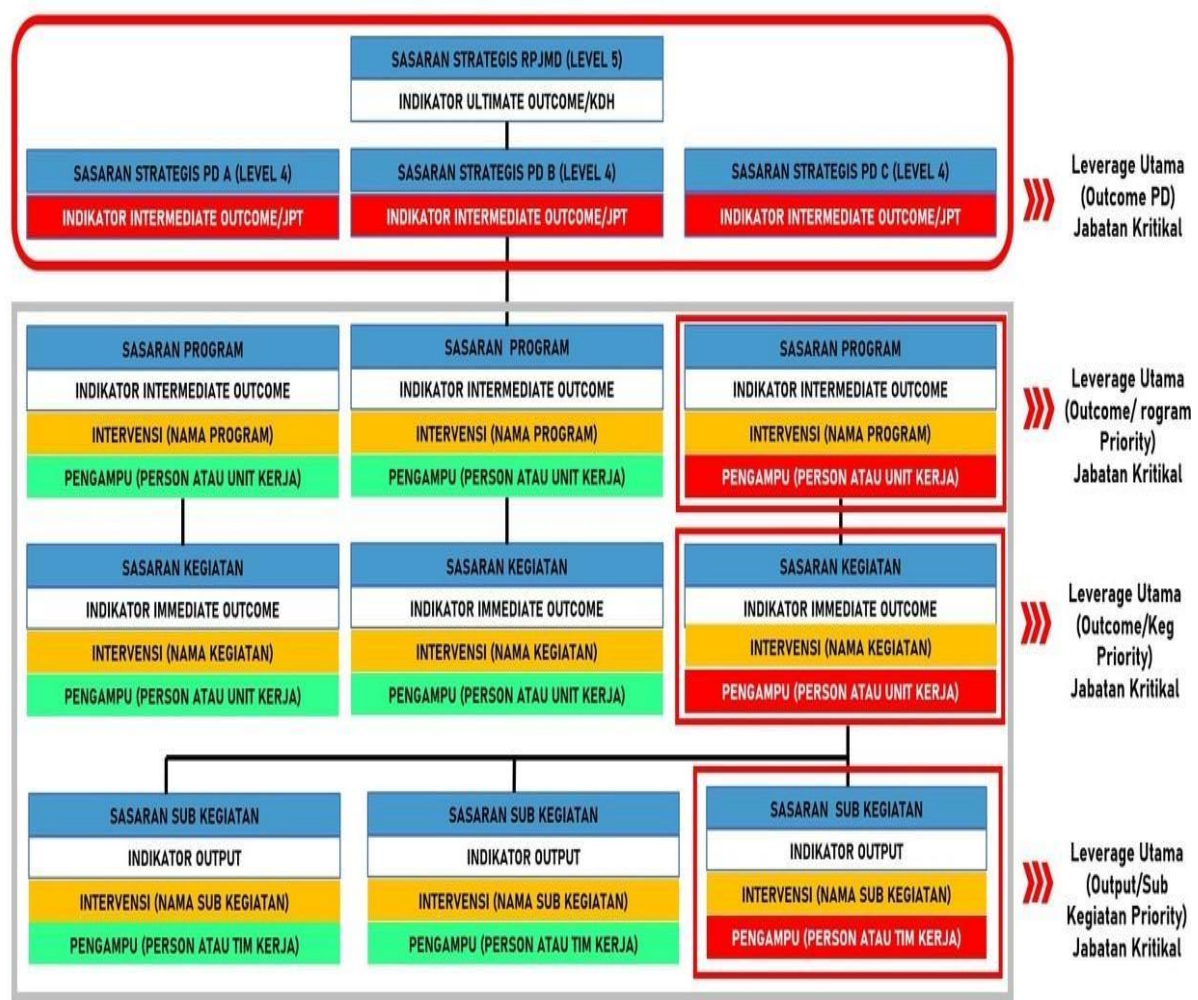
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	Persen	53,7	71,43	75	78,57	82,14	85,71	89,29	89,29
6	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Persentase Penyelesaian Masalah Pelimpahan Kewenangan	Persen	0	80	80	80	80	80	80	80

Sumber: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Kinerja Perangkat daerah dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah/ Indikator Kinerja Utama. Penurunan/Pemetaan Indikator Kinerja Utama (*cascading* IKU) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses cascading IKU berdasarkan *logic model* penurunan kinerja organisasi.

Gambar 4.2 Alur Proses *Cascading* Kinerja/ Sasaran Perangkat Daerah



Sumber: Tim Penyusun Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025



BAB V

PENUTUP

Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Hal tersebut dilakukan dengan menjamin keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra. Selain itu, Renstra disusun untuk memberikan arahan pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.